



KEMENTERIAN

BUMN

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 041 TAHUN ANGGARAN 2022 (AUDITED)

KEMENTERIAN BUMN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara/BUMN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian BUMN. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 8 Mei 2023

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	5
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	6
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	9
III. NERACA.....	10
IV. LAPORAN OPERASIONAL	11
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
A. PENJELASAN UMUM	13
1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN	13
2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	15
3. BASIS AKUNTANSI	15
4. DASAR PENGUKURAN	16
5. KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
1. PENDAPATAN	21
2. BELANJA.....	23
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	28
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	28
2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	28
3. Piutang Bukan Pajak.....	29
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	31
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	32
6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	32
7. Persediaan	33
8. Tanah	33
9. Peralatan dan Mesin	34
10. Gedung dan Bangunan	35
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan	36
12. Aset Tetap Lainnya	36
13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
14. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	37
15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	37
16. Aset Tak Berwujud	38

17. Aset Lain-lain	41
18. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	41
19. Utang Kepada Pihak Ketiga	42
20. Hibah Yang Belum Disahkan	43
21. Pendapatan Diterima Dimuka	44
22. Ekuitas	44
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	45
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	45
2. Beban Pegawai	46
3. Beban Persediaan	46
4. Beban Barang dan Jasa	47
5. Beban Pemeliharaan	49
6. Beban Perjalanan Dinas	49
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	50
9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	50
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	52
1. Ekuitas Awal	52
2. Surplus (Defisit) LO	52
3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	52
4. Transaksi Antar Entitas	52
5. Ekuitas Akhir	52
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	53
1. Data Tuntutan Hukum	53
2. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara	54

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2023

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

I. RINGKASAN

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.274.496.971 atau mencapai 249,38% dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp912.075.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp196.555.127.045 atau mencapai 99,06% dari alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp198.426.521.000.

Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan Program Kerja Kementerian BUMN dengan output strategis yang dihasilkan antara lain berupa rekomendasi/rumusan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan terhadap BUMN. Kementerian BUMN merupakan kementerian yang menjalankan tugas koordinasi dan menghasilkan kebijakan terkait dengan pembinaan BUMN sehingga output utama yang dihasilkan oleh Kementerian BUMN berupa rekomendasi kebijakan dalam melakukan pengembangan dan pengawasan kepada BUMN.

Sejalan dengan tupoksi Kementerian BUMN melakukan pengembangan terhadap BUMN yang tercermin dalam output rekomendasi kebijakan dalam peningkatan daya saing BUMN seperti pembentukan holding BUMN industri pertahanan, penyehatan keuangan PT Jiwasraya dan PT ASABRI serta restrukturisasi beberapa BUMN. Pencapaian output tersebut diharapkan dapat membuat BUMN lebih sehat dan bisa memberikan kontribusi lebih besar.

Kementerian BUMN juga memastikan BUMN bisa menjalankan dukungan terhadap program prioritas nasional sesuai dengan tatakelola yang baik, yang tercermin dalam output rekomendasi kebijakan penugasan BUMN berupa pembangunan jalan tol Sumatera, pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, pelaksanaan hilirisasi tambang (coal to DME), pembuatan vaksin BUMN dan lain-lain. Rincian output strategis sebagaimana tersaji dalam lampiran.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.946.109.054.243 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.193.702.007, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.939.808.237.067, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp28.099.544 dan Rp1.079.015.625. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.577.367.019 dan Rp1.940.531.687.224.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.005.137.861, sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp221.283.256.139 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(217.278.118.278).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.024.547.748 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(216.253.570.530).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp1.961.254.155.353, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(216.253.570.530), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp(62.627.673) dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp195.593.730.074, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp1.940.531.687.224.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan Neraca per 31 Desember 2022. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

No	URAIAN	CATT.	2022				2021			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.								
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA		912.075.000	2.274.496.971	1.362.421.971	249,38%	1.941.017.000	6.158.659.573	4.217.642.573	317,29%
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak		912.075.000	2.274.496.971	1.362.421.971	249,38%	1.941.017.000	6.158.659.573	4.217.642.573	317,29%
A.I.2	HIBAH		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)			912.075.000	2.274.496.971	1.362.421.971	249,38%	1.941.017.000	6.158.659.573	4.217.642.573	317,29%
B	BELANJA NEGARA	B.2.								
B.I.1	Rupiah Murni		198.426.521.000	196.555.127.045	(1.871.393.955)	99,06%	193.047.600.000	190.942.482.059	(2.105.117.941)	98,91%
B.I.1.a	Belanja Pegawai	B.3.	76.167.487.000	76.080.175.955	(87.311.045)	99,89%	58.140.767.000	57.808.669.747	(332.097.253)	99,43%
B.I.1.b	Belanja Barang	B.4.	118.572.188.000	116.812.185.301	(1.760.002.699)	98,52%	124.138.219.000	122.437.963.609	(1.700.255.391)	98,63%
B.I.1.c	Belanja Modal	B.5.	3.686.846.000	3.662.765.789	(24.080.211)	99,35%	10.768.614.000	10.695.848.703	(72.765.297)	99,32%
JUMLAH BELANJA (B. I)			198.426.521.000	196.555.127.045	(1.871.393.955)	99,06%	193.047.600.000	190.942.482.059	(2.105.117.941)	98,91%

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

III. NERACA

III. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catt.	JUMLAH		Kenaiakan (Penurunan)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0	0	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	3.629.370.644	3.824.293.582	(194.922.938)	(5,10)
Piutang Bukan Pajak	C.3	178.033.935	159.266.898	18.767.037	11,78
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	(81.270.923)	(81.177.088)	(93.835)	0,12
Piutang Bukan Pajak (Netto)		96.763.012	78.089.810	18.673.202	23,91
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.5	3.500.000	3.500.000	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.6	(17.500)	(17.500)	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.482.500	3.482.500	0	0,00
Persediaan	C.7	1.464.085.851	1.058.158.602	405.927.249	38,36
JUMLAH ASET LANCAR		5.193.702.007	4.964.024.494	229.677.513	4,63
ASET TETAP					
Tanah	C.8	1.468.058.953.000	1.468.058.953.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	C.9	136.884.866.357	137.776.726.404	(891.860.047)	(0,65)
Gedung dan Bangunan	C.10	469.161.643.003	468.773.597.003	388.046.000	0,08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	7.706.388.680	7.706.388.680	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	1.066.410.162	1.066.410.162	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.13	(143.070.024.135)	(121.163.191.508)	(21.906.832.627)	18,08
JUMLAH ASET TETAP		1.939.808.237.067	1.962.218.883.741	(22.410.646.674)	(1,14)
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	28.240.748	28.240.748	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	(141.204)	(141.204)	0	0,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		28.099.544	28.099.544	0	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		28.099.544	28.099.544	0	0,00
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.16	16.189.997.921	19.389.526.163	(3.199.528.242)	(16,50)
Aset Lain-lain	C.17	3.199.528.242	3.892.012.485	(692.484.243)	(17,79)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(18.310.510.538)	(19.848.854.395)	1.538.343.857	(7,75)
JUMLAH ASET LAINNYA		1.079.015.625	3.432.684.253	(2.353.668.628)	(68,57)
JUMLAH ASET		1.946.109.054.243	1.970.643.692.032	(24.534.637.789)	(1,25)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	378.408.493	78.578.543	299.829.950	381,57
Hibah Yang Belum Disahkan	C.20	0	1.311.700.000	(1.311.700.000)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.21	5.198.958.526	7.999.258.136	(2.800.299.610)	(35,01)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.577.367.019	9.389.536.679	(3.812.169.660)	(40,60)
JUMLAH KEWAJIBAN		5.577.367.019	9.389.536.679	(3.812.169.660)	(40,60)
EKUITAS					
Ekuitas	C.22	1.940.531.687.224	1.961.254.155.353	(20.722.468.129)	(1,06)
JUMLAH EKUITAS		1.940.531.687.224	1.961.254.155.353	(20.722.468.129)	(1,06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.946.109.054.243	1.970.643.692.032	(24.534.637.789)	(1,25)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA


ERICK THOHIR

IV. LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CATT	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	JUMLAH	%
1	2	3	3	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.005.137.861	4.029.767.545	(24.629.684)	(0,61)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		4.005.137.861	4.029.767.545	(24.629.684)	(0,61)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.005.137.861	4.029.767.545	(24.629.684)	(0,61)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	76.356.018.861	57.803.877.109	18.552.141.752	32,09
Beban Persediaan	D.3	1.872.592.661	2.053.627.628	(181.034.967)	(8,82)
Beban Barang dan Jasa	D.4	85.668.063.712	95.416.246.129	(9.748.182.417)	(10,22)
Beban Pemeliharaan	D.5	9.746.142.434	9.248.897.218	497.245.216	5,38
Beban Perjalanan Dinas	D.6	19.291.523.521	11.970.296.074	7.321.227.447	61,16
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	28.348.821.115	28.597.849.849	(249.028.734)	(0,87)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	93.835	39.467.136	(39.373.301)	(99,76)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		221.283.256.139	205.130.261.143	16.152.994.996	7,87
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(217.278.118.278)	(201.100.493.598)	(16.177.624.680)	8,04
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.056.000.001	1.030.000.000	26.000.001	2,52
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		17.032.303	2.107.049.209	(2.090.016.906)	(99,19)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		1.038.967.698	(1.077.049.209)	2.116.016.907	(196,46)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		44.652.860	22.301.392	22.351.468	100,22
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		59.072.810	0	59.072.810	100,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(14.419.950)	22.301.392	(36.721.342)	(164,66)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	1.024.547.748	(1.054.747.817)	2.079.295.565	(197,14)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(216.253.570.530)	(202.155.241.415)	(14.098.329.115)	6,97

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA


ERICK THOHIR

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	1.961.254.155.353	1.961.869.742.868	(615.587.515)	(0,03)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(216.253.570.530)	(202.155.241.415)	(14.098.329.115)	6,97
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(62.627.673)	(42.127.019)	(20.500.654)	48,66
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0	0	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(62.627.673)	7.285.807	(69.913.480)	(959,58)
LAIN-LAIN	E.3.5	0	(49.412.826)	49.412.826	(100,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	195.593.730.074	201.581.780.919	(5.988.050.845)	(2,97)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(20.722.468.129)	(615.587.515)	(20.106.880.614)	3.266,29
EKUITAS AKHIR	E.5	1.940.531.687.224	1.961.254.155.353	(20.722.468.129)	(1,06)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA


ERICK THOHIR

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/badan usaha milik negara. Kementerian BUMN bertransformasi dari unit eselon II di Kementerian Keuangan (1973-1993) menjadi unit eselon I di Kementerian Keuangan (1993-1998) lalu menjadi Kementerian BUMN pada tahun 1998. Kementerian BUMN berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110.

Sejalan dengan pembentukan kabinet pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 dan perubahannya. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Menteri I dijabat oleh Sdr. Pahala Nugraha Mansury;
- b. Wakil Menteri II dijabat oleh Sdr. Kartika Wirjoatmodjo;
- c. Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian dijabat oleh Sdr. Susyanto;
- d. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dijabat oleh Sdr. Rini Widyastuti;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dijabat oleh Sdr. Tedi Bharata;

- f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Sdri. Nawal Nely;
- g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis dijabat oleh Warih Sadono;
- h. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Sdri. Loto Srinaita Ginting;
- i. Staf Ahli Bidang Industri dijabat oleh Sdr. Rabin Indrajad Hattari.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019, Menteri BUMN telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha milik negara, Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 terdiri dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan pembinaan BUMN, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan hingga target kinerja yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, serta pencapaian pembangunan Indonesia, maka tema yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN 2020-2024 ini adalah "Menciptakan Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan makmur."

Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 adalah tahapan yang krusial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena periode ini merupakan fase terakhir yang akan menentukan pencapaian target pembangunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Melalui Renstra Kementerian BUMN

2020-2024, diharapkan BUMN akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bangsa. Diharapkan Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agen Pencipta Nilai maupun Agen Pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Kementerian BUMN telah mengimplementasikan keseluruhan modul dalam aplikasi tersebut yang meliputi Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Melalui SAKTI, maka proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, telah terintegrasi dalam aplikasi tersebut.

Selain mengelola DIPA BA 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Investasi Pemerintah) dan DIPA BA 999.07 (Belanja Subsidi) pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.

3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian BUMN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian BUMN yaitu Pendapatan Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB) dan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp208.245.675.000. Sampai Tahun Anggaran 2022, Kementerian BUMN telah melakukan 13 (tiga belas) kali revisi dari DIPA awal dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja untuk mengakomodasi antara lain adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja, optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja, serta penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Perubahan pagu anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	75.177.609.000	76.167.487.000
Belanja Barang	131.983.066.000	118.572.188.000
Belanja Modal	1.085.000.000	3.686.846.000
Jumlah Belanja	208.245.675.000	198.426.521.000

Sedangkan apabila dilihat dari program kegiatan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	152.980.894.000	151.835.290.000
Program Pembinaan BUMN	55.264.781.000	46.591.231.000
Total Belanja	208.245.675.000	198.426.521.000

Perubahan nilai DIPA tersebut di atas berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1008/MK.02/2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Surat Menteri Keuangan S-458/MK.02/2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dan Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Kementerian BUMN tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.274.496.971 atau mencapai 249,38% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp912.075.000. Rincian Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	912.075.000	1.193.604.057	130,87%
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4.126.653	100,00%
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8.636.260	100,00%
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.930.000	100,00%
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.200.000	100,00%
6	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.056.000.001	100,00%
	Total	912.075.000	2.274.496.971	249,38%

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 secara total mengalami penurunan sebesar 63,07% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya akun yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Akun tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan adanya beberapa *tenant* yang telah melakukan pembayaran secara sekaligus atas sewa ruangan jangka panjang, antara 2 sampai dengan 5 tahun pada periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.193.604.057	4.920.372.188	(3.726.768.131)	(75,74%)
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.126.653	73.995.451	(69.868.798)	(94,42%)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	8.636.260	17.458.399	(8.822.139)	(50,53%)
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	10.930.000	84.431.435	(73.501.435)	(87,05%)
5	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	30.000.000	(30.000.000)	(100,00%)
6	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2.100	(2.100)	(100,00%)
7	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.200.000	2.400.000	(1.200.000)	(50,00%)
8	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.056.000.001	1.030.000.000	26.000.001	2,52%
	Total	2.274.496.971	6.158.659.573	(3.884.162.602)	(63,07%)

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp1.193.604.057 terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruang, Listrik dan Air dari *tenant* yang menyewa gedung dan bangunan Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Tenant	Pembayaran Ruang	Pembayaran Listrik	Pembayaran Air	Total
PT Nitraya Bimasakti	705.396.000	29.951.385	8.634.857	743.982.242
PT BNI (Persero) Tbk	112.668.000	100.020.113	877.993	213.566.106
PT BRI (Persero) Tbk	9.671.748	43.106.391	1.103.516	53.881.655
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	46.859.000	0	0	46.859.000
Koperasi Prabunara	0	29.091.991	2.227.309	31.319.300
PT Telkomsel	0	30.610.216	0	30.610.216
Koperasi Prabunara (GS8)	0	0	28.018.402	28.018.402
PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	21.601.447	0	21.601.447
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0	14.063.427	0	14.063.427
PT BTN (Persero) Tbk	0	5.721.273	0	5.721.273
PT Pos Indonesia	2.415.531	1.565.458	0	3.980.989
Total	877.010.279	275.731.701	40.862.077	1.193.604.057

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp4.126.653 terdiri atas:
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas periode Januari 2022 atas nama PT Permata Graha Nusantara sebesar Rp62.837;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan *security paper* atas nama PT Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp262.216.
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan seragam dinas atas nama PT Dekatama Centra sebesar Rp3.801.600.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp8.636.260 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp10.930.000 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja barang yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri.
5. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp1.200.000 merupakan penyetoran kembali uang muka gaji.
6. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.056.000.001 merupakan penyetoran hasil lelang Barang Milik Negara yang telah dihapuskan.

2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp196.555.127.045 atau 99,06% dari anggaran belanja sebesar Rp198.426.521.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut:

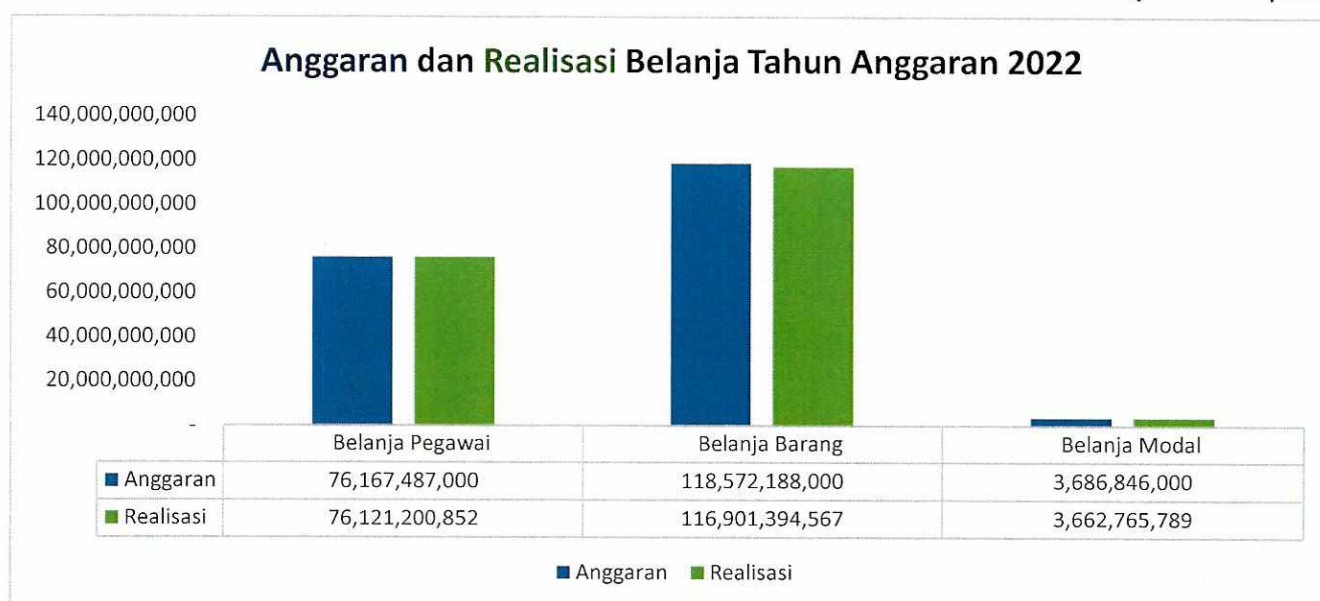
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	76.167.487.000	76.121.200.852	99,94%
2	Belanja Barang	118.572.188.000	116.901.394.567	98,59%
3	Belanja Modal	3.686.846.000	3.662.765.789	99,35%
	Total Belanja Kotor	198.426.521.000	196.685.361.208	99,12%
	Pengembalian Belanja	0	(130.234.163)	100,00%
	Total	198.426.521.000	196.555.127.045	99,06%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

(Dalam Rupiah)



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan Program Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian Program	31 Desember 2022		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	151.835.290.000	150.520.262.961	99,13%
Program Pembinaan BUMN	46.591.231.000	46.034.864.084	98,81%
Total Belanja	198.426.521.000	196.555.127.045	99,06%

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp76.080.175.955 dan Rp57.808.669.747. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 31,61% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan jumlah pegawai dari penerimaan CPNS pada tahun 2022

sejumlah 157 pegawai, pembayaran kenaikan gaji berkala kepada pegawai, serta pembayaran penambahan tunjangan bagi pegawai yang telah menikah dan memiliki anak.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	29.049.391.074	24.678.895.468	4.370.495.606	17,71%
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.709.042.264	1.672.665.832	36.376.432	2,17%
3	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	45.362.767.514	31.485.992.213	13.876.775.301	44,07%
	Jumlah Belanja Kotor	76.121.200.852	57.837.553.513	18.283.647.339	31,61%
	Pengembalian Belanja Pegawai	(41.024.897)	(28.883.766)	(12.141.131)	42,03%
	Total	76.080.175.955	57.808.669.747	18.271.506.208	31,61%

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp116.812.185.301 dan Rp122.437.963.609. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 4,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2021. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya penurunan belanja jasa yang disebabkan oleh turunnya belanja jasa konsultan.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Barang Operasional	16.885.258.308	15.006.174.891	1.879.083.417	12,52%
2	Belanja Barang Non Operasional	13.517.136.575	11.215.887.574	2.301.249.001	20,52%
3	Belanja Barang Persediaan	2.432.655.101	2.187.743.011	244.912.090	11,19%
4	Belanja Jasa	53.793.057.459	69.409.270.169	(15.616.212.710)	(22,50%)
5	Belanja Pemeliharaan	9.740.749.445	9.063.199.324	677.550.121	7,48%
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	18.806.263.486	11.413.875.818	7.392.387.668	64,77%
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	502.119.949	745.431.084	(243.311.135)	(32,64%)
8	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	935.078.787	609.764.520	325.314.267	53,35%
9	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	100,00%
10	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	289.075.457	2.872.436.796	(2.583.361.339)	(89,94%)
11	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	100,00%
	Jumlah Belanja Kotor	116.901.394.567	122.523.783.187	(5.622.388.620)	(4,59%)
	Pengembalian Belanja Barang	(89.209.266)	(85.819.578)	(3.389.688)	3,95%
	Total	116.812.185.301	122.437.963.609	(5.625.778.308)	(4,59%)

Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp1.224.154.244 atau 92,70% dari anggaran sebesar Rp1.320.587.000 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.013.482.000	935.078.787	92,26%
2	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	307.105.000	289.075.457	94,13%
	Jumlah Belanja Kotor	1.320.587.000	1.224.154.244	92,70%
	Pengembalian Belanja	0	0	0,00%
	Total	1.320.587.000	1.224.154.244	92,70%

Realisasi belanja barang penanganan pandemi Covid-19 meliputi biaya uji swab PCR bagi pegawai Kementerian BUMN serta biaya rawat jalan bagi pegawai terkonfirmasi positif.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.662.765.789 dan Rp10.695.848.703. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 65,76% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran belanja modal dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 yang sejalan dengan kebijakan pengendalian belanja Pemerintah. Selain itu, terdapat belanja modal yang bernilai signifikan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu pengadaan notebook bagi pegawai Kementerian BUMN.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.860.207.169	9.765.420.427	(7.905.213.258)	(80,95%)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.802.558.620	864.428.276	938.130.344	108,53%
3	Belanja Modal Lainnya	0	66.000.000	(66.000.000)	(100,00%)
	Jumlah Belanja Kotor	3.662.765.789	10.695.848.703	(7.033.082.914)	(65,76%)
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	100,00%
	Total	3.662.765.789	10.695.848.703	(7.033.082.914)	(65,76%)

Realisasi belanja Kementerian BUMN digunakan untuk melaksanakan tugas koordinasi dan menghasilkan kebijakan terkait dengan pembinaan BUMN sehingga output utama yang dihasilkan oleh Kementerian BUMN berupa rekomendasi kebijakan dalam melakukan pengembangan dan pengawasan kepada BUMN.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN untuk melakukan pengembangan terhadap BUMN yang tercermin dalam output rekomendasi kebijakan dalam peningkatan daya saing BUMN, antara lain pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan, penyehatan keuangan PT Jiwasraya dan PT ASABRI serta restrukturisasi beberapa BUMN, pencapaian output tersebut diharapkan dapat membuat BUMN lebih sehat dan bisa memberikan kontribusi lebih besar.

Kementerian BUMN juga memastikan BUMN bisa menjalankan dukungan terhadap program prioritas nasional sesuai dengan tatakelola yang baik, yang tercermin dalam output rekomendasi kebijakan penugasan BUMN berupa pembangunan jalan tol Sumatera, pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, pelaksanaan hilirisasi tambang (coal to DME), pembuatan vaksin BUMN dan lain-lain. Rincian output strategis sebagaimana dalam Lampiran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Persediaan

No.	Bulan	Mutasi			
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Januari		300.000.000	214.355.778	85.644.222
2	Februari	85.644.222	242.875.278	79.899.550	248.619.950
3	Maret	248.619.950	125.885.745	168.474.862	206.030.833
4	April	206.030.833	491.813.127	571.896.560	125.947.400
5	Mei	125.947.400	290.513.010	343.839.589	72.620.821
6	Juni	72.620.821	552.171.015	417.376.246	207.415.590
7	Juli	207.415.590	629.559.248	591.926.128	245.048.710
8	Agustus	245.048.710	475.677.209	450.096.691	270.629.228
9	September	270.629.228	379.128.705	464.120.548	185.637.385
10	Oktober	185.637.385	362.047.437	352.291.538	195.393.284
11	November	195.393.284	461.001.329	576.887.858	79.506.755
12	Desember	79.506.755	365.713.614	445.220.369	0

Pada bulan Januari 2022, telah dicairkan Uang Persediaan sebesar Rp300.000.000, dan sepanjang tahun 2022 telah dilakukan penggantian Uang Persediaan dengan rincian sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember 2022 telah disetorkan Sisa Uang Persediaan ke kas negara sebesar Rp29.618.

b. Tambahan Uang Persediaan

Pada bulan Desember 2022, telah dicairkan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp4.873.200.000, dan sepanjang tahun 2022 telah dilakukan penggantian Tambahan Uang Persediaan sehingga nilai Tambahan Uang Persediaan pada akhir tahun 2022 sebesar Rp0. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2022 telah disetorkan ke kas negara Sisa Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp1.156.295.578.

2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.629.370.644 dan Rp3.824.293.582 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka			
No	Jenis	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Pembayaran Voucher BBM	113.675.000	5.250.000
2	Pembayaran Biaya <i>License</i> dan <i>Antivirus</i>	2.575.788.844	2.779.700.249
3	Pembayaran Biaya <i>Warranty</i>	403.906.800	88.385.000
4	Pembayaran Beasiswa Pegawai Kementerian BUMN	536.000.000	950.958.333
Total Belanja Barang Dibayar Dimuka		3.629.370.644	3.824.293.582

3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp178.033.935 dan Rp159.266.898. Piutang bukan pajak sebesar Rp178.033.935 terdiri atas:

1. Tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN sebesar Rp29.322.872;
2. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultasi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677;
3. Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provices Indonesia sebesar Rp41.678.902;
4. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai a.n. M.M. dkk. sebesar Rp4.751.728;
5. Kelebihan pembayaran kelebihan Gaji Induk CPNS Mengundurkan Diri a.n. Y.I. sebesar Rp2.555.900;
6. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai a.n. A.K. dkk. sebesar Rp2.895.310; dan
7. Kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan operasional a.n. PT Serasi Autoraya sebesar Rp16.044.546;

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp18.767.037 dibandingkan dengan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021	159.266.898
Penambahan	35.873.297
- Pencatatan Mutasi Piutang PNPB Atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021	5.907.541
- Kelebihan pembayaran uang makan bulan Maret untuk 32 pegawai a.n. A.K. dkk	8.470.000
- Kelebihan pembayaran Gaji Induk CPNS yang mengundurkan diri a.n. Y.I.	2.555.900
- Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas pengenaan Hukuman Disiplin untuk 4 pegawai	2.895.310
- Kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan operasional a.n. PT Serasi Autoraya	16.044.546
Pengurangan	17.106.260
- Pelunasan kelebihan Gaji a.n. T.N. dkk/3 Orang	1.060.000
- Pelunasan kelebihan Gaji Induk a.n. B.D.P.	5.416.400
- Pelunasan tunjangan kinerja atas pengenaan Hukuman Disiplin a.n. M.H.	2.159.860
- Pelunasan kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Maret untuk 32 pegawai a.n. AM dkk	8.470.000
Jumlah Penambahan	18.767.037
Mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022	18.767.037
Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022	178.033.935

Termasuk dalam nilai Piutang Bukan Pajak tersebut di atas adalah piutang atas tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN. Besaran sewa ruangan ditetapkan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan. Apabila sewa terjadi sebelum adanya penetapan dari Pengelola Barang, maka Kuasa Pengguna Barang Kementerian BUMN dapat menetapkan nilai besaran sewa berdasarkan hasil revidi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat. Selanjutnya terhadap besaran sewa yang ditetapkan di atas melebihi dari nilai penetapan dari Pengelola Barang, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian sewa dalam hal sudah dilakukan pembayaran atau penyeteroran ke kas negara.

Dengan adanya addendum kontrak sewa ruangan, *tenant* wajib membayar denda atas keterlambatan pembayaran beban listrik dan air. Oleh karena itu, piutang sewa ruangan ditambah dengan piutang atas listrik dan air per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang 31 Desember 2022			
		Ruangan	Listrik	Air	Total
1	PT BNI (Persero) Tbk	0	8.883.859	89.773	8.973.632
2	Koperasi Prabunara	0	3.091.445	3.128.329	6.219.774
3	PT Nitraya Bimasakti	0	3.145.249	937.146	4.082.395
4	PT BRI (Persero) Tbk	0	3.611.501	82.948	3.694.449
5	PT Telekomunikasi Seluler	0	2.799.126	0	2.799.126
6	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	1.801.474	0	1.801.474
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0	1.233.951	0	1.233.951
8	PT BTN (Persero) Tbk	0	518.071	0	518.071
	Jumlah	0	25.084.676	4.238.196	29.322.872

Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa housekeeping pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia sebesar Rp41.678.902 merupakan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 041 Kementerian BUMN Tahun 2018. Atas temuan tersebut, telah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Kementerian BUMN dan PT Provinces Indonesia, dengan melibatkan *Account Representatif* (AR) KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dan AR KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang pada intinya disepakati bahwa PT Provinces Indonesia akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018 sebagai syarat administrasi pengembalian kelebihan pembayaran PPN. Selanjutnya, PT Provinces Indonesia telah berupaya untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018, namun terkendala adanya perubahan NPWP Bendahara Pengeluaran Kementerian BUMN yang merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Atas hal tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan AR KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, dan melalui Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Nomor S-482/KPP.0601/2022 tanggal 12 Juli 2022 menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Kementerian BUMN agar mengajukan Permohonan Aktivasi NPWP Sementara, dan Bendahara Pengeluaran telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat nomor S-15/BP.MBU/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan faktur oleh PT Provinces;
- b. PT Provinces Indonesia disarankan membuat Faktur Pajak Tahun 2021 dengan menggunakan NPWP Kementerian BUMN yang baru, namun hal ini berdampak pada dikenakannya denda keterlambatan atas kewajiban pelaporan pajak;
- c. Atas pengenaan denda tersebut PT Provinces disarankan untuk berkonsultasi ke KPP dimana PT Provinces Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak.

Di sisi lain, PT Provinces Indonesia telah memenuhi kewajiban dengan mengembalikan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar Rp65.808.792, sedangkan unsur pengembalian kelebihan PPN sebesar Rp 41.678.902 secara teknis cukup sulit untuk ditindaklanjuti oleh PT Provinces Indonesia dan menimbulkan beban denda yang menjadi tanggungan PT Provinces Indonesia dari ketentuan pelaporan pajak yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian BUMN telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-265/MBU/S/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang pada intinya agar status rekomendasi atas temuan tersebut menjadi Selesai dan Sebagian Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD).

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(81.270.923) dan Rp(81.177.088) yang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

(Dalam Rupiah)

No	Debitur	Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
1	PT Provinces Indonesia	41.678.902	0,50%	208.395	Lancar
2	Sewa Mobil Voxy	16.044.546	0,50%	80.223	Lancar
3	Pegawai Kementerian BUMN	10.202.938	0,50%	51.015	Lancar
4	PT BNI (Persero) Tbk	8.973.632	0,50%	44.868	Lancar
5	Koperasi Prabunara	6.219.774	0,50%	31.099	Lancar
6	PT Nitraya Bimasakti	4.082.395	0,50%	20.412	Lancar
7	PT BRI (Persero) Tbk	3.694.449	0,50%	18.472	Lancar
8	PT Telekomunikasi Seluler	2.799.126	0,50%	13.996	Lancar
9	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	1.801.474	0,50%	9.007	Lancar
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.233.951	0,50%	6.170	Lancar
11	PT BTN (Persero) Tbk	518.071	0,50%	2.589	Lancar
12	PT Artefak Arkindo	80.784.677	100,00%	80.784.677	Macet
Jumlah		178.033.935		81.270.923	

Terhadap debitur PT Artefak Arkindo, telah disampaikan surat penagihan piutang yang ketiga sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-18/S.MBU.C/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi macet. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan pengalihan pengelolaan piutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I melalui Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-93/S.MBU.C/09/2021 tanggal 2 September 2021 Hal Penyerahan Pengelolaan Piutang PT Artefak Arkindo.

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian BUMN per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.500.000 dan Rp3.500.000. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan ganti rugi kedalam aset lancar disebabkan adanya tuntutan ganti rugi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun berikutnya. Bagian lancar tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi yang akan jatuh tempo satu tahun berikutnya atas kehilangan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ a.n. DNZ yang sudah ditetapkan nilai penggantian sebesar Rp70.000.000 dengan cicilan sebesar Rp291.667 per bulan selama 20 tahun dengan pembayaran cicilan pertama ditetapkan pada bulan November 2011.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(17.500) dan Rp(17.500) yang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
DNZ	3.500.000	0,50%	17.500	Lancar

7. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan digunakan untuk dikonsumsi/diserahkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.464.085.851 dan Rp1.058.158.602. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	1.378.214.899	1.005.148.606
2	Bahan untuk Pemeliharaan	58.228.440	21.357.600
3	Suku Cadang	12.803.937	16.214.182
4	Persediaan Lainnya	14.838.575	15.438.214
Jumlah		1.464.085.851	1.058.158.602

Pada tahun 2022, terdapat persediaan yang dicatat sebagai persediaan usang sebesar Rp38.588.060 yang terdiri atas:

- 423 buah SSP sebesar Rp6.630.525;
- 23 buah Pita Mesin Tik Nakajim sebesar Rp403.535;
- 2.400 lembar Verbal sebesar Rp1.284.000;
- 14 Toner Laserjet 7551 A sebesar Rp30.240.000.

8. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13. Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 1, Tanah Kementerian BUMN seluruhnya seluas 17.776 M². Pada tanggal 11 Agustus 2015, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 116/Gambir/2015 yang diterbitkan oleh berdasarkan Surat Ukur Nomor 00013/Gambir/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.468.058.953.000 dan Rp1.468.058.953.000. Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset Tanah sampai dengan 31 Desember 2022.

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp1.468.058.953.000 termasuk Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara (eks. PT Varuna Tirta Prakasya) yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian BUMN berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara

Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Penetapan status penggunaan tersebut ditindaklanjuti dengan serah terima antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam BAST Nomor B-631.A/K.4/KPA.5/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, nilai Tanah atas Barang Rampasan Negara tersebut sebesar Rp19.869.146.000.

Sesuai hasil klarifikasi dan verifikasi data Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian BUMN oleh Direktorat Barang Milik Negara pada tanggal 21 Oktober 2020 maka sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor BA-VER-0411X/2020 terdapat jumlah tanah sebanyak 5 (lima) bidang yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah bersertipikat hak pakai dan 4 (empat) bidang tanah bersertipikat hak guna bangunan tersebut telah atas nama PT Varuna Tirta Prakasya dan telah berakhir hak guna bangunannya pada tanggal 2 Maret 2012. Informasi yang diterima bahwa perpanjangan hak guna bangunan tersebut akan dilakukan oleh PT Varuna Tirta Prakasya setelah aset tersebut ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Pada tanggal 14 Januari 2021 PT Varuna Tirta Prakasya telah mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara *Non-Cash* kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: A.044/PL.303/A.I atas Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, permohonan tersebut diusulkan sebagai Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-132/MBU/02/2021 tanggal 24 Februari 2021. Menteri Keuangan telah menyetujui permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kementerian BUMN dengan Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-158/MK.6/2022 tanggal 22 April 2022.

Menteri Keuangan telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya melalui Surat Nomor S-1114/MK.06/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan, Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam proses penetapannya, dan sejak bulan November 2022 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui mekanisme pemanfaatan sewa BMN telah menggunakan sebagian dari ruangan Gedung untuk kegiatan kantor pusat.

9. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp136.884.866.357 dan Rp137.776.726.404 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	17.840.098.171	17.840.098.171	0	0,00
2	Alat Angkutan	7.913.183.700	7.913.183.700	0	0,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.911.762.837	2.911.762.837	0	0,00
4	Alat Pengolahan	11.644.050	11.644.050	0	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.481.296.041	47.399.306.991	81.989.050	0,17
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.456.309.439	5.111.129.349	345.180.090	6,75
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	177.693.802	177.693.802	0	0,00
8	Alat Laboratorium	6.096.297.902	6.089.616.502	6.681.400	0,11
9	Alat Persenjataian	29.920.000	29.920.000	0	0,00
10	Komputer	48.555.401.986	49.878.952.723	(1.323.550.737)	(2,65)
11	Alat Keselamatan Kerja	199.796.453	199.796.453	0	0,00
12	Peralatan Proses/Produksi	0	2.159.850	(2.159.850)	(100,00)
13	Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat	75.042.000	75.042.000	0	0,00
14	Peralatan Olahraga	136.419.976	136.419.976	0	0,00
Nilai Peralatan dan Mesin		136.884.866.357	137.776.726.404	(891.860.047)	(0,65)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(96.518.467.983)	(83.715.709.822)	(12.802.758.161)	15,29
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		40.366.398.374	54.061.016.582	(13.694.618.208)	(25,33)

Rincian kenaikan/penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2021	137.776.726.404
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.288.223.169
- Transfer Masuk Aset Berupa Parkiran Sepeda Pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan BAST-3/KPB.MBU/06/2022 dan PL.108/015/DSTJ/VI/2022	2.000.000
- Reklasifikasi dari Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa 3 (Tiga) Paket <i>Access Gate</i>	849.032.000
- Reklasifikasi dari Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Jasa Instalasi Pemasangan <i>Access Gate</i>	137.464.620
Jumlah Mutasi Tambah	3.276.719.789
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Penghentian Aset Tetap berdasarkan BA-01/PHS/2022	4.168.579.836
Jumlah Mutasi Kurang	4.168.579.836
Jumlah Mutasi	(891.860.047)
Saldo Akhir 31/12/2022	136.884.866.357
Akumulasi Penyusutan	(96.518.467.983)
Nilai Buku per 31/12/2022	40.366.398.374

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp469.161.643.003 dan Rp468.773.597.003. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan di Kementerian BUMN diakibatkan oleh adanya penambahan yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan.

Adapun rincian kenaikan/ penurunan tersebut disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2021		468.773.597.003
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022	1.374.542.620	
Jumlah Mutasi Tambah		1.374.542.620
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa 3 (Tiga) Paket Access Gate	849.032.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Jasa	137.464.620	
- Instalasi Pemasangan Access Gate		
Jumlah Mutasi Kurang		986.496.620
Jumlah Mutasi		388.046.000
Saldo Akhir 31/12/2022		469.161.643.003
Akumulasi Penyusutan		(44.793.609.388)
Nilai Buku per 31/12/2022		424.368.033.615

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 disajikan di Lampiran Laporan Keuangan ini.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berupa instalasi gardu listrik, jaringan air minum, dan jaringan telepon. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.706.388.680 dan Rp7.706.388.680. Tidak terdapat penambahan/pengurangan pada pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.066.410.162 dan Rp1.066.410.162. Tidak terdapat penambahan/pengurangan pada pos Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp576.910.162. Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp489.500.000.

13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(143.070.024.135) dan Rp(121.163.191.508). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	136.884.866.357	96.518.467.983	40.366.398.374
2	Gedung dan Bangunan	469.161.643.003	44.793.609.388	424.368.033.615
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	1.757.946.764	5.948.441.916
4	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	0	1.066.410.162
	Jumlah	614.819.308.202	143.070.024.135	471.749.284.067

14. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi kepada Sdr. DNZ atas kehilangan BMN berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kerugian Negara Nomor BA-01/TIM TGR/KBUMN/2011 tanggal 24 November 2011 menetapkan bahwa besarnya penggantian kerugian negara atas kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas sebesar Rp70.000.000 dengan cara diangsur Rp291.667. per bulan selama 20 tahun terhitung mulai bulan November 2011.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tersebut di atas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp28.240.748 dan Rp28.240.748. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga diungkapkan bahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5 ‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar. sehingga perhitungan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah sebagai berikut:

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto):

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	28.240.748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
5‰ x 28.240.748	(141.204)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	28.099.544

15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(141.204) dan Rp(141.204) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebagai berikut:

Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1	28.240.748	0,50%	141.204

16. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.189.997.921 dan Rp19.389.526.163. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 terdiri atas Lisensi sebesar Rp2.850.515.278 dan *Software* sebesar Rp13.339.482.643. Rincian atas Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Lisensi

Lisensi sebesar Rp2.850.515.278 terdiri atas:

1. Lisensi VMware senilai Rp2.815.169.280 adalah suatu perangkat lunak *virtual machine* untuk menciptakan dan menyimulasikan server secara virtual. VMware berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi lainnya.
2. Lisensi SSL DigiCert senilai Rp35.345.998 merupakan lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di *website* melalui internet dengan teknologi enkripsi data yang canggih. SSL yang digunakan di Kementerian BUMN adalah SSL DigiCert yang telah dilakukan perpanjangan selama 3 tahun pada tahun 2020. Pembelian SSL DigiCert sifatnya pembaruan dalam jangka waktu tertentu.

b. Software

Software sebesar Rp13.339.482.643 terdiri atas:

1. Sistem Informasi Manajemen ASN (simanis) <http://simanis.bumn.go.id> yang sebelumnya bernama *office automation* (OA) senilai Rp3.836.737.987 dibangun pada tahun 2008 dengan keseluruhan proses bisnis di Kementerian telah diakomodir dalam OA. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Sampai dengan tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh internal bidang Teknologi Informasi (TI). Kondisi OA saat ini masih digunakan dalam proses bisnis internal di Kementerian BUMN seperti modul Pengelolaan Kepegawaian (SDM), Cuti, Izin, Absensi, Tunjangan Kinerja Perjalanan Dinas, *Monitoring* Tagihan dan SPBy, Layanan Survei Internal, Pelaporan Pajak, Manajemen Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.
2. Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <http://pkbl.bumn.go.id> senilai Rp1.411.974.599 dibangun pada tahun 2008, dan saat ini telah digunakan oleh Kementerian BUMN untuk pengumpulan data penyerapan dana PKBL dari BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan

dashboard eksekutif. Pada tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh Internal Bidang TI dengan menyesuaikan data dan peraturan yang berlaku saat ini.

3. Portal SDM Online (<http://sdm.bumn.go.id>) dibangun pada tahun 2008 senilai Rp1.427.335.424, dan telah digunakan oleh Kementerian BUMN sebagai informasi masa jabatan Direksi dan Komisaris serta *talent pool* kandidat Direksi dan Komisaris BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif.
4. Portal SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) (<http://silaba.bumn.go.id>) senilai Rp2.065.030.155 dibangun pada tahun 2008 dengan nama *Executive Information System* (EIS) yang kemudian diubah menjadi Portal *Financial Information System* (FIS) pada tahun 2011 dan terakhir diubah menjadi SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) pada tahun 2018. Portal tersebut digunakan oleh BUMN melaporkan laporan Keuangan/manajemen secara berkala kepada Kementerian BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. SiLaba berdasarkan fungsinya sebagai media pelaporan keuangan seluruh BUMN terdiri dari Laporan *Audited*, RKAP, Triwulanan, Tahunan/Manajemen dan Rencana Jangka Panjang.
5. Windows Server 2012 R2 Data Center Edition dan User Cal senilai Rp518.110.612 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
6. Exchange Server 2013 Standard dan Enterprise senilai Rp142.047.560 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
7. Exchange Standard CAL 2013 OLP NL USERCAL dan woSrvcs senilai 229.117.200 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
8. WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 olp nl Gov UsrCAL senilai Rp124.995.000 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
9. Antivirus Endpoint Protection senilai Rp26.048.611 adalah *software* yang memiliki fungsi perlindungan dan keamanan pada server dari serangan dan permasalahan virus.
10. Software Office 2019 senilai Rp114.360.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas di lingkup Kementerian BUMN.
11. Migrasi IP Telephony senilai Rp728.238.435 adalah *upgrade* sistem IP Telephony dari versi yang sudah menggunakan versi terbaru, layanan IP Telephony untuk menunjang sistem telepon sentral di Kementerian BUMN.

12. Microsoft SharePoint senilai Rp198.037.000 merupakan pembaruan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NDE) dengan *platform* SharePoint yang memerlukan penambahan perangkat lunak dalam mendukung implementasi tersebut. Perangkat lunak pendukung aplikasi NDE terdiri dari Microsoft SharePoint Server dan CAL yang merupakan *Software* untuk tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun.
13. Aplikasi Pendukung Infrastruktur IT senilai Rp1.546.589.000 merupakan aplikasi untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun secara aman dan sistem manajemen basis data relasional dengan menggunakan bahasa *query*.
14. Software Office senilai Rp744.150.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai di lingkup Kementerian BUMN dalam menyelesaikan tugas.
15. Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal) senilai Rp99.000.000 merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan November 2019 dan digunakan untuk pengelolaan program (tahunan) pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
16. Aplikasi Simaris (Sistem Informasi Manajemen Risiko) senilai Rp99.000.000 merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan Desember 2019 dan digunakan untuk pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
17. Navicat PostgreSQL, Nitro PDF 12, Sectigo SSL DV Certificate, Sketch senilai Rp28.711.060 merupakan aplikasi pendukung pengembangan TI di Kementerian BUMN yang diadakan pada tahun 2019.

Pada tahun 2022, terdapat Aset Tak Berwujud yang dihentikan penggunaannya dikarenakan sudah tidak termanfaatkan sebesar Rp3.199.528.242 dengan rincian sebagai berikut:

1. Lisensi Anti Spam senilai Rp70.180.000 merupakan perangkat Email Security Gateway sebagai sarana infrastruktur di Kementerian BUMN, sebagai proteksi fasilitas email Kementerian BUMN dari permasalahan spam. Lisensi tersebut dimanfaatkan sampai dengan tahun 2017 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 2022.
2. Aplikasi Penunjang Pilot Sistem BI senilai Rp276.092.300 adalah aplikasi penunjang *Business Intelligence* (BI) untuk memberikan manfaat kepada pimpinan Kementerian BUMN untuk membantu pekerjaannya. Lisensi Aplikasi ini saat ini masih digunakan untuk sistem virtualisasi HyperV. Aplikasi tersebut dimanfaatkan sampai dengan tahun 2020 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 2022.
3. Dashboard BUMN senilai Rp2.251.541.015 yang dibangun tahun 2015 merupakan aplikasi untuk menampilkan *dashboard monitoring* atas informasi strategis BUMN, berupa kantor pusat dan anak perusahaan BUMN, Direksi & Komisaris BUMN, proyek strategis BUMN, serta data finansial BUMN. Aplikasi tersebut dimanfaatkan sampai dengan tahun 2021 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 2022.

4. Paket Sistem Backup senilai Rp253.234.707 untuk sistem backup penyimpanan data server dari clustering server ke tape drive. Aplikasi tersebut dimanfaatkan sampai dengan tahun 2020 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 2022.
5. Cisco 5508 Series senilai Rp320.386.220 merupakan perangkat WLAN Controller yang berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan sinyal wifi dan mengatur access point sesuai coverage areanya. Software tersebut dimanfaatkan sampai dengan tahun 2022 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 2022.
6. Datacom Call Partner senilai Rp28.094.000 merupakan sistem *billing* yang terpasang pada *server* untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dari penggunaan IP Phone di Kementerian BUMN. Atas aset tersebut, telah dilakukan perubahan kondisi sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi Nomor BA-04/PHS/2022 tanggal 31 Desember 2022. *Software* tersebut dimanfaatkan sampai dengan tahun 2021 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 2022

17. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp Rp3.199.528.242 dan Rp3.892.012.485. Rincian Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

No	Aset	Dasar	Nilai 31 Desember 2021	Penghentian Penggunaan	Pengusulan Penghapusan	Nilai 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Aset Tak Berwujud	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-89/MBU/S/11/2022	3.892.012.485	0	3.892.012.485	0
2	Peralatan & Mesin	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-89/MBU/S/11/2022	0	4.168.579.836	4.168.579.836	0
3	Aset Tak Berwujud	Koreksi Tim Pemeriksa BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022	0	3.199.528.242	0	3.199.528.242

18. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(18.310.510.538) dan Rp(19.848.854.395). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Aset 31 Desember 2022	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2022	Nilai Buku 31 Desember 2022
1	2	3	4	5
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	13.339.482.643	13.296.848.764	42.633.879
2	Lisensi	2.850.515.278	1.838.696.532	1.011.818.746
	Jumlah	16.189.997.921	15.135.545.296	1.054.452.625
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.199.528.242	3.174.965.242	24.563.000
	Jumlah	3.199.528.242	3.174.965.242	24.563.000
	Total	19.389.526.163	18.310.510.538	1.079.015.625

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2022	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)
1	2	3	4	5
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	13.296.848.764	12.083.050.843	1.213.797.921
2	Lisensi	1.838.696.532	3.964.581.364	(2.125.884.832)
	Jumlah	15.135.545.296	16.047.632.207	(912.086.911)
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	48.092.495	(48.092.495)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.174.965.242	3.753.129.693	(578.164.451)
	Jumlah	3.174.965.242	3.801.222.188	(626.256.946)
	Total	18.310.510.538	19.848.854.395	(1.538.343.857)

19. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp378.408.493 dan Rp78.578.543. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp378.408.493 terdiri atas:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp357.032.907 merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Belanja Pegawai yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022;
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp21.375.586 merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Belanja Barang yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022;

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp296.061.177 dibandingkan Per 31 Desember 2021 karena terdapat mutasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Utang Per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Utang Per 31 Desember 2022	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	Kekurangan Pembayaran Gaji atas Kenaikan Pangkat tahun 2021 untuk 10 pegawai	6.515.579	0	6.515.579	0	Telah dilakukan pembayaran melalui SP2D No. 220191301024598
2	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2021	61.663.212	0	61.663.212	0	Telah dilakukan pembayaran melalui SP2D No. 220191303000478
3	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan Tahun 2021	7.560.000	15.120.000	0	22.680.000	Terdapat perubahan kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan
4	Tunggakan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021	2.839.752	0	2.839.752	-	Tagihan Air Minum Dalam Kemasan
5	Kekurangan Tunjangan Jabatan a.n. Luizah dkk/2 pegawai	0	20.160.000	0	20.160.000	Periode Juli - Desember 2021
6	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk 4 pegawai a.n. Syahrudin dkk	0	13.232.171	0	13.232.171	Periode Januari s.d. Juni 2022
7	Kekurangan Gaji atas Pengangkatan Jabatan Struktural a.n. Mukhammad Syaiful Anam	0	1.260.050	0	1.260.050	Periode April 2022
8	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Gaji Berkala bulan April tahun 2022 a.n. Nurul Fadillah dkk/11 pegawai	0	9.378.188	0	9.378.188	
9	Kekurangan Tunjangan Jabatan Fungsional a.n. Anna Muslikhah Jamil dkk/11 pegawai	0	258.730.410	0	258.730.410	
10	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Gaji Berkala tahun 2022 a.n. Sugianto dkk/11 pegawai	0	18.111.264	0	18.111.264	
11	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Pangkat bulan Oktober 2022 a.n. Royza Fauzy/17 pegawai	0	8.412.051	0	8.412.051	
12	Kekurangan Tunjangan Fungsional a.n. Agus Waluyo dkk/2 pegawai	0	1.300.000	0	1.300.000	
13	Tunggakan Belanja Barang Tahun Anggaran 2020	0	21.375.586	0	21.375.586	Tagihan beban listrik dan air dengan PT PGN Mas
14	Kekurangan Tunjangan Kinerja November 2022 a.n. Atika Desy Aryani	0	3.768.773	0	3.768.773	
		78.578.543	370.848.493	71.018.543	378.408.493	

20. Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan merupakan kewajiban atas penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga yang belum mendapatkan persetujuan MPH-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga) dari KPPN.

Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.311.700.000. Penurunan nilai hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 disebabkan telah dikeluarkannya Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPH-BJS) Nomor 02378T tanggal 9 Desember 2022 atas hibah berupa 1 (Satu) unit kendaraan *Outlander PHEV* berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 041/MMKSI-BA/2021.

21. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban atas Penerimaan pembayaran sewa ruangan Kantor Kementerian BUMN yang telah dibayarkan oleh *tenant* untuk periode sewa yang akan datang. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.198.958.526 dan Rp7.999.258.136. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.198.958.525 terdiri atas:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Pembayaran Yang Dilakukan	Pendapatan Yang Menjadi Hak	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022
1	PT BRI (Persero), Tbk	5.653.110.000	3.674.521.500	1.978.588.500
2	PT BNI (Persero), Tbk	3.830.856.000	2.341.078.667	1.489.777.333
3	PT Nitraya Bimasakti	529.047.000	0	529.047.000
4	Koperasi Prabunara (48)	2.291.824.500	1.871.656.675	420.167.825
5	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	268.045.000	160.827.000	107.218.000
6	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	411.430.500	315.430.050	96.000.450
7	PT Telekomunikasi Seluler	266.100.000	172.965.000	93.135.000
8	Koperasi Prabunara (Sport Center)	196.125.000	114.406.250	81.718.750
9	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	257.695.000	178.954.861	78.740.139
10	Koperasi Prabunara (48) Extnd.	548.055.000	471.936.250	76.118.750
11	PT BRI (Persero), Tbk (ATM)	75.288.000	15.057.600	60.230.400
12	PT Danareksa	156.855.000	99.341.500	57.513.500
13	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	140.846.000	91.549.900	49.296.100
14	PT BNI (Persero), Tbk	56.653.000	12.589.556	44.063.444
15	PT BTN (ATM)	56.015.000	18.671.666	37.343.334
	Jumlah	14.737.945.000	9.538.986.475	5.198.958.526

22. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.940.531.687.224 dan Rp1.961.254.155.353. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.005.137.861 dan Rp4.029.767.545. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penyewaan ruangan Gedung Kantor Kementerian BUMN oleh para *tenant*, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan Pendapatan Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenalkan/ (Penurunan)	% Naik/(Turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	30.000.000	(30.000.000)	(100,00)
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.999.811.208	3.950.248.334	49.562.874	1,25
3	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2.100	(2.100)	(100,00)
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.126.653	47.117.111	(42.990.458)	(91,24)
5	Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji	1.200.000	2.400.000	(1.200.000)	(50,00)
	Total	4.005.137.861	4.029.767.545	(24.629.684)	(0,61)

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.999.811.208 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa listrik dan air oleh	1.193.604.057
- Penyesuaian:	
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Awal)	7.999.258.136
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Akhir)	(5.198.958.525)
- Mutasi Piutang Bukan Pajak dari Tagihan Sewa Ruangan	5.907.540
	<u>3.999.811.208</u>

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp4.126.653 terdiri atas:

- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas periode Januari 2022 atas nama PT Permata Graha Nusantara sebesar Rp62.837;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan security paper atas nama Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp262.216;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan seragam dinas atas nama PT Dekatama Centra sebesar Rp3.801.600.

3. Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp1.200.000 merupakan potongan pada SPM Gaji Induk

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp76.356.018.861 dan Rp57.803.877.109. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun Antar Tahun
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	29.049.391.074	24.678.895.468	4.370.495.606	17,71
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.709.042.264	1.672.665.832	36.376.432	2,17
3	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	45.362.767.514	31.485.992.213	13.876.775.301	44,07
	Jumlah Belanja Kotor	76.121.200.852	57.837.553.513	18.283.647.339	31,61
	Pengembalian Belanja Pegawai	(41.024.897)	(28.883.766)	(12.141.131)	42,03
	Jumlah	76.080.175.955	57.808.669.747	18.271.506.208	31,61
1	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	0	(85.627.733)	85.627.733	100,00
2	Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	0	(13.387.988)	13.387.988	100,00
3	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	0	(32.240.784)	32.240.784	100,00
4	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	0	107.979.575	(107.979.575)	(100,00)
5	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran tunjangan jabatan Wakil Menteri tahun 2021	0	15.176.992	(15.176.992)	(100,00)
6	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran gaji susulan Deputy tahun 2021	0	3.307.300	(3.307.300)	(100,00)
7	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	(68.178.791)	0	(68.178.791)	(100,00)
8	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	(5.451.210)	0	(5.451.210)	(100,00)
9	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2022	345.704.134	0	345.704.134	100,00
10	Koreksi Audited BPK Koreksi Pembayaran Tunjangan Kinerja 2022 di Tahun 2023	3.768.773	0	3.768.773	100,00
	Total	76.356.018.861	57.803.877.109	18.552.141.752	32,09

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.872.592.661 dan Rp2.053.627.628. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.784.611,108	2.025.799,801	(241.188.693)	(11,91)
2	Beban Persediaan Lainnya	87.981,553	27.827,827	60.153.726	216,16
	Total	1.872.592,661	2.053.627,628	(181.034,967)	(8,82)

4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp85.668.063.712 dan Rp95.416.246.129. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Beban Barang Operasional	17.710.084.668	14.497.742.078	3.212.342.590	22,16
2	Beban Barang Non Operasional	13.932.094.908	9.826.409.138	4.105.685.770	41,78
3	Beban Jasa	54.025.884.136	71.008.775.534	(16.982.891.398)	(23,92)
4	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	83.319.379	(83.319.379)	(100,00)
	Beban Jasa	85.668.063.712	95.416.246.129	(9.748.182.417)	(10,22)

1) Beban Barang Operasional

Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.710.084.668 dan Rp14.497.742.078. Rincian Beban Barang Operasional pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Barang Operasional	17.809.567.563	15.615.939.411	2.193.628.152	14,05
	Jumlah	17.809.567.563	15.615.939.411	2.193.628.152	14,05
1	Penyesuaian atas Biaya License Tahunan yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	756.471.105	(776.601.025)	1.533.072.130	(197,41)
2	Pelunasan Tunggakan Belanja Barang Operasional Tahun 2020	0	(239.804.300)	239.804.300	(100,00)
3	Pelunasan Tunggakan Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid Tahun 2020	0	(75.611.666)	75.611.666	(100,00)
4	Pelunasan Pembayaran Gaji Pegawai Tahun 2021 a.n. C.B.T.	0	(3.307.300)	3.307.300	(100,00)
5	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran tunjangan jabatan Wakil Menteri tahun 2021	0	(15.176.992)	15.176.992	(100,00)
6	Pengembalian Beban Jasa Operasional	0	(4.388.750)	4.388.750	(100,00)
7	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran gaji susulan Deputi tahun 2021	0	(3.307.300)	3.307.300	(100,00)
8	Penyesuaian atas transaksi gantung berupa aset tetap ekstrakomtabel	11.655.000	0	11.655.000	100,00
9	Koreksi Audited BPK Koreksi Pencatatan Lisensi Tahun 2023	(855.954.000)	0	(855.954.000)	(100,00)
10	Koreksi Audited BPK Koreksi Transaksi Gantung	(11.655.000)	0	(11.655.000)	(100,00)
	Total	17.710.084.668	14.497.742.078	3.212.342.590	22,16

2) Beban Barang Non Operasional

Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.932.094.908 dan Rp9.826.409.138. Rincian Beban Barang Non Operasional pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Barang Non Operasional	13.517.136.575	11.215.887.574	2.301.249.001	20,52
1	Pelunasan Tunggakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tahun 2020	0	(180.125.000)	180.125.000	100,00
2	Pelunasan Tunggakan Belanja Bahan Tahun 2020	0	(258.395.103)	258.395.103	100,00
3	Penyesuaian atas Pembayaran Biaya Beasiswa Pegawai Kementerian BUMN yang Dibayar Dimuka	0	(163.500.000)	163.500.000	100,00
4	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berupa Biaya Pendidikan S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN Intake Tahun 2021	0	35.916.667	(35.916.667)	(100,00)
5	Pelunasan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berupa Biaya Pendidikan S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN Intake Tahun 2021	0	(35.916.667)	35.916.667	100,00
6	Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka Biaya Pendidikan S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN	414.958.333	(332.458.333)	747.416.666	224,82
7	Koreksi Audited BPK Koreksi kurang catat prepaid biaya pendidikan penerima beasiswa tahun akademik 2021 sd 2022	0	(455.000.000)	455.000.000	100,00
	Jumlah	13.932.094.908	9.826.409.138	4.105.685.770	41,78

3) Beban Jasa

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp54.025.884.136 dan Rp71.008.775.534. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Jasa	54,020,553,096	72,281,706,965	(18,261,153,869)	(25,26)
1	Pelunasan Tunggakan Beban Langganan Listrik Tahun 2020	0	(27,936,414)	(27,936,414)	(100,00)
2	Pelunasan Tunggakan Beban Langganan Air Tahun 2020	0	(9,288,920)	(9,288,920)	(100,00)
3	Pelunasan Tunggakan Beban Jasa Konsultan Tahun 2020	0	(100,025,000)	(100,025,000)	(100,00)
4	Pelunasan Tunggakan Beban Beban Sewa Tahun 2020	0	(226,764,957)	(226,764,957)	(100,00)
5	Pelunasan Tunggakan Beban Jasa Lainnya Tahun 2020	0	(48,343,000)	(48,343,000)	(100,00)
6	Pelunasan Tunggakan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020	0	(798,862,000)	(798,862,000)	(100,00)
7	Koreksi Audited BPK Koreksi pemakaian langganan air tahun 2019 yang dibayar pada 2021	0	(61,711,140)	(61,711,140)	(100,00)
8	Tunggakan Beban Langganan Listrik Tahun 2020	20,718,975	0	20,718,975	100,00
9	Tunggakan Beban Langganan Air Tahun 2020	656,611	0	656,611	100,00
10	Pengembalian atas sewa mobil Voxy	(16,044,546)	0	16,044,546	100,00
	Jumlah	54,025,884,136	71,008,775,534	(16,982,891,398)	(23,92)

4) Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp83.319.379. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Penyesuaian Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	83.319.379	(83.319.379)	(100,00)
	Jumlah	0	83.319.379	(83.319.379)	(100,00)

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.746.142.434 dan Rp9.248.897.218. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Pemeliharaan	9.740.749.445	9.063.199.324	677.550.121	7,48
1	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	59.033.160	222.543.200	(163.510.040)	(73,47)
2	Koreksi pencatatan voucher BBM	(108.425.000)	8.800.000	(117.225.000)	(1332,10)
3	Pelunasan Tunggakan Beban Pemeliharaan Lainnya Tahun 2020	0	(8.221.866)	8.221.866	(100,00)
4	Pelunasan Tunggakan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020	0	(5.478.000)	5.478.000	(100,00)
6	Pelunasan Tunggakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020	0	(51.205.000)	51.205.000	(100,00)
7	Beban Persediaan Suku Cadang	66.912.329	19.259.560	47.652.769	247,42
8	Koreksi Audited BPK Koreksi Pencatatan Lisensi	(12.127.500)	0	(12.127.500)	(100,00)
	Jumlah	9.746.142.434	9.248.897.218	497.245.216	5,38

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.291.523.521 dan Rp11.970.296.074. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.789.403.572	11.413.875.818	7.375.527.754	64,62
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	502.119.949	745.431.084	(243.311.135)	(32,64)
		19.291.523.521	12.159.306.902	7.132.216.619	58,66
1	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	0	(81.430.828)	81.430.828	(100,00)
2	Pelunasan Tunggakan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2020	0	(107.580.000)	107.580.000	(100,00)
	Jumlah	19.291.523.521	11.970.296.074	7.321.227.447	61,16

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.348.821.115 dan Rp28.597.849.849. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2022	31 Desember 2021		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.969.180.399	17.847.720.076	(878.539.677)	(4,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.850.027.102	9.415.551.357	(565.524.255)	(6,01)
Beban Penyusutan Jaringan	255.080.784	255.080.784	0	0,00
Jumlah	26.074.288.285	27.518.352.217	(1.444.063.932)	(5,25)
Beban Amortisasi Software	178.286.518	296.059.873	(117.773.355)	(39,78)
Beban Amortisasi Lisensi	2.092.737.312	722.719.556	1.370.017.756	189,56
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	3.509.000	12.625.708	(9.116.708)	(72,21)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	0	48.092.495	(48.092.495)	(100,00)
Jumlah	2.274.532.830	1.079.497.632	1.195.035.198	110,70
Total	28.348.821.115	28.597.849.849	(249.028.734)	(0,87)

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp93.835 dan Rp39.467.136. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.835 merupakan Beban Penyisihan Tak Tertagih dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Piutang Macet dan Piutang Jangka Panjang.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian		Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar					
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.056.000.001	1.030.000.000	26.000.001	2,52
2	Beban Kerugian Pelepasan Aset	(17.032.303)	(2.107.049.209)	2.090.016.906	(99,19)
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		1.038.967.698	(1.077.049.209)	2.116.016.907	(196,46)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya					
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	17.458.399	(17.458.399)	(100,00)
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	10.930.000	84.431.435	(73.501.435)	(87,05)
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	0	100,00
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	33.722.860	0	33.722.860	100,00
5	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(20.514.750)	0	(20.514.750)	100,00
6	Pelunasan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, konsinyering dan honor tim atas kegiatan 2020 yang dibayar di 2021 (Koreksi BPK 2020)	0	(32.017.185)	32.017.185	(100,00)
7	Pelunasan piutang kelebihan pembayaran iuran BPJS kesehatan an. PT Wika Realty	0	(30.113.250)	30.113.250	(100,00)
8	Pelunasan piutang kelebihan pembayaran honorarium staf khusus an. M.I.	0	(4.331.250)	4.331.250	(100,00)
9	Pelunasan piutang kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja an. W.S.	0	(5.392.857)	5.392.857	(100,00)
10	Pelunasan piutang kelebihan pembayaran Gaji Pokok an. M.N.	0	(5.958.900)	5.958.900	(100,00)
11	Pelunasan piutang kelebihan pembayaran Gaji Pokok an. P.S.H.	0	(1.775.000)	1.775.000	(100,00)
12	Koreksi Audited BPK Koreksi Persediaan Usang Belum Dicatat	(38.558.060)	0	(38.558.060)	(100,00)
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(14.419.950)	22.301.392	(36.721.342)	(164,66)
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.024.547.748	(1.054.747.817)	2.079.295.565	(197,14)

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp33.722.860 dan Rp(20.514.750) disebabkan oleh koreksi tambah dan kurang atas pencatatan jumlah maupun nilai pada transaksi persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.254.155.353 dan Rp1.961.869.742.868.

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(216.253.570.530) dan Rp(202.155.241.415). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(62.627.673) dan Rp(42.127.019) Koreksi yang terjadi selama Tahun 2022 terdiri atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp(74.282.172) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp11.654.499.

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp195.593.730.074 dan Rp201.581.780.919. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	196.555.127.045
Diterima dari Entitas Lain	(2.274.496.971)
Transfer Masuk	1.400.000
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.311.700.000
Jumlah	195.593.730.074

Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp1.311.700.000 disebabkan adanya pengesahan hibah 1 (satu) unit kendaraan Outlander PHEV yang diserahkan pada tahun 2021 melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 041/MMKSI-BA/2021, yang disahkan pada tahun 2022 melalui Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barangs/Jasa/Surat Berhargas (MPHL-BJS) Nomor 02378T tanggal 9 Desember 2022.

5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.940.531.687.224 dan Rp1.961.254.155.353.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.5/2021 perihal : Kebijakan Akuntansi Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban dari Putusan Hukum Inkracht dan Pelaporan dan Pengungkapan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan/atau PC PEN, maka perlakuan pencatatan kewajiban atas putusan pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa uang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkracht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah inkracht hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.
- d. Pengalokasian anggaran dalam DIPA untuk pembayaran kewajiban yang berasal dari tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*in kracht van gewijsde*) menunjukkan tidak adanya upaya lain yang akan dilakukan pemerintah atas tuntutan hukum dimaksud sebagaimana Paragraf 10 huruf a PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Tuntutan hukum kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah inkracht adalah putusan hukum dengan Nomor Perkara 341PK/Pdt/2017 dengan pokok gugatan berupa tanah Persekutuan Masyarakat Adat Deli. Atas gugatan tersebut, hasil putusan kasasi menetapkan:

- 1) Tergugat I (PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara - Aceh);
- 2) Tergugat II (PT Kereta Api (Persero) Kantor Pusat di Bandung); dan
- 3) Tergugat III Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri BUMN.

untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000.00.

Namun berdasarkan Putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn dinyatakan bahwa Permohonan Eksekusi aset PT KAI (Persero) di kawasan Pulo Brayan Kota Medan ditangguhkan karena dalam

pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayan seluas 40.000 m² (4 Ha) adalah milik Persekutuan Masyarakat Adat Deli (Sultan Deli).
- 2) Perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayan seluas kurang lebih 2.910 m² dan bangunan di atasnya seluasnya 180 m² adalah milik PT KAI (Persero).

Dengan kata lain tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017.

PT KAI (Persero) belum melaksanakan hasil putusan yang telah inkraht sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya akan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sehubungan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn. Sampai dengan saat ini, upaya hukum tersebut di atas sedang dalam tahap finalisasi identifikasi pihak-pihak Tergugat dalam objek perkara. Di samping itu, PT KAI (Persero) telah mengajukan permohonan *non-executable* kepada Pengadilan Negeri Medan sesuai surat Nomor KL.902/III/I/KA-2022 tanggal 15 Maret 2022.

2. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian BUMN telah ditetapkan susunan organisasi Kementerian BUMN yang terdiri dari 2 (dua) Wakil Menteri, 1 (satu) Sekretaris Kementerian, 3 (tiga) Deputi, serta 3 (tiga) Staf Ahli. Dalam Peraturan Presiden tersebut, turut diatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pembinaan BUMN, dilakukan klusterisasi BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN I dan II sebagai berikut:

- a) Wakil Menteri BUMN I: dari 12 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN I, dikelompokkan ke dalam 6 kluster sektor industri;
- b) Wakil Menteri BUMN II: dari 61 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II, dikelompokkan ke dalam 6 kluster sektor jasa.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

bidang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
ESELON I : 01 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 606538 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 10/05/23 10:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,056,000,001	0	1,056,000,001	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	912,075,000	1,193,604,057	0	1,193,604,057	130.87
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	912,075,000	2,249,604,058	0	2,249,604,058	246.65
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,126,653	0	4,126,653	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	4,126,653	0	4,126,653	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,636,260	0	8,636,260	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,930,000	0	10,930,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,200,000	0	1,200,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	20,766,260	0	20,766,260	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	912,075,000	2,274,496,971	0	2,274,496,971	249.38
	JUMLAH PENDAPATAN	912,075,000	2,274,496,971	0	2,274,496,971	249.38

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/23 10:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 10/5/23 7:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,473,814,000	20,472,113,000	20,471,574,100	32,551,300	20,439,022,800	100	33,090,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	348,000	402,000	384,947	3,597	381,350	95.76	20,650
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,443,746,000	1,148,500,000	1,144,308,370	0	1,144,308,370	99.64	4,191,630
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	396,498,000	314,500,000	313,065,946	0	313,065,946	99.54	1,434,054
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,846,099,000	1,896,000,000	1,895,000,000	0	1,895,000,000	99.95	1,000,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	327,124,000	116,000,000	112,542,000	0	112,542,000	97.02	3,458,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	111,951,000	91,500,000	90,679,691	0	90,679,691	99.1	820,309
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,142,323,000	1,049,165,000	1,048,875,020	0	1,048,875,020	99.97	289,980
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,987,747,000	3,040,901,000	3,040,901,000	8,470,000	3,032,431,000	100	8,470,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	752,576,000	935,720,000	932,060,000	0	932,060,000	99.61	3,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	31,482,226,000	29,064,801,000	29,049,391,074	41,024,897	29,008,366,177	99.95	56,434,823
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	199,167,000	185,000,000	176,543,674	0	176,543,674	95.43	8,456,326
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	827,130,000	696,000,000	692,498,590	0	692,498,590	99.5	3,501,410
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat	910,000,000	840,000,000	840,000,000	0	840,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,936,297,000	1,721,000,000	1,709,042,264	0	1,709,042,264	99.31	11,957,736
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	41,759,086,000	45,381,686,000	45,362,767,514	0	45,362,767,514	99.96	18,918,486
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	41,759,086,000	45,381,686,000	45,362,767,514	0	45,362,767,514	99.96	18,918,486
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	75,177,609,000	76,167,487,000	76,121,200,852	41,024,897	76,080,175,955	99.94	87,311,045
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,835,675,000	11,431,669,000	11,394,691,184	10,769,532	11,383,921,652	99.68	47,747,348
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	11,268,000	11,250,500	0	11,250,500	99.84	17,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,670,281,000	954,620,000	900,701,258	0	900,701,258	94.35	53,918,742
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,205,240,000	4,684,708,000	4,578,615,366	0	4,578,615,366	97.74	106,092,634
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	778,506,000	1,013,482,000	935,078,787	0	935,078,787	92.26	78,403,213
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	17,539,702,000	18,095,747,000	17,820,337,095	10,769,532	17,809,567,563	98.48	286,179,437
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,428,059,000	6,350,782,000	6,271,292,086	0	6,271,292,086	98.75	79,489,914
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,226,265,000	1,106,518,000	992,037,000	0	992,037,000	89.65	114,481,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,266,246,000	6,279,610,000	6,253,807,489	0	6,253,807,489	99.59	25,802,511

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/23 10:29 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 10/5/23 7:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,920,570,000	13,736,910,000	13,517,136,575	0	13,517,136,575	98.4	219,773,425
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,578,890,000	2,456,805,000	2,432,655,101	0	2,432,655,101	99.02	24,149,899
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,578,890,000	2,456,805,000	2,432,655,101	0	2,432,655,101	99.02	24,149,899
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,040,000,000	5,383,992,000	5,307,046,577	0	5,307,046,577	98.57	76,945,423
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	72,000,000	12,139,614	0	12,139,614	16.86	59,860,386
522113	Belanja Langganan Air	336,000,000	288,720,000	287,560,451	0	287,560,451	99.6	1,159,549
522131	Belanja Jasa Konsultan	8,212,200,000	6,720,170,000	6,720,160,627	0	6,720,160,627	100	9,373
522141	Belanja Sewa	12,831,780,000	11,730,353,000	11,684,216,425	53,459,820	11,630,756,605	99.61	99,596,395
522151	Belanja Jasa Profesi	2,921,079,000	2,017,803,000	1,874,700,000	8,120,000	1,866,580,000	92.91	151,223,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	40,879,210,000	28,034,665,000	27,907,233,765	0	27,907,233,765	99.55	127,431,235
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,769,988,000	307,105,000	289,075,457	0	289,075,457	94.13	18,029,543
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	72,062,257,000	54,554,808,000	54,082,132,916	61,579,820	54,020,553,096	99.13	534,254,904
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,000,000	696,120,000	543,676,607	0	543,676,607	78.1	152,443,393
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	634,300,000	634,108,000	634,107,229	0	634,107,229	100	771
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,563,210,000	6,209,288,000	6,105,119,739	0	6,105,119,739	98.32	104,168,261
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,000,000	22,700,000	19,978,400	0	19,978,400	88.01	2,721,600
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,151,685,000	2,437,911,000	2,437,867,470	0	2,437,867,470	100	43,530
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,593,195,000	10,000,127,000	9,740,749,445	0	9,740,749,445	97.41	259,377,555
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,918,526,000	10,379,165,000	10,270,003,380	6,849,998	10,263,153,382	98.95	116,011,618
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	632,910,000	515,282,000	489,432,000	300,000	489,132,000	94.98	26,150,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,704,689,000	2,778,799,000	2,672,006,456	410,500	2,671,595,956	96.16	107,203,044
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,999,662,000	5,548,174,000	5,374,821,650	9,299,416	5,365,522,234	96.88	182,651,766
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	16,255,787,000	19,221,420,000	18,806,263,486	16,859,914	18,789,403,572	97.84	432,016,428
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	969,125,000	461,767,000	457,542,077	0	457,542,077	99.09	4,224,923
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	63,540,000	44,604,000	44,577,872	0	44,577,872	99.94	26,128
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,032,665,000	506,371,000	502,119,949	0	502,119,949	99.16	4,251,051
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	131,983,066,000	118,572,188,000	116,901,394,567	89,209,266	116,812,185,301	98.59	1,760,002,699
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/23 10:29 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 10/5/23 7:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,000,000	1,883,800,000	1,860,207,169	0	1,860,207,169	98.75	23,592,831
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	35,000,000	1,883,800,000	1,860,207,169	0	1,860,207,169	98.75	23,592,831
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,050,000,000	1,803,046,000	1,802,558,620	0	1,802,558,620	99.97	487,380
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,050,000,000	1,803,046,000	1,802,558,620	0	1,802,558,620	99.97	487,380
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,085,000,000	3,686,846,000	3,662,765,789	0	3,662,765,789	99.35	24,080,211
	JUMLAH BELANJA	208,245,675,000	198,426,521,000	196,685,361,208	130,234,163	196,555,127,045	99.12	1,871,393,955

**NERACA PERCOBAAN AKRUAL SALDO
AWAL**

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 041

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 606538

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl. Cetak 10/05/2023 10:32 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker--rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3,824,293,582	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	117,587,996	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	41,678,902	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	3,500,004	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	4
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	78,950,593
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	2,226,495
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,006,546,070	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	21,147,720	0
0.0	117114	Suku Cadang	14,389,918	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	16,074,894	0
0.0	131111	Tanah	1,468,058,953,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	137,776,726,404	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	468,773,597,003	0
0.0	134113	Jaringan	7,706,388,680	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	83,715,709,822
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	35,944,615,706
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,502,865,980
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	28,240,748	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	141,204
0.0	162151	Software	12,303,971,240	0
0.0	162161	Lisensi	7,085,554,923	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3,892,012,485	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	48,092,495
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	12,083,050,843
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,964,581,364
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	3,753,129,693

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 041
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl. Cetak 10/05/2023 10:32 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	75,738,791
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,839,752
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	1,311,700,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	7,999,258,136
0.0	391111	Ekuitas	0	1,961,254,155,353
JUMLAH			2,111,737,073,731	2,111,737,073,731

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 10/05/23 10:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3,629,370,644	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	136,355,033	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	41,678,902	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	3,500,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	79,044,428
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	2,226,495
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,379,612,363	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	58,018,560	0
0.0	117114	Suku Cadang	10,979,673	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	15,475,255	0
0.0	131111	Tanah	1,468,058,953,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	136,884,866,357	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	469,161,643,003	0
0.0	134113	Jaringan	7,706,388,680	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	96,518,467,983
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	44,793,609,388
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,757,946,764
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	28,240,748	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	141,204
0.0	162151	Software	13,339,482,643	0
0.0	162161	Lisensi	2,850,515,278	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3,199,528,242	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	13,296,848,764
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,838,696,532
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	3,174,965,242
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	357,032,907
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	21,375,586
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	5,198,958,526
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	196,555,127,045
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,274,496,971	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,400,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,961,254,155,353
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	74,282,172	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	11,654,499
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	1,311,700,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 10/05/23 10:34 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,056,000,001
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,999,811,208
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,126,653
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,930,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,200,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	33,722,860
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	20,480,345,045	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	381,350	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,144,308,370	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	313,065,946	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,190,310,410	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	112,542,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	90,679,691	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,048,875,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,032,431,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	932,060,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	176,543,674	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	692,498,590	0
3.0	511337	Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	840,000,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	45,301,977,765	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	11,284,438,757	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,250,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	900,701,258	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,578,615,366	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	935,078,787	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,271,292,086	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	992,037,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6,668,765,822	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	5,327,765,552	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,139,614	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	288,217,062	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	6,720,160,627	0
3.0	522141	Beban Sewa	11,614,712,059	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,866,580,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	27,907,233,765	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	289,075,457	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,676,607	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	634,107,229	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 10/05/23 10:34 AM
 Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,984,567,239	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,978,400	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2,437,867,470	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	10,263,153,382	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	489,132,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,671,595,956	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,365,522,234	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	457,542,077	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	44,577,872	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16,969,180,399	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,850,027,102	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	255,080,784	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	178,286,518	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	2,092,737,312	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3,509,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,784,611,108	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	59,033,160	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	66,912,329	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	87,981,553	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	20,514,750	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	93,835	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	17,032,303	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	38,558,060	0
JUMLAH			2,331,279,158,938	2,331,279,158,938

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta Pusat, 10 Mei 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

LOTO SRINAITA GINTING
 196705071993102001

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 10/05/23 10:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,394,691,184	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,253,807,489	0
3.0	522141	Belanja Sewa	11,684,216,425	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,636,260
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	935,078,787	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,471,574,100	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	112,542,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	932,060,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	489,432,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,271,292,086	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,432,655,101	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	9,299,416
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,193,604,057
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,200,000
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,895,000,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	90,679,691	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	457,542,077	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	176,543,674	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,874,700,000	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	410,500
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,144,308,370	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,048,875,020	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	45,362,767,514	0
3.0	511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	692,498,590	0
3.0	511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	840,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	27,907,233,765	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	10,769,532
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	8,120,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	6,849,998
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	634,107,229	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	289,075,457	0
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,126,653
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,437,867,470	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	10,270,003,380	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,672,006,456	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	900,701,258	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 10/05/23 10:35 AM
 Halaman : 2
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,578,615,366	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	992,037,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	6,720,160,627	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,597
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,056,000,001
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,930,000
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	44,577,872	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	8,470,000
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	196,555,127,045
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	384,947	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	12,139,614	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	287,560,451	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,676,607	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,105,119,739	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,978,400	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,802,558,620	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	313,065,946	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,040,901,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,374,821,650	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,860,207,169	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,250,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	5,307,046,577	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	32,551,300
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	53,459,820
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,274,496,971	0
JUMLAH			198,959,858,179	198,959,858,179

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta Pusat, 10 Mei 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

LOTO SRINAITA GINTING
 196705071993102001

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2022

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl.Data : 05/05/23 6:00 AM
Tanggal : 05/05/23 9:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,378,214,899
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	58,228,440
117114	Suku Cadang	12,803,937
117199	Persediaan Lainnya	14,838,575
131111	Tanah	1,468,058,953,000
132111	Peralatan dan Mesin	136,884,866,357
133111	Gedung dan Bangunan	469,161,643,003
134113	Jaringan	7,706,388,680
135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(96,518,467,983)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44,793,609,388)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,757,946,764)
162151	Software	13,339,482,643
162161	Lisensi	2,850,515,278
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	3,199,528,242
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(13,296,848,764)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(1,838,696,532)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(3,174,965,242)
J U M L A H		1,942,351,338,543

LAPORAN PERSEDIAAN

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Tanggal : 05/05/23 10:06 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	75,407,671
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	135,650
1010301003	Penjepit Kertas	26,204,741
1010301004	Penghapus/Korektor	3,335,568
1010301005	Buku Tulis	7,514,815
1010301006	Ordner Dan Map	229,548,255
1010301007	Penggaris	459,540
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	4,412,600
1010301009	Pita Mesin Ketik	632,500
1010301010	Alat Perekat	9,404,608
1010301014	Barang Cetakan	31,041,425
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	77,480,604
1010302001	Kertas HVS	150,740,050
1010302002	Berbagai Kertas	30,463,101
1010302003	Kertas Cover	660,660
1010302004	Amplop	36,396,906
1010302005	Kop Surat	95,194,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	12,631,182
1010304004	Tinta/Toner Printer	544,563,930
1010304006	USB/Flash Disk	14,875,000
1010304010	Mouse	4,662,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	2,706,000
1010306010	Batu Baterai	15,098,460
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	879,559
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	41,600
1010701002	Minuman	3,724,474
Jumlah Barang Konsumsi		1,378,214,899
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	58,228,440
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		58,228,440
117114	Suku Cadang	
1010203010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set	12,803,937
Jumlah Suku Cadang		12,803,937
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	3,272,483
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	10,585,568
1010401004	Obat Serbuk/Tepung(Persediaan Lainnya)	277,222
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	703,302
Jumlah Persediaan Lainnya		14,838,575
TOTAL		1,464,085,851

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 38,558,060 dalam kondisi usang.

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tanggal : 05/05/23 9:58 AM

Halaman : 1

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	18,122	1,468,058,953,000
20101	TANAH PERSIL	18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	18,122	1,468,058,953,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,347	137,776,726,404	203	5,086,678,539	956	5,978,538,586	6,594	136,884,866,357
30103	ALAT BANTU	14	17,840,098,171	0	0	0	0	14	17,840,098,171
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	27	7,866,284,600	1	1,311,700,000	1	1,311,700,000	27	7,866,284,600
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	23	46,899,100	0	0	0	0	23	46,899,100
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	86	2,903,713,437	0	0	0	0	86	2,903,713,437
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	6,390,600	0	0	0	0	4	6,390,600
30303	ALAT UKUR	1	1,658,800	0	0	0	0	1	1,658,800
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	11,644,050	0	0	0	0	6	11,644,050
30501	ALAT KANTOR	1,675	10,382,555,981	14	1,010,024,120	286	1,050,800,085	1,403	10,341,780,016
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,112	37,016,751,010	153	1,182,288,629	482	1,059,523,614	3,783	37,139,516,025
30601	ALAT STUDIO	175	4,576,230,010	21	537,624,300	11	70,260,740	185	5,043,593,570
30602	ALAT KOMUNIKASI	87	420,374,660	4	15,538,890	38	137,722,360	53	298,191,190
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	114,524,679	0	0	0	0	1	114,524,679
30701	ALAT KEDOKTERAN	19	171,193,000	0	0	0	0	19	171,193,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	6,500,802	0	0	0	0	2	6,500,802
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	40	6,044,032,722	0	0	0	0	40	6,044,032,722
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	19,269,800	3	6,681,400	0	0	4	25,951,200
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	2	26,313,980	0	0	0	0	2	26,313,980
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	29,920,000	0	0	0	0	1	29,920,000
31001	KOMPUTER UNIT	655	12,412,214,455	0	0	70	1,022,388,820	585	11,389,825,635
31002	PERALATAN KOMPUTER	403	37,466,738,268	7	1,022,821,200	67	1,323,983,117	343	37,165,576,351
31503	ALAT SAR	2	199,796,453	0	0	0	0	2	199,796,453
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	2,159,850	0	0	1	2,159,850	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	75,042,000	0	0	0	0	1	75,042,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9	136,419,976	0	0	0	0	9	136,419,976
133111	Gedung dan Bangunan	4	468,773,597,003	0	1,548,218,540	0	1,160,172,540	4	469,161,643,003
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	468,773,597,003	0	1,548,218,540	0	1,160,172,540	4	469,161,643,003
134113	Jaringan	3	7,706,388,680	0	0	0	0	3	7,706,388,680
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	7,077,847,260	0	0	0	0	1	7,077,847,260
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	451,399,180	0	0	0	0	1	451,399,180
50403	JARINGAN TELEPON	1	177,142,240	0	0	0	0	1	177,142,240
135121	Aset Tetap Lainnya	3,047	1,066,410,162	0	0	0	0	3,047	1,066,410,162
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	3,026	576,910,162	0	0	0	0	3,026	576,910,162
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	21	489,500,000	0	0	0	0	21	489,500,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tanggal : 05/05/23 9:58 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	0	0	955	4,168,579,836	955	4,168,579,836	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	286	1,050,800,085	286	1,050,800,085	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	482	1,059,523,614	482	1,059,523,614	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	11	70,260,740	11	70,260,740	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	38	137,722,360	38	137,722,360	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	70	1,022,388,820	70	1,022,388,820	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	67	825,724,367	67	825,724,367	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	1	2,159,850	1	2,159,850	0	0
TOTAL			2,083,382,075,249		10,803,476,915		11,307,290,962		2,082,878,261,202

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tanggal : 05/05/23 9:58 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	273	138,309,979	20	11,655,000	68	12,622,775	225	137,342,204
30501	ALAT KANTOR	0	0	20	11,655,000	0	0	20	11,655,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	240	121,208,279	0	0	56	11,438,075	184	109,770,204
30601	ALAT STUDIO	9	6,486,700	0	0	2	326,700	7	6,160,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	8	4,367,000	0	0	0	0	8	4,367,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	5,390,000	0	0	0	0	6	5,390,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	858,000	0	0	10	858,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	68	12,622,775	68	12,622,775	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	56	11,438,075	56	11,438,075	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	2	326,700	2	326,700	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	10	858,000	10	858,000	0	0
TOTAL			138,309,979		24,277,775		25,245,550		137,342,204

ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tanggal : 05/05/23 9:59 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kel_kl

UAPB : 041

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	246	12,303,971,240	1,632	4,164,859,645	5	3,129,348,242	1,873	13,339,482,643
80101	ASET TAK BERWUJUD	246	12,303,971,240	1,632	4,164,859,645	5	3,129,348,242	1,873	13,339,482,643
162161	Lisensi	1,635	7,085,554,923	0	0	1,633	4,235,039,645	2	2,850,515,278
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,635	7,085,554,923	0	0	1,633	4,235,039,645	2	2,850,515,278
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5	3,892,012,485	6	3,199,528,242	5	3,892,012,485	6	3,199,528,242
80101	ASET TAK BERWUJUD	5	3,892,012,485	6	3,199,528,242	5	3,892,012,485	6	3,199,528,242
TOTAL			23,281,538,648		7,364,387,887		11,256,400,372		19,389,526,163

**LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tanggal : 05/05/23 9:59 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl

UAKPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
131111	Tanah	18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	1,468,058,953,000
20101	TANAH PERSIL	18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	1,468,058,953,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,594	136,884,866,357	(83,715,709,822)	(12,802,758,161)	0	(96,518,467,983)	40,366,398,374
30103	ALAT BANTU	14	17,840,098,171	(7,881,408,379)	(1,826,171,728)	0	(9,707,580,107)	8,132,518,064
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	27	7,866,284,600	(6,489,398,885)	(226,242,857)	0	(6,715,641,742)	1,150,642,858
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	23	46,899,100	(17,504,725)	(19,596,250)	0	(37,100,975)	9,798,125
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	86	2,903,713,437	(1,351,321,935)	(287,971,767)	0	(1,639,293,702)	1,264,419,735
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	6,390,600	(5,751,540)	(639,060)	0	(6,390,600)	0
30303	ALAT UKUR	1	1,658,800	(1,658,800)	0	0	(1,658,800)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	11,644,050	(11,644,050)	0	0	(11,644,050)	0
30501	ALAT KANTOR	1,403	10,341,780,016	(6,101,372,937)	(470,230,059)	0	(6,571,602,996)	3,770,177,020
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,783	37,139,516,025	(22,861,687,627)	(3,157,326,038)	0	(26,019,013,665)	11,120,502,360
30601	ALAT STUDIO	185	5,043,593,570	(2,730,672,000)	(582,698,749)	0	(3,313,370,749)	1,730,222,821
30602	ALAT KOMUNIKASI	53	298,191,190	(281,754,605)	89,798,406	0	(191,956,199)	106,234,991
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	114,524,679	(40,083,638)	(11,452,468)	0	(51,536,106)	62,988,573
30701	ALAT KEDOKTERAN	19	171,193,000	(50,266,480)	(33,842,600)	0	(84,109,080)	87,083,920
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	6,500,802	(1,300,160)	(1,300,160)	0	(2,600,320)	3,900,482
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	40	6,044,032,722	(5,601,948,722)	(97,671,926)	0	(5,699,620,648)	344,412,074
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	25,951,200	(642,327)	(1,730,080)	0	(2,372,407)	23,578,793
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2	26,313,980	(12,157,706)	(2,573,868)	0	(14,731,574)	11,582,406
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	29,920,000	(26,180,000)	(3,740,000)	0	(29,920,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	585	11,389,825,635	(6,735,004,780)	(1,211,139,999)	0	(7,946,144,779)	3,443,680,856
31002	PERALATAN KOMPUTER	343	37,165,576,351	(23,295,029,437)	(4,854,246,085)	0	(28,149,275,522)	9,016,300,829
31503	ALAT SAR	2	199,796,453	(149,847,341)	(49,949,112)	0	(199,796,453)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	(2,159,850)	2,159,850	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	75,042,000	(21,440,572)	(10,720,286)	0	(32,160,858)	42,881,142
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9	136,419,976	(45,473,326)	(45,473,325)	0	(90,946,651)	45,473,325
133111	Gedung dan Bangunan	4	469,161,643,003	(35,944,615,706)	(8,848,993,682)	0	(44,793,609,388)	424,368,033,615
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	469,161,643,003	(35,944,615,706)	(8,848,993,682)	0	(44,793,609,388)	424,368,033,615
134113	Jaringan	3	7,706,388,680	(1,502,865,980)	(255,080,784)	0	(1,757,946,764)	5,948,441,916
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	7,077,847,260	(1,182,832,923)	(231,177,032)	0	(1,414,009,955)	5,663,837,305
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	451,399,180	(218,176,269)	(15,046,640)	0	(233,222,909)	218,176,271
50403	JARINGAN TELEPON	1	177,142,240	(101,856,788)	(8,857,112)	0	(110,713,900)	66,428,340
135121	Aset Tetap Lainnya	3,047	1,066,410,162	0	0	0	0	1,066,410,162
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	3,026	576,910,162	0	0	0	0	576,910,162
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	21	489,500,000	0	0	0	0	489,500,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	(48,092,495)	48,092,495	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAKPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM
Tanggal : 05/05/23 9:59 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30501	ALAT KANTOR	0	0	(10,240,450)	10,240,450	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	(37,852,045)	37,852,045	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		27,770	2,082,878,261,202	(121,211,284,003)	(21,858,740,132)	0	(143,070,024,135)	1,939,808,237,067

**LAPORAN PENYUSUTAN
EKSTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAKPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM
Tanggal : 05/05/23 9:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	225	137,342,204	(50,457,123)	(12,653,995)	0	(63,111,118)	74,231,086
30501	ALAT KANTOR	20	11,655,000	0	(1,165,500)	0	(1,165,500)	10,489,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	184	109,770,204	(45,575,595)	(9,422,145)	0	(54,997,740)	54,772,464
30601	ALAT STUDIO	7	6,160,000	(2,174,700)	(905,300)	0	(3,080,000)	3,080,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	8	4,367,000	(1,310,100)	(873,400)	0	(2,183,500)	2,183,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	5,390,000	(1,010,628)	(673,750)	0	(1,684,378)	3,705,622
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	(386,100)	386,100	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		225	137,342,204	(50,457,123)	(12,653,995)	0	(63,111,118)	74,231,086

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM
Tanggal : 05/05/23 9:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162151	Software	1,873	13,339,482,643	(12,083,050,843)	(1,213,797,921)	0	(13,296,848,764)	42,633,879
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,873	13,339,482,643	(12,083,050,843)	(1,213,797,921)	0	(13,296,848,764)	42,633,879
162161	Lisensi	2	2,850,515,278	(3,964,581,364)	2,125,884,832	0	(1,838,696,532)	1,011,818,746
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	2,850,515,278	(3,964,581,364)	2,125,884,832	0	(1,838,696,532)	1,011,818,746
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6	3,199,528,242	(3,753,129,693)	578,164,451	0	(3,174,965,242)	24,563,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	6	3,199,528,242	(3,753,129,693)	578,164,451	0	(3,174,965,242)	24,563,000
JUMLAH		1,881	19,389,526,163	(19,800,761,900)	1,490,251,362	0	(18,310,510,538)	1,079,015,625

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR: BAR-2/KPB.MBU/5/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-05-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arief Maulana
NIP : 199002232015031002
Jabatan : Subkoordinator

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Sukamdani Eko Basuki
NIP : 198404102006021001
Jabatan : Subkoordinator Verifikasi dan Akuntansi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara BMN pada lingkup Kementerian BUMN dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan BMN yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Tahun 2022 (audited) dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahun 2022 (Audited)		
		Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	1.942.351.338.543	1.942.351.338.543	0
A	ASET LANCAR	1.464.085.851	1.464.085.851	0
1	Persediaan	1.464.085.851	1.464.085.851	0
B	ASET TETAP	1.939.808.237.067	1.939.808.237.067	0
1	Tanah	1.468.058.953.000	1.468.058.953.000	0
2	Peralatan dan Mesin	136.884.866.357	136.884.866.357	0
3	Gedung dan Bangunan	469.161.643.003	469.161.643.003	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	7.706.388.680	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	1.066.410.162	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-143.070.024.135	-143.070.024.135	0
C	ASET LAINNYA	1.079.015.625	1.079.015.625	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	16.189.997.921	16.189.997.921	0
3	Aset Lain-Lain	3.199.528.242	3.199.528.242	0
4	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-Lain	-3.174.965.242	-3.174.965.242	0
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-15.135.545.296	-15.135.545.296	0
II	BMN NON NERACA	74.231.086	0	-74.231.086*
A	EKSTRAKOMPTABEL	74.231.086	0	-74.231.086*
1	BMN Ekstrakomptabel	137.342.204	0	-137.342.204*
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	-63.111.118	0	63.111.118*
B	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0**

*) Barang Milik Negara Ekstrakomptabel disajikan dalam Laporan BMN dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

**) Barang rusak berat berupa Aset Tetap yang telah diusulkan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang dikeluarkan dari neraca Laporan Keuangan namun tetap disajikan dalam Laporan BMN



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

-2-

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*), dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Subkoordinator

Arief Maulana
NIP 199002232015031002

**Subkoordinator Verifikasi
dan Akuntansi**

Sukamdani Eko Basuki
NIP 198404102006021001

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BA 041) TAHUN 2022
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022 (AUDITED)

Nomor : NKF-056/041/PB.6/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal **18 April 2023**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BA 041) Tahun 2022**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sementara ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BA 041) Tahun 2022** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2022 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka kami menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) **paling lambat tanggal 10 Mei 2023**.

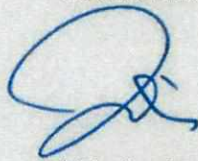
PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Keuangan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara



Muh. Rosyid Ariansyah
NIP 198201022003121001

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



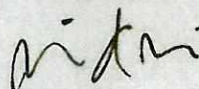
Idris Aswin
NIP 197706131999031002

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Nur Abdul Haris
NIP 197802222000011001

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Indriasari Kusumadewi
NIP 198207182006042007

DAFTAR USULAN KOREKSI LK UNAUDITED TA 2022

Kode 606538

Instansi KEMENTERIAN BUMN (BA 041)

No	Koreksi	Kode Akun	Nilai Debit (Rp)	Nilai Kredit (Rp)
1	Reklas pembelian access gate (peralatan mesin) dengan belanja modal gedung dan bangunan			
a	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	391116	986,496,620.00	
	Gedung dan Bangunan	133111		986,496,620.00
b	Peralatan dan Mesin	132111	986,496,620.00	
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	491429		986,496,620.00
c	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	986,496,620.00	
	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	533121		986,496,620.00
d	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	137211	9,864,966.00	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211		9,864,966.00
e	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	93,649,660.00	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	137111		93,649,660.00
f	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	491429	986,496,620.00	
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	391116		986,496,620.00
2	Reklas pencatatan 14 lisensi ke software			
a	Software	162151	4,164,859,645.00	
	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	391118	1,804,176,784.00	
	Lisensi	162161		4,164,859,645.00
	Beban Amortisasi Lisensi	592116		1,804,176,784.00
b	Akumulasi Amortisasi Lisensi	169316	2,765,873,770.00	
	Beban Amortisasi Lisensi	592116		2,765,873,770.00
c	Beban Amortisasi Software	592115	4,164,859,645.00	
	Akumulasi Amortisasi Software	169315		4,164,859,645.00
d	Beban Amortisasi Lisensi	592116	1,804,176,784.00	
	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	391118		1,804,176,784.00
3	Koreksi Pencatatan Software dan Lisensi yang Tidak Digunakan			
a	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	166113	3,199,523,242.00	
	Software	162151		3,129,348,242.00
	Lisensi	162161		70,180,000.00
b	Akumulasi Amortisasi Software	169315	3,129,348,242.00	
	Beban Amortisasi Software	592115		3,129,348,243.00
c	Akumulasi Amortisasi Lisensi	169316	45,617,000.00	
	Beban Amortisasi Lisensi	592116		45,617,000.00
d	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	592118	3,174,965,242.00	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	592118		3,174,965,242.00
4	Koreksi kesalahan pencatatan lisensi dengan umur 1 tahun			
	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	114112	853,081,500.00	
	Beban Keperluan Perkantoran	521111		855,954,000.00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523121		12,127,500.00
5	Koreksi akun tidak normal persekot gaji			
	Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	114211	1,200,000.00	
	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	425991		1,200,000.00
6	Koreksi akun tidak normal Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin			
	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	595112	11,655,000.00	
	Beban Barang Operasional Lainnya	521119		11,655,000.00
7	Koreksi pembayaran Tukin Nov 2022 di Tahun 2023			
	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	512411	3,768,773.00	
	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	212111		3,768,773.00
8	Koreksi Persediaan Usang Belum Dicatat			
	Beban Persediaan Rusak/Usang	596121	38,558,060.00	
	Persediaan - Konsumsi	117111		38,558,060.00

Keterangan:

- Usulan jurnal koreksi poin 1b tidak dilakukan koreksi pada LRA karena perlu melakukan revisi SPM dan dapat berdampak pada saldo pagu minus
- Jurnal poin 1a dan 1b merupakan output otomatis dari aplikasi SAKTI saat KL menginput rekla Gedung Bangunan dan mutasi tambah Peralatan Mesin (jurnal 1a). Jurnal poin 2a merupakan output otomatis dari aplikasi SAKTI saat KL menginput rekla lisensi dan mutasi tambah software. Sedangkan jurnal poin 1f dan 2d merupakan jurnal manual dari KL untuk eliminasi akun tidak seharusnya.
- Nilai koreksi Beban Penyusutan/Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (jurnal poin 1d; 1e; 2b; 2c; 3b; 3c; 3d; dan 6b) menyesuaikan dengan hasil modul Aset pada SAKTI

Mengetahui,
Ketua Tim Pemeriksa BPK



Indriyanti Kusumadewi

Jakarta, 18 April 2023
Menyetujui,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan



Muh. Rosyid Ariansyah

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Bagian Anggaran : 041

Uraian Bagian Anggaran : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,274,496,971	-	-	2,274,496,971
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
Pendapatan dari KND	-	-	-	-
Pendapatan PNBPN Lainnya	2,274,496,971	-	-	2,274,496,971
Pendapatan BLU	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	2,274,496,971	-	-	2,274,496,971
Belanja Pegawai	76,080,175,955	-	-	76,080,175,955
Belanja Barang	116,812,185,301	-	-	116,812,185,301
Belanja Modal	3,662,765,789	-	-	3,662,765,789
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	196,555,127,045	-	-	196,555,127,045
Dana Perimbangan	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
Dana DIY	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Desa	-	-	-	-
TOTAL TKDD	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-	-
TOTAL PEMBIAYAAN	-	-	-	-

Kementerian/Lembaga

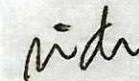


Muh. Rosyid Ariansyah

Kementerian Keuangan



Badan Pemeriksa Keuangan



Indriasari Kusumadewi

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2022
PER 31 DESEMBER 2022

LAMPIRAN ROTA KESIPAKATAN
Nomor : NISF-456/041/PB.4/2023
Tanggal : 18 April 2023

K/L : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BA : 041

ASUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN RL		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas lainnya dan Setara kas	-	-	-	-
Kas pada BLU	-	-	-	-
Investasi jangka pendek BLU	-	-	-	-
Rekening Dikawatir (Dikawatir)	2,761,269,144	668,091,500	-	3,629,370,644
Utang Mula (Utang Mula)	(1,200,000)	1,200,000	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-
Piutang Persepsi	-	-	-	-
Penyisihan PIH-Piutang Persepsi	-	-	-	-
Piutang Persepsi (Netto)	-	-	-	-
Piutang Gajian Pajak	178,033,035	-	-	178,033,035
Penyisihan PIH - Piutang Gajian Pajak	(81,270,939)	-	-	(81,270,939)
Piutang Gajian Pajak (Netto)	96,762,096	-	-	96,762,096
Bagan Lancar TPA	-	-	-	-
Penyisihan PIH-Bagan Lancar TPA	-	-	-	-
Bagan Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagan Lancar TPVIGR	3,500,000	-	-	3,500,000
Penyisihan PIH-Bagan Lancar TPVIGR	(17,500)	-	-	(17,500)
Bagan Lancar TPVIGR (Netto)	3,482,500	-	-	3,482,500
Bagan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Penyisihan PIH-Bagan Lancar PPH	-	-	-	-
Bagan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Piutang dan Kewajiban BLU	-	-	-	-
Penyisihan PIH - Piutang dan Kewajiban BLU	-	-	-	-
Piutang dan Kewajiban BLU (Netto)	-	-	-	-
Persepsi	1,502,643,911	-	33,550,000	1,469,093,911
Jumlah Aset Lancar	4,342,978,967	668,281,500	34,550,000	5,193,762,067
ASET TETAP				
Tanah	1,468,058,853,000	-	-	1,468,058,853,000
Peralatan dan Mesin	135,808,362,737	988,496,620	-	136,796,859,357
Gedung dan Bangunan	470,148,139,623	-	988,496,620	469,160,643,003
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,706,388,680	-	-	7,706,388,680
Aset Tetap Lainnya	1,056,410,162	-	-	1,056,410,162
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(96,419,818,323)	-	98,649,660	(96,518,467,983)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44,823,474,354)	9,884,966	-	(44,793,609,388)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1,757,946,764)	-	-	(1,757,946,764)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	1,839,897,621,761	998,381,586	1,088,146,280	1,939,808,237,067
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TPVIGR/Ganti Rugi	28,240,748	-	-	28,240,748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPVIGR	(141,204)	-	-	(141,204)
Tagihan TPVIGR/Ganti Rugi (Netto)	28,099,544	-	-	28,099,544
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PPL)	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PPL	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	28,099,544	-	-	28,099,544
ASET LAINNYA				
Kemampuan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	19,389,526,163	4,164,859,645	7,364,387,637	16,189,997,921
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
Dana Penjaminan	-	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
Aset Lain-lain	-	3,199,528,242	-	3,199,528,242
Akum. Penyusutan Kemampuan Dg Pihak Ketiga	-	-	-	-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-
Akum. Penyusutan ATB yg TDK digunakan	-	-	-	-
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(16,911,524,663)	5,940,839,012	4,164,859,645	(15,135,545,296)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	-	-	3,174,955,242	(3,174,955,242)
Jumlah Aset Lainnya	2,478,001,500	13,305,228,899	14,704,212,714	1,679,015,425
JUMLAH ASET	1,946,766,101,372	15,170,669,985	15,827,917,114	1,946,109,654,243
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	374,639,720	-	3,768,773	378,408,493
Bagan Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5,198,958,526	-	-	5,198,958,526
Hibah Yang Belum Dibayar	-	-	-	-
Utang Mula dari KPPN	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5,573,598,246	-	3,768,773	5,577,367,019
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang (UTB) kepada BLU	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang (UTB) kepada BLU	-	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5,573,598,246	-	3,768,773	5,577,367,019
EKUITAS	1,941,192,502,126	(5,519,463,140)	(4,658,247,239)	1,940,531,687,225
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,946,766,101,372	(5,519,463,140)	(4,658,247,239)	1,946,109,054,244

Jakarta, April 2023
Kementerian Keuangan,
Muh. Rosyidi Ariwidyah

Ditjen Anggaran Negara,
Idris Aswin

Selbst Ekuitas Neraca vs LPE
Neraca Tidak Balance

KETERANGAN:
Neraca tidak balance dikarenakan adanya pembulatan pada akun Ekuitas akibat migrasi dan aplikasi NERACA ke SAKTI

Badan Pemeriksa Keuangan,
Indri



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 Nomor : NK-056/041/PB.6/2023
 Tanggal : 18 April 2023

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

K/L : KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
 BA : 041

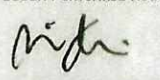
	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas L	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,003,937,861	986,496,620	987,696,620	4,005,137,861
Pendapatan Badan Layanan Umum	-			-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan	4,003,937,861	986,496,620	987,696,620	4,005,137,861
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-			-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	4,003,937,861	986,496,620	987,696,620	4,005,137,861
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	76,352,250,083	3,768,773		76,356,018,861
Beban Persediaan	1,872,592,661			1,872,592,661
Beban Barang dan Jasa	86,524,017,712	11,655,000	867,609,000	85,668,063,712
Beban Pemeliharaan	9,758,269,934		12,127,500	9,746,142,434
Beban Perjalanan Dinas	19,291,523,521			19,291,523,521
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mas	-			-
Beban Bunga	-			-
Beban Subsidi	-			-
Beban Hibah	-			-
Beban Bantuan Sosial	-			-
Beban Transfer	-			-
Beban Lain-lain	-			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	26,861,050,547	9,242,651,331	7,754,880,763	28,348,821,115
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	93,835			93,835
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	220,659,798,298	9,258,075,104	8,634,617,263	221,283,256,139
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(216,655,860,437)	(8,271,578,484)	(7,646,920,643)	(217,278,118,278)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,056,000,001			1,056,000,001
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	17,032,303			17,032,303
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	1,038,967,698	-	-	1,038,967,698
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka P	-			-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian K	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional L	44,652,860			44,652,860
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20,514,750	38,558,060		59,072,810
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan N	24,138,110	(38,558,060)	-	(14,419,950)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,063,105,808	(38,558,060)	-	1,024,547,748
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-			-
Beban Luar Biasa	-			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(215,592,754,629)	(8,310,136,544)	(7,646,920,643)	(216,253,570,530)

Jakarta, April 2023
 Kementerian/Lembaga


 Murti Rosyid Ariansyah


 Indris Aswin

Badan Pemeriksa Keuangan


 Indriarsi Kusumadewi



LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2022
PER 31 DESEMBER 2022

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-056/041/PB.6/2023
Tanggal : 18 April 2023

K/L : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BA : 041

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	1.961.254.155.353			1.961.254.155.353
SURPLUS/DEFISIT LO	(215.592.754.629)	(8.310.136.544)	(7.646.920.643)	(216.253.570.530)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-			-
Selisih Revaluasi Aset	-			-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(62.627.672)	2.790.673.404	2.790.673.404	(62.627.672)
Koreksi Atas Reklasifikasi	-			-
Koreksi Lain-lain	-			-
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(62.627.672)	2.790.673.404	2.790.673.404	(62.627.672)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS				
Ditagikan ke Entitas Lain	196.555.127.045			196.555.127.045
Diterima dari Entitas Lain	(2.274.496.971)			(2.274.496.971)
Transfer Keluar	-			-
Transfer Masuk	1.400.000			1.400.000
Pengesahan Hibah Langsung	-			-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-			-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.311.700.000			1.311.700.000
Setoran Surplus BLU	-			-
Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	-			-
JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	195.593.730.074	-	-	195.593.730.074
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(20.061.652.227)	(5.519.463.140)	(4.856.247.239)	(20.722.468.128)
EKUITAS AKHIR	1.941.192.503.126	(5.519.463.140)	(4.856.247.239)	1.940.531.687.225

Jakarta April 2023
Kementerian/Lembaga

Muh. Rosyid Ariansyah

Badan Pemeriksa Keuangan

Indriasari Kusumadewi

Ditjen Kekayaan Negara

Iris Aswin

Ditjen Perbendaharaan

Selisih Surplus(Defisit) LPE VS LO

KETERANGAN:

Tidak ada selisih antara Surplus (Defisit) LPE vs LO.

Output SAKTI saldo akhir Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah Rp62.627.673,00 sehingga saldo Kenaikan/Penurunan Ekuitas menjadi Rp(20.722.468.129,00) dan saldo Ekuitas Akhir menjadi Rp(1.940.531.687.224,00). Hal ini karena ada pembulatan sebesar Rp1,00 dari tahun-tahun sebelumnya untuk akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.



LAMPIRAN BELANJA PENANGANAN COVID KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI PADA LKKL

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BAGIAN ANGGARAN : 041

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-056/041/PB.6/2023
Tanggal : 18 April 2023

PAGU KEMENTERIAN/LEMBAGA	BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				BELANJA BANTUAN SOSIAL				KETERANGAN
	AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		
	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	
Pagu Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.320.587.000	521131	935,078,787			532119	0			574114	0			Digunakan untuk biaya paket data dan komunikasi, biaya isolasi mandiri pegawai yang terpapar virus covid-19, biaya swab/pcr antigen pegawai, biaya pemeriksaan lanjutan dan obat-obatan pegawai yang terpapar covid-19, kelengkapan pendukung penanganan covid 19 bagi pegawai (masker, hand sanitizer, dan suplemen kesehatan).
	521241	0			533119	0			575114	0			
	521841	0			536118	0							
	522192	289,075,457			537122	0							
	523114	0			537123	0							
	524115	0			537125	0							
	525152	0											
	525153	0											
	525154	0											
	525155	0											
	525156	0											
	526131	0											
	526132	0											
	526321	0											
	526322	0											
SUB TOTAL		1,224,154,244		0		0		0		0		0	
TOTAL PER JENIS BELANJA					1,224,154,244				0				
TOTAL BELANJA									1,224,154,244				

INFORMASI REKENING KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2022

No	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	BA-Es.I	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang (Rp)
1	Kementerian BUMN (606538)	Kementerian BUMN (041)	Kementerian BUMN (01)	Rekening Induk (Giro)	202.001.000.262.307	RKK KEMENTERIAN BUMN.OPS	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	BRI KCP KEMENTERIAN BUMN	0
2	Kementerian BUMN (606538)	Kementerian BUMN (041)	Kementerian BUMN (01)	Rekening Satker (Virtual)	650.796.065.381.000	BPG 019 KEMENT.BUMN	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	BRI KCP KEMENTERIAN BUMN	0

CAPAIAAN OUTPUT STRATEGIS

Realisasi Anggaran dan Capaian Output Strategis Kementerian BUMN TA 2022
Lampiran Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian Nomor ND-83/S.MBU.A/02/2023 tanggal 10 Februari 2023

NO	Kegiatan	Kode	Uraian Output	Keterangan	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	%
1	EI.4407	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas	Kebijakan Persetujuan Restrukturisasi Holding-Subholding PT PLN (Persero) Rekomendasi Kebijakan Unlock Value PT Pertamina International Shipping	86.747.000	86.747.000	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
2	EI.4407	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas	Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara pada PT	126.204.000	124.262.418	98%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
3	EI.4407	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas		616.026.000	612.414.785	99%	3 BUMN	3 BUMN	100%
4	EI.4408	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara	Kebijakan Energi Baru Terbarukan (EV Battery) Kebijakan Proyek Hilirisasi Terintegrasi Kebijakan Reorganisasi Internal Holding Tambang	12.000.000	11.585.400	97%	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
5	EI.4408	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Mineral dan Batubara	Kebijakan Hilirisasi Tambang (Coal to DME)	215.811.000	212.629.231	99%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
6	EI.4408	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Mineral dan Batubara		622.815.000	621.054.700	100%	1 BUMN	1 BUMN	100%
7	EI.4409	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Kesehatan	-Kebijakan Holding BUMN Farmasi (Inbreng PT INUKI ke Bio Farma) -Kebijakan Unlock Value Kimia Farma	119.830.000	119.667.660	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
8	EI.4409	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Industri Kesehatan	Kebijakan Pelaksanaan Pembuatan Vaksin BUMN (Covid-19)	87.102.000	86.953.910	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
9	EI.4409	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan		544.226.000	541.598.642	100%	2 BUMN	2 BUMN	100%
10	EI.4410	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Manufaktur	Kebijakan Pembentukan Holding Industri Pertahanan Kebijakan Restrukturisasi PT Len Industri (Persero) Kebijakan Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Pindad	9.375.000	9.375.000	100%	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
11	EI.4410	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Manufaktur	Kebijakan Penugasan UAV Male Kebijakan Penugasan Pelaksanaan Program Dekarbonisasi	99.474.000	98.623.071	99%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
12	EI.4410	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Manufaktur		679.817.000	675.932.662	99%	9 BUMN	9 BUMN	100%
13	EI.4412	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Keuangan	Kebijakan Hibah Saham Seri A BSI kepada Pemerintah Kebijakan Implementasi Right Issue BTN (right issue dalam rangka penugasan program sejuta rumah)	205.584.000	204.662.574	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
14	EI.4412	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Sektor Jasa Keuangan		563.635.000	559.400.848	99%	7 BUMN	7 BUMN	100%
15	EI.4413	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	-Kebijakan Integrasi BUMN Semen -Kebijakan Program Penyelesaian Perum Perumnas	57.170.000	57.164.102	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
16	EI.4413	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	-Kebijakan Pembangunan & Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera	46.425.000	46.424.400	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
17	EI.4413	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur		708.551.000	708.387.279	100%	10 BUMN	10 BUMN	100%
18	EI.4414	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	-Rencana Penyelesaian Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) -Rencana Perbaikan Kesehatan Keuangan PT ASABRI (Persero)	128.742.000	128.741.941	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
19	EI.4414	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	-Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Penjaminan KUR PT Jaminan Kredit Indonesia -Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Penjaminan KUR PT Asuransi Kredit Indonesia	94.116.000	94.116.000	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
20	EI.4414	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		550.559.000	549.195.973	100%	5 BUMN	5 BUMN	100%
21	EI.4415	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	-Kebijakan Pembentukan Integrasi PTPN Group -Kebijakan perbaikan operasional dan peningkatan kinerja finansial anak perusahaan PTPN	81.437.000	81.193.000	100%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
22	EI.4415	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	Kebijakan Penugasan Importasi Gula Konsumsi kepada PTPN	165.440.000	165.228.880	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
23	EI.4415	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan		498.817.000	495.085.214	99%	5 BUMN	5 BUMN	100%
25	EI.4416	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Kawasan, Logistik, dan Pariwisata	-Kebijakan Dukungan atas Rencana Penyelamatan melalui Restrukturisasi PT Garuda Indonesia -SKU RUPSLB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk -Penetapan harga exercise untuk persiapan right issue PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	331.747.000	331.728.825	100%	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi Anggaran dan Capaian Output Strategis Kementerian BUMN TA 2022
Lampiran Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian Nomor ND-83/S.MBU.A/02/2023 tanggal 10 Februari 2023

NO	Kegiatan	Kode	Uraian Output	Keterangan	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	%
26	EI.4416	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Kawasan, Logistik, dan Pariwisata	Kebijakan Pelaksanaan Event MotoGP	32.587.000	31.799.000	98%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
27	EI.4416	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Kawasan, Logistik, dan Pariwisata		496.862.000	494.257.483	99%	9 BUMN	9 BUMN	100%
28	EI.4418	ABA.001	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BUMN	Kebijakan Peraturan Manajemen Risiko BUMN	971.572.000	957.097.420	99%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
29	EI.4418	ABA.002	Rumusan kebijakan pembentukan holding BUMN	Kebijakan Peraturan Pemerintah Holding BUMN	5.760.000	5.590.000	97%	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
30	EI.4419	BBD.001	Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN	Rekomendasi terhadap aksi korporasi BUMN	786.784.000	774.415.471	98%	1 Badan usaha	1 Badan usaha	100%
31	EI.4420	AAG.001	Peraturan terkait Pengembangan dan Pengawasan BUMN yang disusun	Peraturan Menteri Nomor PER-1/MBU/01/2022 Peraturan Menteri Nomor PER-2/MBU/02/2022 Peraturan Menteri Nomor PER-3/MBU/03/2022 Peraturan Menteri Nomor PER-4/MBU/06/2022 Peraturan Menteri Nomor PER-5/MBU/09/2022	1.067.930.000	1.058.157.867	99%	5 PerMen	5 PerMen	100%
32	EI.4421	ABA.001	Laporan Kinerja BUMN	-Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham -Penyusunan Kebijakan KPI -Monitoring Penyampaian RUPP/RKAP, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan -Penyusunan Laporan Keuangan	12.328.924.000	12.206.322.882	99%	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
33	EI.4421	ABA.002	Rumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas BUMN	-Rumusan Kebijakan Pengelolaan PMN BUMN -Restrukturisasi Hutang BUMN tidak produktif	321.207.000	302.891.495	94%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
34	EI.4421	ABA.003	Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN	Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen dan Monitoring Realisasi Dividen	331.684.000	320.840.422	97%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
35	EI.4828	ABA.001	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Pangan Pupuk	-Kebijakan Restrukturisasi PT Rekraya Industri -Kebijakan Restrukturisasi Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) -Kebijakan Restrukturisasi Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)	141.675.000	141.675.000	100%	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
37	EI.4828	ABA.002	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk	Kebijakan Penugasan Importasi Daging BUMN	118.734.000	118.734.000	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
38	EI.4828	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk		518.494.000	514.693.751	99%			100%
39	EI.5810	ABK.001	Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Direksi/ Dekom	558.311.000	550.643.724	99%	65 Rekomendasi Kebijakan	64 Rekomendasi Kebijakan	100%
40	EI.5810	ABK.002	Rumusan Kebijakan Pengelolaan Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rekomendasi Kebijakan terkait Manajemen SDM Pengelolaan Talent Pool calon Direksi BUMN Rekomendasi Kebijakan Program Pengembangan SDM BUMN	289.995.000	285.344.032	98%	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
41	EI.5811	ABA.002	Rumusan kebijakan strategis terkait pembinaan BUMN	Rumusan kebijakan strategis untuk mendukung pembinaan BUMN Rumusan kebijakan strategis tentang Outlook Market/ Sektor Industri Rumusan kebijakan strategis tentang Peningkatan Level INDI 4.0 BUMN Rumusan kebijakan strategis tentang Monitoring dan Evaluasi Inovasi BUMN	1.184.859.000	952.089.730	80%	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
42	EI.5811	FAB.001	Aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dibangun	-Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan dibangun (Integrasi portal TJSL dengan Aplikasi TJSL) -Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan dibangun (Aplikasi Mitra Champion) -Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan dibangun (Integrasi Modul Sangar (Simanis) dengan Aplikasi SAKTI (Kemenkeu) -Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan dibangun (Aplikasi Master Data) -Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan dibangun (Aplikasi CSIRT)	18.240.774.000	18.189.476.041	100%	5 Sistem Informasi	9 Sistem Informasi	100%
43	EI.5813	ABA.002	Hasil pembinaan BUMN dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Rumusan kebijakan strategis tentang Penyaluran TJSL	929.127.000	907.926.208	98%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
44	EI.6601	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Kebijakan penugasan Kawasan Industri Terpadu Batang	35.029.000	35.018.885	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
45	EI.6601	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Telekomunikasi dan Media		728.898.000	728.641.354	100%	7 BUMN	7 BUMN	100%
46	EI.6602	ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Logistik	Pembentukan holding BUMN Perkereta-apian	75.406.000	75.406.000	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
47	EI.6602	ABA.003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Logistik	Penyusunan Rumusan Kebijakan Investasi BUMN	140.553.000	140.552.688	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
48	EI.6602	BDA.001	Hasil pengembangan BUMN Sektor Sektor Jasa Logistik		634.416.000	633.019.141	100%	8 BUMN	8 BUMN	100%
			TOTAL		46.591.231.000	46.046.766.110	98,83%			

**LAPORAN TINDAK LANJUT/RENCANA
TINDAK TEMUAN BPK**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999.03) TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (UAKPA BUN) PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 DI JAKARTA

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	LK BUN BA 999.03 TA 2020 Audited Disampaikan Terlambat dan Disusun Tidak Sepenuhnya Berdasarkan LKPN Audited	1	-	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko serta Asisten Deputi Bidang Keuangan atas kekurangan optimalannya, dan selanjutnya untuk lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaporan keuangan BUMN yang akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta lebih proaktif berkoordinasi dengan DJKN selaku UAP BUN untuk menyesuaikan LK BUN BA 999.03 audited.	1	-	PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan dengan memo nomor MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang pada poin 1 menjelaskan agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaporan keuangan BUMN yang akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta lebih proaktif berkoordinasi dengan DJKN selaku UAP BUN untuk menyesuaikan LK BUN BA 999.03 TA 2020 audited PTL per Agustus 2022 Memorandum Sekretaris a.n. Menteri BUMN kepada Deputi dan para Asdep No. MO-01/MBU.S/02/2022 tgl 22 Februari 2022 yang berisi perintah yang sama dengan Memorandum Sekretaris Menteri BUMN No. MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	1	-							Diusulkan belum sesuai. Dimonitor hingga dokumen pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan diterima.	
																Diusulkan sesuai per Agustus 2022	
2	PMN Non Tunai untuk PT PANN (Persero) yang Berasal Dari Pokok Pinjaman Subsidiary Loan Agreement (SLA) Belum Terlaksana	1	-	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko serta Asisten Deputi Bidang Keuangan atas kekurangan optimalannya dan selanjutnya untuk lebih optimal dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam menyusun rencana konkrit dan komprehensif atas program restrukturisasi dan pengembangan usaha PT PANN.	1	-	PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan dengan memo nomor MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang pada poin 2 menjelaskan agar lebih optimal dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam menyusun rencana konkrit dan komprehensif atas program restrukturisasi dan pengembangan usaha PT PANN PTL per Agustus 2022 Dokumen tindak lanjut yang disampaikan KBUMN berupa Memorandum Sekretaris a.n. Menteri BUMN kepada Deputi dan para Asdep No. MO-01/MBU.S/02/2022 tgl 22 Februari 2022 yang berisi perintah yang sama dengan Memorandum Sekretaris Menteri BUMN No. MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	1	-							Diusulkan belum sesuai. Dimonitor hingga dokumen pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan diterima.	
																Diusulkan sesuai per Agustus 2022	
3	Penyelesaian Penyertaan Modal Negara (PMN) dari BPYBDS dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) dari Aset BMN yang Dioperasikan BUMN Belum Tuntas	1	-	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada: a. Asisten Deputi masing-masing Bidang terkait atas kekurangan optimalannya dan selanjutnya untuk mendorong penyelesaian PMN dari BPYBDS dan PMPP dari BMN yang dioperasikan BUMN, dan b. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko serta Asisten Deputi Bidang Keuangan atas kekurangan optimalannya dan selanjutnya untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan pihak lain untuk mendorong penyelesaian BPYBDS dan PMPP di BUMN.	1	-	PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan dengan memo nomor MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang pada poin 3 menjelaskan agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan pihak lain untuk mendorong penyelesaian BPYBDS dan PMPP di BUMN PTL per Agustus 2022 Dokumen tindak lanjut yang disampaikan KBUMN berupa Memorandum Sekretaris a.n. Menteri BUMN kepada Deputi dan para Asdep No. MO-01/MBU.S/02/2022 tgl 22 Februari 2022 yang berisi perintah yang sama dengan Memorandum Sekretaris Menteri BUMN No. MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	1	-							Diusulkan belum sesuai. Dimonitor hingga diterima dokumen pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada Asisten Deputi masing-masing Bidang terkait (PT PLN, PT Angkasa Pura II, PT ASDP, PT Pertamina, dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/LPPNPI).	
																Diusulkan sesuai per Agustus 2022	
					1	-	PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan dengan memo nomor MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang pada poin 3 menjelaskan agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan pihak lain untuk mendorong penyelesaian BPYBDS dan PMPP di BUMN PTL Semester I 2022 Memorandum Sekretaris a.n. Menteri BUMN kepada Deputi dan para Asdep No. MO-01/MBU.S/02/2022 tgl 22 Februari 2022 yang berisi perintah yang sama dengan Memorandum Sekretaris Menteri BUMN No. MO-3/MBU/S/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	1	-							Diusulkan belum sesuai. Dimonitor hingga diterima dokumen pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada (1) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan (2) Asisten Deputi Bidang Keuangan	
																Diusulkan sesuai per Agustus 2022	
	Jumlah	3	-	Jumlah	4	-	Jumlah	4	-	0	-	0	-	0	-		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Pengurangan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Kementerian BUMN Belum Mengajukan Denda Keterlambatan Pembayaran Sewa Sebesar Rp26.878.340,00 dan Belum Menyelesaikan Addendum Perjanjian Sewa	1	Rp26.878.340,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk: a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa secara optimal; b. memerintahkan Kepala Biro Umum dan Keuangan agar: 1) melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa tanah dan/atau bangunan secara optimal serta menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan pemanfaatan sewa ruangan sesuai; 2) segera melakukan addendum perjanjian sewa dengan PT Bank Mandiri sesuai surat persetujuan dari Kepala KPKM, Jakarta V, dan 3) menagih pembayaran denda keterlambatan pembayaran sewa ruangan kepada PT BNI sebesar Rp25.178.420,00 dan PT Pos Indonesia sebesar Rp1.699.920,00 serta menyetorkannya ke Kas Negara.	1	Rp26.878.340,00	PTL Semester II 2021 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor MO-9/S.MBU/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor MO-2/S.MBU/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 PTL per Agustus 2022 Ditindaklanjuti dengan: a. Laporan monitoring pelaksanaan Sewa TA 2021 dan TA 2022 b. Laporan monitoring pembayaran Denda pada PT BNI dan PT Pos Indonesia (Persero)	1	Rp26.878.340,00								Diusulkan belum sesuai Dipantau hingga diperoleh laporan optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan sewa Diusulkan sesuai per Agustus 2022	Rp26.878.340,00
2	Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyimpanan Arsip Kementerian BUMN Tahun 2020 Tidak Sesuai Ketentuan	1		- BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Keuangan memberi teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK atas ketidakcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam menetapkan KAK, rancangan kontrak, dan HPS serta menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.	1		- PTL Semester II 2021 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor MO-2/S.MBU/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 PTL per Agustus 2022 Surat teguran Kepala Biro Umum dan Keuangan melalui Nota Dinas ND-138/S.MBU/C/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 terkait teguran kepada PPK 3 TA 2020 atas ketidakcermatan dalam menetapkan KAK, rancangan kontrak dan HPS serta menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Penyimpanan Arsip Tahun 2020.	1								Diusulkan belum sesuai Dipantau hingga diperoleh surat teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK atau ketidakcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam menetapkan KAK, rancangan kontrak, dan HPS serta menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Surat teguran diselenggarakan dengan rekomendasi lain terkait pemberian sanksi/teguran Diusulkan sesuai per Agustus 2022		
3	Pemberian fasilitas BBM Kendaran Operasional kepada Pejabat Kementerian BUMN dengan Penugasan di BUMN	1		- BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. memerintahkan para Pejabat yang menerima fasilitas kendaraan dari Kementerian BUMN dan tunjangan transportasi dari BUMN senantiasa meminimalkan biaya perawatan dan	1		- PTL Semester II 2021 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor MO-2/S.MBU/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021			1						Diusulkan belum sesuai Dipantau hingga diperoleh bukti pendukung pelaksanaan instruksi.		

Memperoleh Tunjangan Transportasi dari BUMN	1 b. melakukan kajian bersama dengan Kementerian PAN-REB dan BKN untuk menghisahkan penganturan penghasilan dan fasilitas bagi Pejabat Kementerian BUMN yang mendapat penganturan di BUMN, termasuk fasilitas transportasi BBM.	PTL per Agustus 2022 Disinjaklajuti dengan: a. Surat PI Kepala BKN Nomor K51/B-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal kajian tentang Dekom/Dewas asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian BKN menyatakan antara lain dalam perspektif kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mendarang secara tegas mengenai PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN. b. Surat Sekretaris Kemendagri RB Nomor B-5/S-TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal masukan terkait penganturan Dekom/Dewas BUMN asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian Kemendagri RB menyatakan antara lain bahwa PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN bukan termasuk rujukkar jabatan. Selain itu, belum ada aturan dalam manajemen ASN yang mengatur reward bagi ASN yang menduduki jabatan Dekom/Dewas.	1 PTL Semester II 2021 Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-41/S-MBU.07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penganturan Kajian tentang Penganturan Dekom/Dewas asal Kementerian Lembaga/Instansi Pemerintah. PTL per Agustus 2022 a. Surat PI Kepala BKN Nomor K51/B-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal kajian tentang Dekom/Dewas asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian BKN menyatakan antara lain dalam perspektif kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mendarang secara tegas mengenai PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN. b. Surat Sekretaris Kemendagri RB Nomor B-5/S-TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal masukan terkait penganturan Dekom/Dewas BUMN asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian Kemendagri RB menyatakan antara lain bahwa PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN bukan termasuk rujukkar jabatan. Selain itu, belum ada aturan dalam manajemen ASN yang mengatur reward bagi ASN yang menduduki jabatan Dekom/Dewas.	1 PTL Semester II 2021 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor MO-2/S-MBU.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 PTL per Agustus 2022 a. LPT (Lampiran Perancangan/awaban) Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan TA 2021 b. Rekening korn Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2021 yang menunjukkan saldo nihil di akhir tahun PTL Semester II 2021 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor MO-9/S-MBU.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021	Disinjaklajuti dengan: a. Surat PI Kepala BKN Nomor K51/B-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal kajian tentang Dekom/Dewas asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian BKN menyatakan antara lain dalam perspektif kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mendarang secara tegas mengenai PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN. b. Surat Sekretaris Kemendagri RB Nomor B-5/S-TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal masukan terkait penganturan Dekom/Dewas BUMN asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian Kemendagri RB menyatakan antara lain bahwa PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN bukan termasuk rujukkar jabatan. Selain itu, belum ada aturan dalam manajemen ASN yang mengatur reward bagi ASN yang menduduki jabatan Dekom/Dewas.	Disinjaklajuti dengan: a. Surat PI Kepala BKN Nomor K51/B-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal kajian tentang Dekom/Dewas asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian BKN menyatakan antara lain dalam perspektif kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mendarang secara tegas mengenai PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN. b. Surat Sekretaris Kemendagri RB Nomor B-5/S-TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal masukan terkait penganturan Dekom/Dewas BUMN asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian Kemendagri RB menyatakan antara lain bahwa PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN bukan termasuk rujukkar jabatan. Selain itu, belum ada aturan dalam manajemen ASN yang mengatur reward bagi ASN yang menduduki jabatan Dekom/Dewas.
4 Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban oleh Pengelola Keuangan di Kementerian BUMN dalam Sependunya Mendani	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	Disinjaklajuti dengan: a. Surat PI Kepala BKN Nomor K51/B-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal kajian tentang Dekom/Dewas asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian BKN menyatakan antara lain dalam perspektif kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mendarang secara tegas mengenai PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN. b. Surat Sekretaris Kemendagri RB Nomor B-5/S-TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal masukan terkait penganturan Dekom/Dewas BUMN asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian Kemendagri RB menyatakan antara lain bahwa PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN bukan termasuk rujukkar jabatan. Selain itu, belum ada aturan dalam manajemen ASN yang mengatur reward bagi ASN yang menduduki jabatan Dekom/Dewas.	Disinjaklajuti dengan: a. Surat PI Kepala BKN Nomor K51/B-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal kajian tentang Dekom/Dewas asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian BKN menyatakan antara lain dalam perspektif kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mendarang secara tegas mengenai PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN. b. Surat Sekretaris Kemendagri RB Nomor B-5/S-TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal masukan terkait penganturan Dekom/Dewas BUMN asal KL/Instansi Pemerintah. Kajian Kemendagri RB menyatakan antara lain bahwa PNS yang diangkat menjadi Dekom/Dewas pada BUMN bukan termasuk rujukkar jabatan. Selain itu, belum ada aturan dalam manajemen ASN yang mengatur reward bagi ASN yang menduduki jabatan Dekom/Dewas.

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN BUMN DAN INSTANSI TERKAIT DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016, 2017 DAN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3.1 Kementerian BUMN Belum Menetapkan Kriteria Restrukturisasi dan Parameter Penilaian Keberhasilan Restrukturisasi dalam Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Terhadap BUMN yang Mengalami Kesulitan Pertumbuhan	1		- BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKNM yang tidak sepenuhnya menjalankan tupoksinya dalam melakukan analisis dan kajian di bidang restrukturisasi BUMN	1	-	PTL Semester I 2021 KBUMN mengajukan TDD dengan surat S-267/S.MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021, namun pembahasan tindak lanjut menyimpulkan bahwa Rekomendasi masih dapat ditindaklanjuti. Yaitu sbb: a. Sanksi diberikan kepada pejabat ybs. pada saat pemeriksaan. (refer: LHP PDPT) b. Substansi rekomendasi BPK tetap disampaikan kepada unit kerja yang saat itu menangani fungsi tersebut agar menjadi perhatian demi perbaikan pada masa yang akan datang. PTL per Agustus 2022 Memorandum Nomor MO-09/MBU.S/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Teguran/Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada LHP atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang BUMN pada KBUMN dan Instansi Terkait.	1	-							Dipantau hingga bukti peneraan sanksi kepada Tim ybs dan himbuan kepada unit kerja sekarang yang menangani fungsi terkait diterima. Diusulkan sesuai per Agustus 2022	
				b. Mempertimbangkan pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan Deputy berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan	1	-	PTL Semester I 2021 KBUMN telah menerbitkan Nomor PER-01/MBU/03/2020, kemudian diikuti dengan Nomor PER-04/MBU/03/2021 yang berisi pembagian BUMN menyesuaikan dengan cluster bidang usaha BUMN Diusulkan sesuai.	1	-							Diusulkan sesuai per Semester I 2021	
				c. Menetapkan kriteria BUMN yang perlu direstrukturisasi dan kriteria keberhasilan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi	1	-	PTL Semester I 2021 KBUMN telah menerbitkan Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang pembagian BUMN dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri BUMN Nomor: INS-1/MBU/09/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan Milik Negara. Bukti Tindak Lanjut yang disampaikan belum menetapkan kriteria BUMN yang perlu direstrukturisasi dan kriteria keberhasilan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi. PTL Semester II 2021 Nota Dinas Asisten Deputy Bidang Keuangan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Nomor ND-66/DKU.MBU.A/11/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Penyampaian Reviu dan Masukan SOP Kementerian BUMN. Namun dalam penyampaian tersebut belum terdapat penetapan kriteria BUMN yang perlu direstrukturisasi dan kriteria keberhasilan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi PTL per Agustus 2022 Kementerian BUMN akan melakukan pengecekan mengenai fungsi restrukturisasi yang ada di masing-masing Wamen dan Keasdesan MRK, yang sama-sama memiliki fungsi restrukturisasi. Asdep Keuangan menjelaskan bahwa SOP sudah ada, namun kriteria yang diharapkan belum ada. Sehingga perlu dilakukan koordinasi antar unit yang memiliki fungsi restrukturisasi. Dokumen tambahan berupa Nota Dinas Nomor ND-97/06.MBU.L/10/2016 dan ND Nomor ND-108/06.MBU/06/2016 tentang Usulan Pokok-pokok Materi Penyusunan Permen BUMN yang disertai dengan Konsep Mekanisme Penetapan BUMN dalam dan/atau Selesai Restrukturisasi. BPK berpendangan beberapa kriteria mengenai BUMN dalam restrukturisasi dan BUMN selesai restrukturisasi telah ditentukan namun konsep tersebut belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri BUMN secara legal.		-	1						Dipantau hingga kriteria BUMN yang direstrukturisasi dan kriteria keberhasilan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi diterima. Dipantau hingga kriteria BUMN yang direstrukturisasi dan kriteria keberhasilan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga kriteria BUMN yang direstrukturisasi dan kriteria keberhasilan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi selesai dikaji oleh Kementerian BUMN dan ditetapkan dalam SOP resmi.	
2	3.2 Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian BUMN belum memadai	1		- BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Menetapkan panduan/pedoman pengelolaan PPN di lingkungan Kementerian BUMN;	1	-	PTL Semester I 2021 KBUMN sedang menyusun SOP pengelolaan PPNPN. - Pengesahan akan dilakukan bersama-sama dengan SOP yang lainnya. Dipantau sampai SOP ditetapkan PTL Semester II 2021 Sebagai dukungan penyusunan SOP, telah disusun Informasi Jabatan (Injab) untuk formasi berikut ; 04 Arsiparis Pertama 04 Pranata Humas Pertama 06 PKAPBN Mahir 07 PKAPBN Terampil 13 Pengadministrasi Persuratan 14 Analis Publikasi 15 Analis Hubungan Antar Lembaga 23 Analis Keuangan 25 Sekretaris	1	-							Dipantau hingga SOP pengelolaan PPNPN diterima. Dipantau hingga SOP pengelolaan PPNPN diterima.	

[illegible]

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa						Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah
	Jumlah	Jml	Nilai	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Nilai	Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat							
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
1	2	3	4		c. Melakukan kajian dan analisis pembinaan BUMN bekerjasama dengan Kodeputian Teknik agar penemuan dividen tidak bergantung pada BUMN-BUMN besar saja;	1	6	7	-	PTL Semester I 2021	8	10	11	12	13	14	15	16	Dipantau hingga laporan kajian analisis diterima.	17	18	
																			Dipantau hingga laporan kajian analisis diterima.			
																			Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga kebijakan penetapan dividen ditetapkan dengan SOP.			
																			Dipantau hingga SOP monitoring dividen diterima			
																			Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga kebijakan penetapan dividen ditetapkan dengan SOP.			
																			Dipantau hingga bukti pengenaan sanksi kepada pejabat yis dan himbunan kepada unit kerja sekarang yang menagang fungsi terkait diterima.			
5	3.5 Lemahnya Monitoring Kementerian BUMN terhadap Pemberian Fasilitas dan Tantiran/Insentif Kinerja BUMN yang Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku	1			a. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Asdep MSE yang lalai dalam menuntaskan upaya BUMN dapat memberikan tantiran/insentif kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas;	1			-	PTL Semester I 2021		1							Dipantau hingga bukti pengenaan sanksi kepada pejabat yis dan himbunan kepada unit kerja sekarang yang menagang fungsi terkait diterima.			
																			Dipantau hingga bukti pengenaan sanksi kepada pejabat yis dan himbunan kepada unit kerja sekarang yang menagang fungsi terkait diterima.			
																			Diusulkan sesuai per Agustus 2022			
																			Dipantau hingga kajian terkait mekanisme pemberian tantiran/insentif kinerja diterima			
																			Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga kajian terkait mekanisme pemberian tantiran/insentif kinerja diterima			
																			Dipantau hingga surat yang menerbitkan revisi secara cermat beserta hasil revisi diterima.			
																			Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga surat yang menerbitkan revisi secara cermat beserta hasil revisi diterima.			

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa				Hasil Pemantauan Tindak Lanjut										Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyertaan uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Nilai	Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat									
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai								
1		2	3	4	d. Memerintahkan para pejabat yang menerima beberapa fasilitas/tunjangan dengan peruntukan yang sama agar mempertimbangkan azas kepatutan.	1	6	7	-	PTL Semester I 2021 KBUMN telah melakukan rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti BKN, Kemendagri, dan BPKP terkait bolu atau tidaknya pejabat negara ataupun ASN yang mendapat fasilitas/tunjangan dengan peruntukan yang sama agar mempertimbangkan azas kepatutan.	1	11	12	13	14	15	16	Dipantau hingga surat perintah terkait penerimaan fasilitas/tunjangan dengan mempertimbangkan azas kepatutan diterima.	17	18				
										PTL Semester II 2021 Survei Rapat Senin, 1 Februari 2021 dengan agenda Penguatan Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Cucu Perusahaan BUMN dengan peserta rapat Kementerian BUNN, BKN, Sekretariat Negara, Kementerian PAN dan RB dan BPKP dengan hasil rapat antara lain: - Berdasarkan prospektif legal tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait anggaran maupun jabatan pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah sebagai Dekom/Dewas - Keberadaan Dekom/Dewas yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah diperlukan sebagai wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam menyelenggarakan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan perkembangan BUMN - Personel yang menjabat sebagai Dekom/Dewas berhak untuk mendapatkan pengalihan sebagai bentuk kesetimbangan atas keahlian, waktu, dan perhatian yang diberikan kepada BUMN/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan PTL per Agustus 2022 - Surat Pkt. Kepala BKN kepada Menteri BUNN No.851/H-AU.01.01/SD/K/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Kajian tentang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas asil Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dengan alternatif solusi: a. Perluanya mengubah Peraturan Menteri PAN dan RB No. 62 Tahun 2020 tentang Pengawasan PNS pada jabatan Pemerintah atau di Luar Instansi Pemerintah, dengan menambahkan ketentuan PNS dapat diangkat menjadi Dekom/Dewas b. Perlu dilampirkan Peraturan Menteri PAN dan RB tentang persyaratan dan tata cara pengalihan PNS sebagai Dekom/Dewas c. Perlu dilampirkan Peraturan Menteri PAN dan RB tentang persyaratan dan tata cara bentuk perwujudan pentingnya wakil pemerintah selaku pemegang saham/pemilik modal pada BUMN - Surat Sekretaris Kementerian PAN dan RB kepada Sekretaris Kementerian BUNN No. B/AS/ TU.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyampaian Masukan terkait Pengaturan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN asil Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dengan alternatif solusi: a. Perluanya peraturan yang memberikan kejelasan tentang kriteria pelaksanaan pelayanan publik yang dilarang menggap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha BUMN serta meminta pendapat Mahkamah Agung terkait substansi Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; b. Perluanya pencatatan kebijakan yang mengatur reward bagi ASN yang ditugaskan untuk menduduki jabatan Dekom/Dewas, sehingga terdapat legalitas untuk pemberian apresiasi atas kontribusi yang dilakukan.													Dipantau hingga surat perintah terkait penerimaan fasilitas/tunjangan dengan mempertimbangkan azas kepatutan diterima.	
					e. Menyusun konsep peraturan yang mengatur pelayanan penerimaan fasilitas ganda bagi pejabat kementerian/lembaga yang merangkap sebagai pengurus BUMN guna menegakkan azas kepatutan dan sebagai role model penerapan GCG bagi BUMN-BUMN.	1	-	-	-	PTL Semester I 2021 KBUMN telah melakukan rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti BKN, Kemendagri, dan BPKP terkait bolu atau tidaknya pejabat negara ataupun ASN yang mendapat fasilitas/tunjangan dengan peruntukan yang sama agar mempertimbangkan azas kepatutan dan sebagai role model penerapan GCG bagi BUMN-BUMN.	1	1	-	-	-	-	-	Dipantau hingga konsep peraturan dimaksud diterima.						

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa						Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyertaan uang ke kas negara/daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Judul	Jml		Uraian	Jml	Nilai	Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	PTL Semester II 2021 Notulen Rapat Senin 1 Februari 2021 dengan agenda Pengisian Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Cucu Perusahaan BUMN dengan peserta rapat Kementerian BUMN, BKN, Sekretaris Negara, Kementerian PAN dan RB, dan BPKP dengan hasil rapat antara lain: - Berdasarkan prospektif legal tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait anggaran maupun jabatan pejabat Kementerian/embargo/institusi pemerintah sebagai Dekom/Dewas - Keberadaan Dekom/Dewas yang berasal dari Kementerian/embargo/institusi Pemerintah diperlukan sebagai wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam menyelenggarakan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan perkembangan BUMN - Personel yang menjabat sebagai Dekom/Dewas berhak untuk mendapatkan penghasilan sebagai bentuk keseimbangan atas keahlian, waktu, dan perhatian yang diberikan kepada BUMN/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan PTL per Agustus 2022 - Surat Ptl. Kepala BKN kepada Menteri BUMN No.851/BU-AU.01.01/SDK/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Kajian tentang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas asal Kementerian/embargo/institusi Pemerintah dengan alternatif solusi: a. Perlunya mengubah Peraturan Menteri PAN dan RB No. 62 Tahun 2020 tentang Pengisian PNS pada Instansi Pemerintah atau di Luar Instansi Pemerintah, dengan menambahkan ketentuan PNS dapat ditugaskan menjadi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN dan tidak dibelentangkan dari jabatan definitifnya. b. Perlu diadopsi Peraturan Menteri PAN dan RB tentang persyaratan dan tata cara pengisian PNS sebagai Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN sebagai bentuk penguatan pengawasan wakil pemerintah selaku pemegang saham/pemilik modal pada BUMN. - Surat Sekretaris Kementerian PAN dan RB kepada Sekretaris Kementerian BUMN No. B65/ST/02/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyampaian Masukan terkait Pengaturan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN asal Kementerian/embargo/institusi Pemerintah dengan alternatif solusi: a. Perlunya peraturan yang memberikan kejelasan tentang kriteria pelaksanaan pelayanan publik yang diadopsi rangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha BUMN serta meminta pendapat Mahkamah Agung terkait substansi Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; b. Perlunya pendataan kebijakan yang mengatur reward bagi ASN yang ditugasi untuk menduduki jabatan Dekom/Dewas, sehingga terdapat legalitas untuk pemberian apresiasi atas kontribusi yang dilakukan.										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	3.6 Fungsi Pembinaan Kementerian BUMN dalam Pelaksanaan Privatisasi dengan Metode Rights Issue Belum Dilaksanakan Optimal	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Deputi RPU dan Deputi BHS yang lain tidak menyusun kajian privatisasi BUMN sebagai dasar pengantulan keputusan privatisasi oleh Menteri BUMN;	1		PTL Semester I 2021 a. KEBUM menanggapi TDD dengan surat S-267/S/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021, namun pembahasan tidak lanjut menyimpulkan bahwa Rekomendasi masih dapat ditindaklanjuti. Yaitu sbt: a. Sanksi diberikan kepada pejabat ybs pada saat pemeriksaan (refer LIRP PDDT) b. Sblannya rekomendasi BPK tetap disampaikan kepada unit kerja yang saat ini menanggung fungsi tersebut agar menjadi perhatian demi perhatian pada masa yang akan datang. PTL per Agustus 2022 Memorandum Nomor MO-09/MBU.S/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Tegapan/Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada LIRP atas Penyelenggaraan Urusan Penerimaan di Bidang BUMN pada KEBUM dan Instansi Terkait. PTL Semester I 2021 Dengan referensi PER/01/MBU/2010 dan PP 33 Tahun 2005 ttg Tata Cara Kelola Privatisasi, dipantau sampai ada hasil kajian pengantulan privatisasi kepada Komite Privatisasi diantaranya mencakup koordinasi antara Keaslepan Keuangan dan Keaslepan Tdbis terkait dengan kajian pengantulan privatisasi PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				d. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program privatisasi.	1		- PTL Semester I 2021 KBUMN sedang dalam tahap pengajuan usulan SOP Privatisasi (ref PP 33/2015 dan PER-01/2010). Dipantau sampai terbit SOP PTL Semester II 2021 Nota Dinas Asisten Deputi Bidang Keuangan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Nomor ND-66/DKU.MBU.A/1/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Penyampaian Reviu dan Masukan SOP Kementerian BUMN PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru			1						Dipantauing hingga laporan evaluasi diterima. Dipantauing hingga laporan evaluasi diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantauing hingga laporan evaluasi diterima.	
7	3.7 Aplikasi Integrated Talent Management System (ITMS) Belum Optimal Mendukung Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atas ketidakpatuhan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen 13 dan Pejabat Pengadaan terhadap Perpres Pengadaan Barang Jasa Nomor 6 Tahun 2018 dan memerintahkan pihak-pihak internal terkait agar dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk membuat perencanaan yang memadai termasuk menyusun HPS dengan lebih detail disertai kertas kerja dan dokumen-dokumen pendukungnya serta mengunggah RUP ke SIRUP (disesuaikan dengan pengaturan internal); b. Memerintahkan pembuatan kajian jangka waktu penggunaan ITMS dikaitkan dengan biaya-biaya terkait (kajian going concern and value for money ITMS); c. Memerintahkan pembuatan Non- Disclosure Agreement antara Kementerian BUMN dan pihak-pihak terkait pengembangan dan penggunaan aplikasi ITMS, diantaranya namun tidak terbatas dengan PT Telkom selaku penyedia barang/jasa dan dengan BUMN-BUMN, terkait pengelolaan data talenta; d. Melakukan revisi atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan selanjutnya membuat SOP terkait penggunaan dan pengelolaan aplikasi ITMS.	1		- PTL Semester I 2021 KBUMN telah memberikan sanksi-sanksi dimaksud melalui Memorandum Sekretaris Menteri BUMN nomor MO-1/S.MBU/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Teguran menindaklanjuti temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI diusulkan sesuai PTL per Agustus 2022 Memorandum Nomor MO-09/MBU.S/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Teguran/Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada LHP atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang BUMN pada KBUMN dan Instansi Terkait. - PTL Semester I 2021 Telah disusun Kajian ITMS secara umum menerangkan tentang ITMS. Dan telah Terdapat SK Tim/Satgas yang dibentuk untuk membangun aplikasi ITMS berdasarkan SK -192/MBU/09/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Satgas ITMS. Dalam SK disebutkan tugas fungsinya untuk mempersiapkan Sistem Teknologi Informasi dan tata kelola yang baik. Baik Kajian maupun SK Satgas belum secara spesifik memberi perhatian tentang jangka waktu, biaya, going concern dan value for money terkait ITMS. Dipantau hingga terdapat update Kajian ataupun update SK Satgas terbaru yang dapat memberi gambaran penyempurnaan pelaksanaan aplikasi ITMS. PTL Semester II 2021 Kajian Integrated Talent Management System (ITMS) BUMN yang berisi: - Tantangan Pengelolaan BUMN - 7 Program Utama Transformasi HC BUMN - Tujuan ITMS BUMN - Framework Dasar ITMS BUMN Belum terdapat kajian yang berisi jangka waktu penggunaan ITMS dikaitkan dengan biaya-biaya terkait (kajian going concern and value for money ITMS) PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru. - PTL Semester I 2021 KBUMN mengusulkan TDD, namun hasil pembahasan masih menunggu adanya NDA sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi. Walaupun telah ada Migrasi Server ke KernenBUMN, namun tetap dipandang perlu adanya NDA untuk menegaskan dan memperkuat komitmen para pihak yang terlibat terutama yang berasal dari luar KernenBUMN terkait kerahasiaan data yang dikelola. Apabila akan mengajukan TDD kembali agar disampaikan kendala dalam penyusunan NDA dimaksud PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru.	1		1					Diusulkan sesuai Dokumen tambahan Dipantau hingga laporan kajian diterima. Dipantau hingga laporan kajian diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga laporan kajian diterima.		
					1		- PTL Semester I 2021 KBUMN mengusulkan TDD, namun hasil pembahasan masih menunggu adanya NDA sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi. Walaupun telah ada Migrasi Server ke KernenBUMN, namun tetap dipandang perlu adanya NDA untuk menegaskan dan memperkuat komitmen para pihak yang terlibat terutama yang berasal dari luar KernenBUMN terkait kerahasiaan data yang dikelola. Apabila akan mengajukan TDD kembali agar disampaikan kendala dalam penyusunan NDA dimaksud PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru.			1						Dipantau hingga NDA diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga NDA diterima.	
					1		- PTL Semester I 2021 Dipantau hingga sampai draft Permen ditetapkan. Agar dilengkapi dengan matriks komparasi sebelum dan sesudah (PER-03 dan PER yang baru)			1						Dipantau hingga revisi ditetapkan dan SOP terkait diterima.	

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa				Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai	Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat	Nilai					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai							
1	2	3	4	5	6	7	PTL Semester II 2021 - Draft Revisi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN - SK Menteri BUMN Nomor SK-20/MBU/06/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan SOP Kementerian BUMN Tahun 2021 - Draft SOP Mekanisme Manajemen Suksesi dalam Proses Penetapan Anggota Direksi BUMN PTL per Agustus 2022 PerMen BUMN Nomor Per-1/MBU/07/2021 telah ditetapkan, sedangkan draft SOP baru belum ditetapkan. PTL Semester I 2021 KEBUMN menyampaikan bahwa permasalahan pengembangan aplikasi ITMS terus mengalami perkembangan dan perbaikan-perbaikan fitur. Untuk itu, terus dilakukan pembahasan terkait aplikasi ini. Pertemuan dengan pihak Telkom dilakukan formal dan informal. Kementerian BUMN, concern dengan perbaikan terhadap aplikasi ITMS. Dipantau sampai terbit surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan inventarisasi (selengkapnya rekomendasi). PTL Semester II 2021 Usulan Pengembangan Aplikasi ITMS 8 Januari 2021 yang mencakup fitur dan usulan penyesuaian yang akan dilakukan. PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Dipantau hingga revisi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 ditetapkan dan SOP terkait diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga SOP terkait diterima. Dipantau hingga laporan inventarisasi permasalahan teknis dan hasil perbaikannya diterima. Dipantau hingga laporan inventarisasi permasalahan teknis dan hasil perbaikannya diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga laporan inventarisasi permasalahan teknis dan hasil perbaikannya diterima. Dipantau hingga surat perintah terkait perbaikan yang dimaksud diterima. Dipantau hingga surat perintah terkait perbaikan yang dimaksud diterima. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga surat perintah terkait perbaikan yang dimaksud diterima. Dipantau hingga bukti pengenaan sanksi kepada pejabat/ys dan himbuan kepada unit kerja sekarang yang menangani fungsi terkait diterima. Diusulkan sesuai per Agustus 2022	18	
8	3.8 Pengendalian Rangkap Jabatan Komisaris Belum Memadai	1			1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Deputi EBS yang tidak cermat dalam mengendalikan risiko rangkap jabatan; PTL Semester I 2021 KEBUMN mengulangi TLD dengan surat S-26/05/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021, namun pembahasan tidak lanjut menyimpulkan bahwa Rekomendasi masih dapat ditindaklanjuti. Yaitu sebagai berikut: a. Sanksi diberikan kepada pejabat/ys, pada saat pemeriksaan (refer: LHP PDJT) b. Situasi rekomendasi BPK tetap disampaikan kepada unit kerja yang saat ini menangani fungsi tersebut agar menjadi perhatian demi perbaikan pada masa yang akan datang. PTL per Agustus 2022 Memorandum Menteri MO-09/MBU/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Tegapan/Integritas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada LHP atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang BUMN pada KEBUMN dan Instansi Terkait. Telah terdapat Surat Teguran. Diusulkan Sesuai	1	1										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b. Menginstruksikan Deputy IBIS/Deputi terkait untuk: 1) menyusun prosedur baku yang dapat memastikan kelengkapan/updated/validitas data Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN pada Portal SDM dan menyampaikan bukti penerapannya ke BPK; 2) membakukan/standardisasi pengukuran kinerja BUMN atas Ketersediaan dan Kemutakhiran Data BUMN pada Portal SDM; 3) menyusun prosedur baku yang lebih ketat untuk memastikan rangkap jabatan organ BUMN tidak terjadi dan menyampaikan bukti penerapannya ke BPK; 4) membakukan prosedur Menteri BUMN/RUPS mengeluarkan keputusan untuk menegaskan berakhir jabatan ketika tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN sementara menunggu proses penetapan keputusan tentang Pemberhentian Anggota Dekom/Dewas BUMN/Direksi; serta menyampaikan bukti penerapannya ke BPK; 5) Menyampaikan kepada BPK bukti pembayaran seluruh remunerasi dan fasilitas pejabat tersebut di tabel Daftar Rangkap Jabatan pada periode rangkap beserta rekapitulasinya.	1		- PTL Semester I 2021 a. Ditindaklanjuti dengan perbaikan yang sudah dilakukan b. Prosedur baku yang dimaksud dalam rekomendasi adalah berupa bagan alur (SOP) dalam update/validasi c. Adanya limitasi/timeline updating/validasi supaya data yang disampaikan merupakan data yang paling mutakhir. d. dimonitor sampai prosedur baku yang dapat memastikan kelengkapan/updated/validitas data Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN pada Portal SDM (dikaitkan dengan KPI direktur SDM) e. Rekomendasi 8 b (1)(3) (4) dimonitor sampai ditetapkan (di highlight di poin mana yang menjadi trigger untuk memastikan rangkap jabatan organ BUMN tidak terjadi) f. Rekomendasi 8 b (2), dimonitor sampai Permen ditetapkan PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru			1						Dipantau hingga bukti tindak lanjut seluruh rekomendasi poin 1) s.d 7) diterima.	
																Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga bukti tindak lanjut seluruh rekomendasi poin 1) s.d 7) diterima.	
				c. Menunjuk Deputi terkait untuk membuat mekanisme pertanggungjawaban remunerasi dan penghasilan yang seharusnya tidak diberikan karena rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan menyeterkannya ke kas BUMN terkait.	1		- PTL Semester I 2021 KBUMN menyampaikan 1. di PER-01/MBU/03/2020 tupoksi terkait rekomendasi adalah pada Kodeputian KMR 2. PER-04/MBU/03/2021 tupoksi terkait rekomendasi adalah pada Kodeputian SDMTI Dipantau sampai ditetapkan mekanisme pertanggungjawaban permasalahan rangkap jabatan dengan mempertanggungjawabkan nilai remunerasi, yang telah teridentifikasi tidak lagi berhak atas penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dengan menyeterkannya ke kas BUMN terkait. PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru			1						Dipantau hingga mekanisme pertanggungjawaban dimaksud diterima.	
																Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga mekanisme pertanggungjawaban dimaksud diterima.	
9	3.9 Fungsi Pembinaan Kementerian BUMN Melalui Kebijakan Sinergi antar BUMN Belum Optimal	1		- BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: a. Memerintahkan Deputi RPU untuk mengevaluasi kesiapan BUMN dalam sinergi “KM Kelud Charter”;	1		- PTL Semester I 2021 Dipantau sampai terdapat Surat penjelasan dan evidence tambahan bahwa KM Kelud Charter sudah tidak dapat dijadikan guidance sinergi BUMN rencana aksi dan hasil implementasinya (perkembangan terkini) Evaluasi keberlangsungan KM Kelud Charter (alasan tidak dilanjutkannya program sinergi). selain itu agar disampaikan bentuk kelanjutan konsep sinergi yang saat ini dilaksanakan sesuai dengan relevansi kondisi saat ini PTL Semester II 2021 Surat No. S-787/MBU/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP Tahun 2022 beserta Lampiran PTL per Agustus 2022 Belum terdapat dokumen baru.			1						Dipantau hingga diperoleh surat dan bukti pendukung yang menjelaskan : 1. KM Kelud Charter tidak dilanjutkan; 2. Kelanjutan mekanisme sinergi BUMN yang dilakukan. Dipantau hingga diperoleh surat dan bukti pendukung yang menjelaskan : 1. KM Kelud Charter tidak dilanjutkan; 2. Kelanjutan mekanisme sinergi BUMN yang dilakukan. Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga diperoleh surat dan bukti pendukung yang menjelaskan : 1. KM Kelud Charter tidak dilanjutkan; 2. Kelanjutan mekanisme sinergi BUMN yang dilakukan.	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SISTEM PENGENDALIAN INTERN																	
1	Kementerian BUMN Merealisasikan Belanja Sebesar Rp651.395.803,00 untuk Menalangi Pembayaran Tagihan Listrik dan Air Penyewa serta Tidak Dapat Menggenai Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Penyewa	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas: a. menambahkan klausul denda akibat keterlambatan pembayaran uang operasional sewa dhi. listrik dan air tenant kepada Kementerian BUMN pada setiap perjanjian sewa; dan	1		PTL Semester II 2020 Addendum perjanjian sewa menyewa lahan antara KBUMN dengan tenant telah dilakukan untuk mengakomodasi klausul denda atas keterlambatan pembayaran tagihan listrik dan air. Namun dari 14 lahan yang disewakan baru 8 perjanjian penyewaan yang telah dilakukan addendum. PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan Addendum perjanjian sewa menyewa lahan antara KBUMN dengan tenant telah dilakukan untuk mengakomodasi klausul denda atas keterlambatan pembayaran tagihan listrik dan air. Atas sisa tenant sudah tidak di lakukan kerjasama karena telah berubah peruntukan. Pada tahun 2019, terdapat realisasi PNPB dari 14 tenant dengan diantaranya terdapat 2 tenant (PT Garuda Indonesia dan PT Indosat) yang sudah berakhir masa sewanya di bulan Desember 2018 serta 1 tenant (PT Bakrie Telecom) yang melakukan pembayaran piutang macet. Sehingga pada tahun 2019 hanya terdapat 11 tenant aktif yang memerlukan addendum perjanjian. Kementerian BUMN telah melakukan addendum perjanjian sewa kepada 11 tenant.	1									
							PTL Semester II 2021 Dokumen addendum perjanjian terhadap 3 (tiga) tenant (yang tersedia) yang berisikan penambahan klausul denda akibat keterlambatan pembayaran uang operasional sewa dhi. listrik dan air tenant kepada Kementerian BUMN (Pasal 6) pada tenant: a. PT BTN (Persero) Tbk dengan addendum nomor Perj-03/KPB MBU/05/2017 dan 491/PKS/RKH.UT/GA/V/2017 tanggal 20 Juli 2020 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Antara Kementerian BUMN dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk b. PT Danareksa Sekuritas dengan addendum nomor Perj-08/KPB MBU/11/2019 dan PJ-28/212/XI/LGL tanggal 20 Juli 2020 tentang Addendum Pertama Atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Antara Kementerian BUMN dengan PT Danareksa Sekuritas c. PT Telkom dengan addendum nomor Perj-10/KPB MBU/12/2019 dan Perj-PKS.2674/LG.05/RC-03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2020 tentang Addendum Pertama Atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Komplek Kementerian BUMN Antara Kementerian BUMN dengan PT Telekomunikasi Selular									Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah terdapat addendum perjanjian atas 11 tenant (14 - 3 tenant) yang telah memuat penambahan klausul denda akibat keterlambatan pembayaran uang operasional sewa	
				b. Menyusun evaluasi teknis atas permasalahan terkait keterlambatan pembayaran tagihan dari tenant beserta alternatif solusinya, serta merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan evaluasi tersebut.	1		PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan Laporan evaluasi teknis per permasalahan, solusi alternatif, kendala, dan kesimpulan. Termasuk hasil diskusi terbaru dengan PLN. Terkait dengan rekening listrik tenant yang masih tergabung dengan Gedung utama, Biro Umum dan Keuangan telah berupaya berkoordinasi dengan PT PLN untuk solusi yang mungkin dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan dilakukan pemasangan baru listrik dengan daya 197.000 VA dengan biaya sekitar Rp323.865.000,00. Dengan biaya pemasangan yang cukup besar tersebut belum ada pos anggaran Tahun 2020 yang dapat digunakan. Selain itu masih diperlukan pembahasan lebih lanjut lagi terkait teknis pengelolannya apakah akan dikelola oleh pihak Pengelola Gedung atau Koperasi sebagai Koordinator seluruh tenant di Gedung Kementerian BUMN. Atas hal tersebut, mekanisme pembayaran tagihan masih menggunakan mekanisme yang lama dengan melakukan perbaikan dalam hal tanggal jatuh tempo dan pengenaan denda keterlambatan.	1								Dipantau hingga laporan evaluasi teknis dengan mekanisme yang baru, untuk memitigasi risiko berulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.	

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa				Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah															
	Jml		Nilai		Urutan		Jml		Nilai		Jml		Nilai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah																		
	Judul																																		
1	2	3	4	5	6	7	PTL Semester II 2021 Dokumen matrik "Evaluasi Teknis Pembayaran Tagihan Listrik Tenant" yang tanpa informasi pembuatan dokumen maupun tanpa landasan pengesahan dokumen. Dalam dokumen evaluasi tersebut disebutkan bahwa setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan PTN dan PLYYA, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pemisahan listrik dan Rp ar tenant sangat besar (diperkirakan senilai Rp1.035.100.000,00) dan tidak ada pos anggaran pada TA 2021 yang dapat digunakan. Maka sampai saat ini pembayaran tagihan listrik dan air masih menggunakan mekanisme yang lama dengan perbaikan peraturan tanggal jatuh tempo (tanggal 18 setiap bulannya) dan pengisian denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan dari nilai tagihan. Pembayaran listrik ke PTN dilaksanakan dilakukan setelah tenant melakukan pembayaran ke kas negara.				8				17				Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga diperoleh 1. Dokumen evaluasi yang sudah di otorsasi oleh pejabat berwenang. 2. Monitoring pelaksanaan evaluasi teknis yang dilakukan dalam mitigasi risiko.				18												
							PTL per Agustus 2022 Ditindaklanjuti dengan: 1. Dokumen evaluasi yang sudah di otorsasi oleh pejabat berwenang. 2. Monitoring pelaksanaan evaluasi teknis yang dilakukan dalam mitigasi risiko.												Diusulkan sesuai per Agustus 2022																
2	Pertanggungjawaban oleh Pengelola Keuangan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan Batas Waktu Penyelesaian	1			1		b. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk: a. menerbitkan atasan langsung Bendahara agar menginstruksikan PPK dan staf pengelola keuangan PPK (PPK 6, 7, 11, 13, dan 15) agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, dan				1				-				PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S.MBU/1/2020 dari Sekretaris Kementerian BUMN Tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan bahwa para pegawai agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai dengan Surat Edaran Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian BUMN Nomor SE-1/KPA.MBU/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Norma Waktu Penyampaian Berkas Ramping dan Pengembalian Sisa Belanja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Memorandum Mo. 2/S.MBU/09/2020 dari Sekretaris Kementerian BUMN Tentang eguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut terdapat teguran yang tidak sesuai norma waktu penyampaian dokumen untuk PPK 6,7,11,13,15.				1												
					1		b. menerbitkan pelaksanaan anggaran di Kementerian BUMN agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.				1				-				PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S.MBU/1/2020 dari Sekretaris Kementerian BUMN Tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan bahwa para pegawai agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai dengan Surat Edaran Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian BUMN Nomor SE-1/KPA.MBU/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Norma Waktu Penyampaian Berkas Ramping dan Pengembalian Sisa Belanja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Memorandum Mo. 2/S.MBU/09/2020 dari Sekretaris Kementerian BUMN Tentang eguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut terdapat teguran yang tidak sesuai norma waktu penyampaian dokumen untuk PPK 6,7,11,13,15.				1												
3	Empat Belas BUMN Belum Menyampaikan Laporan PKBL dan Anggaran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan Belum Teridentifikasi Minimal sebesar Rp13.127.407.359,00	1			1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputi Infrastruktur Bisnis khususnya Aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk: a. menyusun POS yang mengatur tentang pengumpulan data ataupun pengisian Laporan PKBL dari masing-masing BUMN.				1				-				PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan Nya Dinas ND-60/DSI.MBU/130/01/2021 tanggal 12 Maret 2021 terkait Penyampaian Dallar Usulan Revisi dan SOP Keseluruhan TISL. PTL Semester II 2021 Dokumen draft dokumen Prosedur Operasi Standar (POS) nomor: a. MCT/SL-01 tentang Manual Program TISL BUMN b. P-TISL-03 tentang Prosedur Komunikasi & Pelaporan Program TISL BUMN c. P-TISL-04 tentang Prosedur Pendanaan UNIK dalam Program TISL BUMN d. P-TISL-06 tentang Prosedur Monitoring & Evaluasi Program TISL BUMN				1				Dipantau hingga usulan SOP ditetapkan.				Diusulkan belum sesuai. Dipantau hingga penetapan SOP diterima.				

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa				Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah				
	Judul		Nilai		Uraian		Jml		Nilai		Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
1		2	3	4			c. Inspektur Kementerian BUMN agar lebih cermat dalam melaksanakan revu dokumen usulan anggaran kementerian.	1	5	6	7	-	PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S/MBU/11/2020 dari Sekretaris Kementerian BUN tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan kepada Inspektur agar lebih cermat dalam melaksanakan revu dokumen usulan anggaran kementerian;	1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Pengadaan Langsung Event Organizer (EO) Belum Dilakukan Pembandingan Harga yang Memadai	1			HPK merekomendasikan kepada Menteri BUN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUN untuk: a. memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) PPK dan User yang tidak melakukan koordinasi dan mendokumentasikan risalah atau diskusi perubahan-perubahan dalam perencanaan pengadaan; 2) Pejabat Pengadaan yang lalai tidak mengupayakan minimal 2 (dua) sumber informasi yang berbeda untuk membandingkan harga dan kualitas pengadaan.	1			PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S/MBU/11/2020 dari Sekretaris Kementerian BUN tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan kepada: 1) Pejabat Pengadaan, PPK (PPK 2 dan PPK 8) dan Unit Kerja agar melakukan koordinasi dan mendokumentasikan risalah perubahan dalam perencanaan pengadaan; dan 2) Pejabat Pengadaan agar mengupayakan minimal 2 (dua) sumber informasi yang berbeda untuk membandingkan harga dan kualitas pengadaan.	1	-													
					b. menyempurnakan Prosedur Operasi Standar (POS) perencanaan pengadaan dengan: 1) memastikan agar dokumen terkait dalam perencanaan pengadaan memiliki kesesuaian dan terbit administratif. Apabila terjadi perubahan atau penyesuaian identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan agar diinstruksikan disertai dengan penjelasan berupa risalah/kertas kerja yang lengkap; 2) menyusun agenda perencanaan kegiatan dengan alokasi waktu yang memadai agar memiliki kesempatan dalam melakukan perbandingan harga dan melakukan negosiasi harga yang lebih kompetitif.	1			PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S/MBU/11/2020 dari Sekretaris Kementerian BUN tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Biro Umum dan Keuangan agar menyempurnakan Prosedur Operasi Standar (POS) Perencanaan Pengadaan yang berkaitan dengan kepastian dokumen terkait dalam perencanaan pengadaan memiliki kesesuaian dan terbit administratif yaitu apabila terjadi perubahan atau penyesuaian identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan agar diinstruksikan disertai dengan penjelasan berupa risalah/kertas kerja yang lengkap. Namun POS yang disampaikan belum diberikan kepada Tim BPK.	1	-													
					PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S/MBU/11/2020 dari Sekretaris Kementerian BUN tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Biro Umum dan Keuangan agar menyempurnakan Prosedur Operasi Standar (POS) Perencanaan Pengadaan yang berkaitan dengan penyusunan agenda perencanaan kegiatan dengan alokasi waktu yang memadai agar memiliki kesempatan dalam melakukan perbandingan harga dan melakukan negosiasi harga yang lebih kompetitif. Namun POS yang disampaikan belum diberikan kepada Tim BPK.	1			PTL Semester II 2020 Memorandum Mo. 6/S/MBU/11/2020 dari Sekretaris Kementerian BUN tentang Teguran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dalam memo tersebut disebutkan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Biro Umum dan Keuangan agar menyempurnakan Prosedur Operasi Standar (POS) Perencanaan Pengadaan yang berkaitan dengan penyusunan agenda perencanaan kegiatan dengan alokasi waktu yang memadai agar memiliki kesempatan dalam melakukan perbandingan harga dan melakukan negosiasi harga yang lebih kompetitif. Namun POS yang disampaikan belum diberikan kepada Tim BPK.	1	-													
					PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Nomor : UND 4/S/MBU/A03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Undangan kepada Tim Penyusunan SOP Kementerian BUN; 2. Pembagian Tugas Tim Penyusunan SOP	1			PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Nomor : UND 4/S/MBU/A03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Undangan kepada Tim Penyusunan SOP Kementerian BUN; 2. Pembagian Tugas Tim Penyusunan SOP	1														Dipantau hingga SOP perencanaan pengadaan ditetapkan.

Dipantau hingga SOP perencanaan pengadaan ditetapkan.

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyertaan yang ke luar negeri/diluar					
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah								
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan dokumen: a. Nota Dinas Kepala Biro Umum & Keuangan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, & Kepegawaian dengan nomor ND-191/S/MBU/C12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penyusunan Reriv & Masdan SOP Biro Umum & Keuangan b. Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi & Kepegawaian kepada Tim Penyusun SOP Kementerian BUMN dengan nomor UND-459/MBU/A03/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Kick Off Meeting Penyusunan SOP Kementerian BUMN Tahun 2021 c. Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi & Kepegawaian kepada Tim Penyusun SOP Kementerian BUMN dengan nomor UND-151/S/MBU/A08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pembahasan SOP Kementerian BUMN Tahap II d. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan, Organisasi & Kepegawaian kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian BUMN dengan nomor ND-749/S/MBU/A11/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penindakan Reriv & Masdan Uraian SOP Kementerian BUMN Tahap II e. Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi & Kepegawaian kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian BUMN dengan nomor UND-218/S/MBU/A11/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pembahasan Bersama SOP Kementerian BUMN Tahap II PTL per Agustus 2022 Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas ND-125/S/MBU/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, kepada Menteri tentang Penetapan SOP di lingkungan Kementerian BUMN.													Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. Belum terdapat SOP yang telah disahkan sebagai panduan di Kementerian BUMN. Diberikan hingga SOP perencanaan pengadaan ditetapkan diterima.		
	Jumlah	6	Rp	-		14	-	12	Rp	-	2	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Semester I Tahun 2022
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SISTEM PENGENDALIAN INTERN																		
1	Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin belum Dilengkapi dengan Komitmen Layanan Penyedia melalui Klausul Service Level Agreement	1	-	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar menambahkan klausul Service Level Agreement (SLA) pada setiap perjanjian pemeliharaan peralatan mesin serta sistem pengendalian realisasi down time pada setiap tagihan rekaman pekerjaan jasa pemeliharaan peralatan mesin.	1	-	PTL Semester II 2019 Memorandum Sekretaris kepada Kepala Biro Umum dan Humas Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019. Klausul SLA telah ditambahkan di perjanjian pemeliharaan mesin dan sistem pengendalian realisasi down time pada setiap tagihan rekaman pekerjaan jasa pemeliharaan peralatan mesin. Perjanjian tersebut, yaitu: 1. Pekerjaan Jasa Service Maintenance Genset Kementerian BUMN dengan PT Gerindo Berkat Utama Nomor PERJ-05/PPK3.MBU/2019 tanggal 2 Januari 2019. 2. Pemeliharaan/Service Maintenance Sewage Treatment Plant Kementerian BUMN dengan PT Grahadika Adipurnajasa Nomor PERJ-07/PPK3.MBU/2019 tanggal 2 Januari 2019. 3. Pemeliharaan/Service Maintenance Mesin Chiller dan Cooling Tower Kementerian BUMN dengan PT Jaya Teknik Indonesia Nomor PERJ-06/PPK3.MBU/2019 tanggal 2 Januari 2019 4. Pekerjaan Jasa Service Maintenance Lift Kementerian BUMN dengan PT Sukapura Nuristya Utama Nomor PERJ-02/PPK3.MBU/2019 tanggal 2 Januari 2019. 5. Service Maintenance Security Gate Kementerian BUMN Tahun 2019 dengan PT Visualindo Presentaprima Nomor PERJ-08/PPK3.MBU/2019 tanggal 2 Januari 2019. 2019. 6. Notulen Justifikasi Teknis tanggal 15 Desember 2019, antara lain mengenai dasar penentuan SLA 70% dan 90%.	1	-							Diusulkan sesuai per Semester II 2019.		
2	Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pengelola Keuangan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	1	-	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk:	1	-	PTL Semester II 2019 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada PPK dan staf pengelola keuangan PPK Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018, pada poin 2.a yang diantaranya menginstruksikan agar : PPK dan staf pengelola keuangan PPK agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan	1	-								Diusulkan sesuai per Semester II 2019	
				b. Memerintahkan pelaksana anggaran di KBUMN agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku	1	-	PTL Semester II 2019 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada PPK dan staf pengelola keuangan PPK Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018, pada poin 2.b yang diantaranya menginstruksikan agar Pelaksana Anggaran melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.	1	-							Diusulkan sesuai per Semester II 2019		
				c. Menambahkan klausul sanksi bagi pelaksana anggaran yang tidak mematuhi aturan internal yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian pertanggungjawaban dan bukti pengembalian sisa pertanggungjawaban.	1	-	PTL Semester II 2019 Surat Edaran (SE) Sekretaris Kementerian BUMN kepada para Pejabat Eselon II dan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor S-10/KPA.MBU/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Pengembalian Berkas/SPJ Rampung dan Sisa Belanja. SE tersebut masih belum mengatur klausul sanksi bagi pelaksana anggaran yang tidak mematuhi aturan internal mengenai batas waktu penyampaian. Pada poin 2.d hanya menyatakan bahwa kelalaian terhadap norma waktu atas pelaksanaan pengembalian berkas/SPJ rampung beserta pengembalian sisa belanja akan menjadi bahan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan.	1	-							Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. SE yang mengatur klausul sanksi bagi pelaksana anggaran yang tidak mematuhi aturan internal mengenai batas waktu penyampaian dan bukti pengembalian sisa pertanggungjawaban, belum diterima.		

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Semester II 2020 Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN NOMOR SE-1/KPA.MBU/07/2020 Tentang Norma Waktu Penyampaian Berkas Ramping dan Pengembalian Sisa Belanja Kegiatan di Lingkungan Kementerian BUMN k yang pada poin E.5 telah mengatur mengenai sanksi pelanggaran ketentuan atas norma waktu tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi oleh KPA.									Diusulkan sesuai per Semester II 2020	
3	Tujuh BUMN Belum Menyampaikan Laporan PKBL dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan Belum Teridentifikasi Minimal sebesar Rp19.748.967.054,00	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputy Infrastruktur Bisnis, khususnya Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk : a. Meminta BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL untuk segera menyampaikan dan meng-upload di portal PKBL; dan	1	-	PTL Semester II 2019 1. Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN kepada Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, yang menginstruksikan agar meminta BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL untuk segera menyampaikan dan meng-upload di portal PKBL, dan menginstruksikan seluruh BUMN agar melakukan penatausahaan atas dana Program Kemitraan yang disalurkanannya. 2. Nota Dinas Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis kepada Sekretaris Kementerian BUMN Nomor ND-973/D7.MBU/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 3. Surat Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis kepada Direktur Utama BUMN Nomor S-966/MBU/D7/ 09/2019 tanggal 4 September 2019 tentang teguran penyampaian laporan PKBL Periode Triwulan II Tahun 2019. 4. Bukti upload di portal PKBL dari Perum Perhutani, PT Adhi Karya (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Timah Tbk. PTL Semester I 2020 1. Tanda Terima Pelaporan Elektronik portal PKBL no TPE-2628 tanggal 22 Mei 2020 atas LK PKBL PT Asuransi Jiwasraya 31 Des 2018 audited 2. Tanda Terima Pelaporan Elektronik portal PKBL no TPE-2215 tanggal 10 Des 2019 atas LK PKBL PT PTPN III 31 Des 2018 audited	1	-							Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019, PT Jiwasraya dan PTPN III belum menyampaikan Laporan PKBL ke KBUMN. Diusulkan belum sesuai per Semester I 2020	
				b. Menginstruksikan BUMN agar melakukan penatausahaan atas dana Program Kemitraan yang disalurkanannya.	1	-	PTL Semester II 2019 Surat Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis kepada Direksi BUMN yang Membidangi PKBL Nomor S-1154/MBU/D7/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK BPK Terkait Angsuran Tidak Teridentifikasi Program Kemitraan BUMN, agar melakukan penatausahaan Program Kemitraan dengan lebih baik diantaranya dengan cara: 1. Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi secara menyeluruh atas angsuran Mitra Binaan yang belum teridentifikasi. 2. Bekerjasama dengan Himbara dalam hal penyediaan fasilitas Virtual Account yang dapat dimanfaatkan pada mekanisme penerimaan pengembalian pinjaman Mitra Binaan sehingga tidak lagi ditemukan permasalahan angsuran Mitra Binaan tidak teridentifikasi pada masa mendatang. 3. Melakukan sosialisasi kepada Mitra Binaan lama agar melakukan konfirmasi setelah melakukan angsuran pinjaman dan atau merubah cara pembayaran dari sebelumnya dengan cara transfer ke rekening Program Kemitraan menjadi pembayaran melalui virtual account. Dokumentasi / laporan penatausahaan Program Kemitraan atas angsuran yang tidak teridentifikasi belum diterima.	1	-							Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Dokumentasi / laporan penatausahaan Program Kemitraan atas angsuran yang tidak teridentifikasi belum diterima.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							PTL Semester I 2020 Surat Dirut PT JIEP no CP.00/329/II/2020 tanggal 5 Feb 2020 perihal laporan progress angsuran belum teridentifikasi yang menyatakan: 1. telah berupaya melakukan penelusuran angsuran yang teridentifikasi melalui piutang lancar; 2. menyampaikan surat kepada Bank Mandiri cabang Pulogadung namun PT Bank Mandiri hanya dapat memberikan keterangan terkait lokasi pembayaran; 3. menginformasikan rincian angsuran belum teridentifikasi dalam surat tagihan kepada seluruh mitra binaan namun belum mendapat konfirmasi dari mitra binaan; 4. akan terus berupaya secara intensif melakukan penelusuran lebih lanjut kepada mitra; 5. menggunakan sistem pembayaran <i>virtual account</i> untuk mitra binaan baru.										Diusulkan belum sesuai per Semester I 2020.	
							PTL SMT II 2020 Akan mengundang Kedeputian Teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi. Akan mengundang BUMN-BUMN terkait untuk penyelesaian angsuran tak teridentifikasi. Deputi Infrastruktur Bisnis dan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah meminta BUMN agar tepat waktu dalam melaporkan PKBL, lebih cermat dalam menatausahakan dana PKBL terutama dalam mengidentifikasi pengembalian dana sesuai Mitra Binaan melalui beberapa surat. Di antaranya adalah: 1. S-178/MBU/DSI/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penatausahaan Program Kemitraan Terkait Angsuran Belum Teridentifikasi; 2. S-10/D7.MBU.3/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal Permintaan Penatausahaan Program Kemitraan terkait Angsuran Belum Teridentifikasi 3. S-9/DSI.MBU.B/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permintaan Penatausahaan Program Kemitraan terkait Angsuran Belum Teridentifikasi Catatan Tim PTL: Temuan dan rekomendasi sejenis juga dapat dilihat di temuan dan rekomendasi SPI No. 3 LK TA 2019										Diusulkan Sesuai per Semester II 2020	
KEPATUHAN																		
1	Kementerian BUMN Terlambat Menerima Pembayaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Sebesar Rp1.835.029.708,00	1		a. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar lebih tegas menjalankan ketentuan pemanfaatan BMN termasuk ketentuan pembayaran sewa, dan menambahkan klausul denda keterlambatan pembayaran dalam perjanjian sewa BMN di lingkungan KBUMN	1	-	PTL Semester II 2019 Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018; Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi.	1		-							Diusulkan sesuai per Semester II 2019	
				b. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan agar lebih cermat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan kantor KBUMN	1	-	PTL Semester II 2019 Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018; Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi.	1		-							Diusulkan sesuai per Semester II 2019	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Kementerian BUMN Belum Mengenaikan Hukuman Disiplin dan Pemotongan Tunjangan Kinerja atas Akumulasi Ketidakhadiran Pegawai	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Para Kepala unit kerja agar menegur dan memerintahkan atasan langsung para pegawai yang melanggar disiplin jam kerja agar: 1) meningkatkan pengawasan disiplin kerja bawahannya; dan 2) segera melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin jam kerja serta memprosesnya sesuai ketentuan SDM yang berlaku	1	-	PTL Semester II 2019 1. Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018; Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi. 2. Nota Dinas Kepala Biro PSDMO ke Semua Kepala Unit Kerja tanggal 27 Agustus 2019, perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS Kementerian BUMN Tahun 2018, Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2019 - ND-230/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep Bidang Usaha Agro dan Farmasi II - ND-231/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep Bidang Usaha Agro dan Farmasi I - ND-232/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep ELKP II - ND-233/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Biro Umum dan Humas - ND-234/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep ELKP I - ND-235/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep JKJSK I - ND-236/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep PISM II - ND-237/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep PISM I - ND-238/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep KSPP III - ND-239/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Biro Hukum - ND-240/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep KSPP II - ND-241/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep KSPP I - ND-242/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN - ND-243/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep TJSL - ND-244/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Restrukturisasi - ND-245/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep MSE - ND-246/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep DTI - ND-247/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Inspektorat - ND-248/S.MBU.1/ 8 /2019 kepada Asdep Layanan Hukum	1	-								Diusulkan sesuai per Semester II 2019	
				BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Pengelola Kinerja Pegawai (PKP) yang terdiri dari unsur Bagian Manajemen SDM, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja serta Inspektorat agar lebih cermat melakukan monitoring penyampaian capaian SKP bulanan seluruh PNS KBUMN	1	-	PTL Semester II 2019: 1. Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018; Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi. 2. Lima Notulen Rapat pengelolaan kinerja pegawai (Risalah Rapat Realisasi SKP Bulanan), diselenggarakan pada Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2019; pegawai a.n.: a. Agus Supriatno (Analisis Data BUMN) b. Ahmad Bambang (Deputi KSPP) c. Hari M. Rochim Plt. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Program TJSL II d. M. Zamkhani (Analisis Data BUMN) e. Sitta Izza R. (Analisis Pengembangan Kompetensi)	1	-								Diusulkan sesuai per Semester II 2019	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Kelebihan Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Staf Khusus Menteri sebesar Rp31.043.377,00	1	Rp 35.594.789,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi: a. Melalui PPK I agar: 1) Meminta Staf Khusus II untuk memulihkan kelebihan bayar tunjangan kinerja sebesar Rp26.465.504,00 (Rp35.594.789,00 - Rp9.129.285,00) dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; 2) Membayar kekurangan pembayaran honorarium Staf Khusus Menteri sebesar Rp4.551.412,00;	1	Rp 26.465.504,00	PTL Semester II 2019 1. Menerbitkan Surat kepada Staf Khusus II Sdri. Judith Jubilina D Nomor S-64/S.MBU/10/09/2019 tanggal 11 September 2019; Hal: Hak-Hak Keuangan Staf Khusus II Menteri BUMN Tahun 2018 2. Bukti Pembuatan Tagihan a.n. Parman N. Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp9.129.285,00 (Rp1.250.000,00 + Rp7.879.285,00). 3. Bukti Penerimaan Negara Tanggal. 9 Mei 2019 sebesar Rp9.129.285,00 (NTPN 02A245MNVBDHC7EI) sebelum LHP diserahterimakan ke KBUMN. 4. Bukti Pembuatan Tagihan a.n. Judith Jubilina D. Tanggal 31 Des 2019 sebesar Rp27.559.254,00. 5. Bukti setoran PNBP Tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp27.559.254,00 dengan NTB : 000000354287; NTPN : 476EA7QLTB6JABHC) 6. Pembayaran Honorarium Staf Khusus Menteri BUMN bulan Desember 2018 a.n. Wianda Puspongoro untuk 1 orang berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-245/MBU/11/2017 tanggal 17 November 2017. Pembayaran melalui SPM No 00739/606538/2019 tanggal 27 Desember 2019; SP2D No. 190191301083789 tanggal 27 Desember 2019; sebesar Rp4.375.000,00	1	Rp 26.465.504,00								Diusulkan sesuai per Semester II 2019	Rp 36.688.539,00
				b. Memberi sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK I dan PPABP agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan lebih cermat melakukan pengujian daftar tunjangan dan honor.	1	-	PTL Semester II 2019 1. Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018; Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi (Teguran/instruksi kepada PPK1 dan PPABP agar mengikuti ketentuan dan lebih cermat) 2. Keputusan KPA KBUMN No 01/KPA.MBU/ Q1 /2018 dan Keputusan KPA KBUMN No 01/KPA.MBU/ Q1 /2019; dimana telah dilakukan penggantian PPK 1 dan PPABP Periode 2018 TMT Januari 2019, yaitu: PPK 1 2018 a.n Erwin Fajrin PPK 1 2019 a.n Anisa Damayati PPABP 2018 a.n. Mayang Kirana Jannatin PPABP 2019 a.n. Adnan Putra Haidar PTL Semester I 2020 Memo Sesmen selaku KPA kepada PPK 1 Tahun 2018, PPK 3 Tahun 2018, PPABP Tahun 2018, dan PPSPM Tahun 2018 no MO-1/KPA.MBU/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal teguran menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Tahun 2018	1	-								Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Bukti sanksi kepada PPK 1 dan PPABP belum disampaikan ke BPK. Diusulkan sesuai per Semester I 2020	
4	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Housekeeping, Keamanan, dan Pengemudi Karena Belum Memperhitungkan Realisasi Volume Pengemudi dan Nilai PPN sebesar Rp107.487.700,00	1	Rp 107.487.700,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas: a. melalui PPK 3 agar meminta PT PI untuk memulihkan kelebihan bayar sebesar Rp107.487.700,00 dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK	1	Rp 107.487.700,00	PTL Semester II 2019 1. Memorandum Sekretaris kepada PPK 3 Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 agar meminta PT PI untuk memulihkan kelebihan bayar sebesar Rp107/489.700 dan menyetorkannya ke kas negara. 2. Bukti setor Tanggal 7 Nov 2019 sebesar Rp65.808.792 (NTPN 5C97D2G4UBKHCKD). Kurang setor sebesar RpRp41.678.908. PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan Surat UND-46/S.MBU.C/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 Hal : Pembahasan tindak lanjut temuan BPK tahun 2018 PT Provinces Indonesia. Risalah pembahasan hasil pelaksanaan pertemuan di juni 2021 belum diterima. Dimonitor hingga sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp41.678.908,00 di setor ke kas negara.		Rp 65.808.792,00	1	Rp 41.678.908,00						Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Kurang setor sebesar Rp41.678.908 Diusulkan belum sesuai per Semester I 2021. Dimonitor hingga bukti setor ke kas negara sebesar Rp41.678.908,00 diterima.	Rp 65.808.792,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							PTL Semester II Tahun 2021 a. Surat Undangan Rapat Kepala Biro Umum & Humas Kementerian BUMN kepada Inspektorat Kementerian BUMN, PPK 3 Kementerian BUMN, Kepala KPP Jakarta Gambir I, dan Manager PT Provinces Indonesia dengan nomor UND-280/S.MBU.3/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pembahasan Temuan Hasil Audit BPK tentang Kelebihan Pembayaran PT Provinces Indonesia b. Risalah Rapat tanggal 6 November 2019 pada Ruang Rapat Biro Umum dan Humas, Lt. 3 Gd Kementerian BUMN tentang Pembahasan Tindaklanjuti Temuan BPK-RI atas Kelebihan Pembayaran pada PT Provinces										Diusulkan belum sesuai. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. Masih terdapat kelebihan bayar senilai Rp41.678.908,00 yang belum disetorkan ke kas negara dan salinan bukti setor belum diserahkan kepada BPK	
							PTL per Agustus 2022 1. Surat Kepala KPP pratama Jakarta Gambir Satu kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker KBUM No. S-482/KPP.0601/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa: a. Penggantian faktur atas NPWP satker lama yaitu 00.355.513.3-025.000 tidak dapat dilakukan karena NPWP tersebut sudah dihapuskan dan berstatus aktivasi sementara. b. Penggantian tahun faktur pajak yang diinput dan berdampak pada denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disarankan untuk dikonsultasikan ke KPP dimana rekanan terdaftar karena pengawasan kewajiban perpajakan rekanan tersebut dilakukan oleh KPP rekanan terdaftar. 2. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Keuangan kepada Inspektur KBUMN No. ND-177/S.MBU.C/07/2022 Tanggal 29 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa PT Provinces Indoensia telah memenuhi kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp65.808.792 ke kas negara. Sedangkan kelebihan PPN sebesar Rp41.678.902 secara teknis sulit ditindaklanjuti karena merupakan pengalihan pendapatan negara yang kewenangannya berada pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran. Sesuai Surat Kepala KPP Gambir I Jakarta, kontrol utama penyelesaian permasalahan tersebut adalah adanya inisiatif PT Provinces Indonesia untuk memproses lebih lanjut ke KPP bersangkutan, namun terdapat risiko pengenaan denda. Dan PT Provinces Indonesia berpotensi tidak bersedia menanggung denda tersebut. Hal tersebut diluar kendali KBUMN. 3. Surat Plt. Sekretaris Menteri BUMN a.n. Menteri BUMN kepada Anggota VII BPK RI No. S-265/MBU/S/08/2022 Tanggal 25/08/2022 tentang Permohonan Penetapan Status TDD atas LK TA 2018. Tim PTLHP berpendapat PT Provinces Indonesia belum sesuai menindaklanjuti saran dari Kepala KPP Pratama Gambir I Jakarta No. S-482/KPP.0601/2022 Tanggal 12 Juli 2022 untuk berkonsultasi ke KPP dimana PT Provinces Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak. Keberatan atas potensi denda keterlambatan kewajiban pelaporan pajak PT Provinces Indonesia seharusnya dinyatakan secara tertulis oleh PT Provinces Indonesia setelah konsultasi tersebut dilakukan, sehingga menjadi dasar pertimbangan Menteri BUMN sebelum mengajukan usulan status TDD atas rekomendasi ini.									Diusulkan belum sesuai. Dipantau upaya tuntas PT Provinces Indonesia menindaklanjuti saran dari Kepala KPP Pratama Gambir I		

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				b. untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dan PPSPM agar lebih cermat mengidentifikasi jenis penerimaan.	1	-	PTL Semester II 2019 Memorandum Sekretaris kepada PPK 3 Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan. Memo tersebut juga ditujukan kepada PPSPM agar lebih cermat mengidentifikasi jenis penerimaan. <i>Bukti sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 dan PPSPM belum disampaikan ke BPK.</i> PTL Semester I 2020 Memo Sesmen selaku KPA kepada PPK 1 Tahun 2018, PPK 3 Tahun 2018, PPABP Tahun 2018, dan PPSPM Tahun 2018 no MO-1/KPA.MBU/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal teguran menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Tahun 2018	1	-								Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Bukti sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 dan PPSPM belum disampaikan ke BPK. Diusulkan sesuai per Semester I 2020	
5	Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp9.805.927.751,00 Mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran KBUMN TA 2018 Tidak Mencerminkan Kegiatan Sesuai Jenis Belanja	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi memerintahkan: 1) Penanggungjawab pelaksana anggaran Biro Umum dan Humas, Biro Hukum, Asdep Data dan Teknologi Informasi, Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN dan Bidang Data dan Riset, Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Keasdepan Layanan Hukum, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, dan Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha lebih memperhatikan ketentuan penganggaran dan melakukan penelaahan ulang atas penganggaran belanja; 2) Tim penyusun anggaran dhi. Subbagian Perencanaan dan Anggaran lebih cermat dalam menelaah usulan anggaran belanja dari user/unit pengusul; BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN agar memerintahkan Inspektur Kementerian BUMN agar lebih cermat dalam melaksanakan reviu dokumen usulan anggaran kementerian	1	-	PTL Semester II 2019 Memorandum Sekretaris Nomor MO-2/S.MBU/10/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 kepada: 1. Penanggungjawab pelaksana anggaran Biro Umum dan Humas, Biro Hukum, Asdep Data dan Teknologi Informasi, Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN dan Bidang Data dan Riset, Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Keasdepan Layanan Hukum, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, dan Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha agar lebih memperhatikan ketentuan penganggaran dan melakukan penelaahan ulang atas penganggaran belanja. 2. Tim penyusun anggaran dhi. Subbagian Perencanaan dan Anggaran agar lebih cermat dalam menelaah usulan anggaran belanja dari user/unit pengusul. PTL Semester II 2019 1. Memorandum Sekretaris Nomor MO-2/S.MBU/10/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 kepada Inspektur agar lebih cermat dalam melaksanakan reviu dokumen usulan anggaran kementerian. 2. Memorandum Inspektur Nomor MO-1/ANSPT.MBU/11/2019 tanggal 7 November 2019 kepada para Auditor dan Pengolah Bahan LHA agar lebih cermat dalam melaksanakan reviu dokumen usulan anggaran kementerian.	1	-							Diusulkan sesuai per Semester II 2019		
6	Terdapat Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alat Penguat Sinyal HT (Repeater) yang Belum Selesai	1		BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas Melalui PPK 3 agar meminta CV DAP segera menyelesaikan perijinan ISR dan membayar BHP spektrum frekuensi radio untuk 1 tahun	1	-	PTL Semester II 2019 1. Memorandum Sekretaris Nomor MO-2/S.MBU/10/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 kepada PPK 3 agar meminta CV DAP segera menyelesaikan perijinan ISR dan membayar BHP spektrum frekuensi radio untuk 1 tahun. 2. Surat Direktur CV Dian Alpha Perkasa Nomor 01/SK/DAP/1/2019 tanggal 6 Januari 2020 kepada Kepala Biro Umum dan Humas KBUMN yang menerangkan bahwa penerbitan perijinan ISR masih dalam menunggu tersedianya frekuensi dari pihak Kominfo. Dipantau hingga terbit perijinan ISR dan pembayaran BHP spektrum frekuensi radio selesai. Bukti ijin dan setor disampaikan ke BPK.			1	-					Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Dipantau hingga terbit perijinan ISR dan pembayaran BHP spektrum frekuensi radio selesai. Bukti ijin dan setor disampaikan ke BPK.		

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							PTL Semester I 2021 Ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : S37/S.MBU.C/04/2021 kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika c.q Direktur Operasi Sumber Daya, tanggal 15 April 2021 Perihal : Permohonan Izin Stasiun Radio 10 Tahunan. PTL Semester II Tahun 2021: Screen capture/foto tampilan layar komputer (laptop) atas korespondensi perizinan stasiun radio yang berupa email pada tanggal 18 Juli 2019 dari perizinan-istr@mail.ditfrek.postel.go.id tentang Request Rejection "0727619" yang menjelaskan bahwa Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak ada ketersediaan kanal frekuensi. Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Direktorat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Perangkat Pos dan Informatika. PTL per Agustus 2022 Surat CV Dian Alpha Perkasa kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan KBUMN No. 01/SK/I/DAP/2022 Tanggal 19/01/2022 yang menjelaskan bahwa pengurusan ijin frekuensi radio repeater milik KBUMN sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kominfo. Turut dilampirkan screenshot pengajuan terakhir Tanggal 01/10/2019 pada aplikasi Kominfo.										Dipantau sampai Ijin ISR diterbitkan dan pembayaran BHP spektrum frekuensi radio selesai. Bukti ijin dan setor disampaikan ke BPK.	
				BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas Untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 dan PPHP agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan.	1	-	PTL Semester II 2019: Memorandum Sekretaris Nomor MO-2/S.MBU/10/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 kepada PPK 3 dan PPHP agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan. Bukti sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 dan PPHP belum disampaikan ke BPK. PTL Semester I 2021 Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN No. MO-4/S.MBU/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 kepada : 1. Kepala Biro Umum dan Keuangan; 2. Pejabat Pembuat Komitmen 3 Tahun Anggaran 2018; 3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2018. Perihal teguran menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2018, yang memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, agar Kepala Biro Umum dan Keuangan menunjuk PPK 3 yang baru untuk dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan.	1	-								Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Bukti sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 dan PPHP belum disampaikan ke BPK.	
																Diusulkan Sesuai		
	Jumlah	9	Rp 143.082.489,00		18	Rp 133.953.204,00		16	Rp 92.274.296,00	2	Rp 41.678.908,00	0	Rp -	0	Rp -		Rp 102.497.331,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022

LHP ATAS PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) TUNAI TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SEMBILAN BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN PROGRAM KEDAULATAN PANGAN, PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) TUNAI TAHUN ANGGARAN 2015 PADA TIGA BUMN PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN, KONVERSI UTANG RDI DAN SLA MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) NON TUNAI TAHUN 2015 DAN 2016 PADA DELAPAN BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN.

No.	Judul Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Tidak Ada Kategori Temuan (NULL)																		
1	Kebijakan penggunaan investasi dan modal kerja belum mendukung tujuan PMN	1		a. Kementerian Keuangan agar lebih cermat dan disiplin dalam pencairan dana PMN kepada BUMN sesuai jadwal (time frame) yang ditentukan dalam kajian bersama;	1		- TL per Juli 2017 KBUMN (dhi Deputi terkait) akan mengundang Kemenkeu untuk membahas teknis pencairan dana PMN di masa akan datang PTL Semester II 2020: Belum ada dokumen TL yang disampaikan KBUMN kepada BPK. TL rencana KBUMN (dhi. Deputi terkait) yang akan mengundang Kemenkeu untuk membahas teknis pencairan dana PMN di masa akan datang berdasarkan PTL per Juli 2017, belum disampaikan ke BPK. Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Kemenkeu sudah lebih cermat dan disiplin mencairkan dana PMN kepada BUMN sesuai jadwal yang ditentukan dalam kajian bersama, belum ada. PTL Semester I 2021 Akan diajukan TDD karena rekomendasi BPK ditujukan untuk Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian BUMN (tidak relevan untuk menindaklanjuti temuan tsb). Selain itu, Proses pencairan PMN melibatkan banyak pihak terkait, sehingga terdapat beberapa tahapan yang dinilai uncontrollable bagi Kementerian BUMN. Salah satunya pada saat proses penerbitan PP yang perlu melalui proses lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, Kementerian teknis dan BUMN terkait. Setelah PP terbit, dana PMN belum tentu langsung dapat dicairkan. Hal tersebut karena Kementerian Keuangan perlu melihat kembali ketersediaan dana pada APBN. Sehingga seringkali kita temui pencairan dana PMN terjadi di akhir tahun, meskipun secara kajian seharusnya dicairkan di pertengahan tahun. Saran: diberikan tambahan penjelasan (kendala), alur perencanaan s.d pencairan PTL Semester II 2021 Akan diajukan TDD karena rekomendasi BPK ditujukan untuk Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian BUMN (tidak relevan untuk menindaklanjuti temuan tsb). Selain itu, proses pencairan PMN melibatkan banyak pihak terkait, sehingga terdapat beberapa tahapan yang dinilai uncontrollable bagi Kementerian BUMN. Salah satunya pada saat proses penerbitan PP yang perlu melalui proses lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, Kementerian teknis dan BUMN terkait. Setelah PP terbit, dana PMN belum tentu langsung dapat dicairkan. Hal tsb karena Kementerian Keuangan perlu melihat kembali ketersediaan dana pada APBN. Sehingga seringkali kita temui pencairan dana PMN terjadi di akhir tahun, meskipun secara kajian seharusnya dicairkan di pertengahan tahun. Keasdepan Bidang Keuangan: Secara tupoksi, KBUMN sudah menjalankan hal tsb.		1	-					Diusulkan Belum Sesuai per Semester II 2020		Diusulkan Belum Sesuai per Semester I 2021 Surat usulan TDD belum diterima.	
				b. Kementerian BUMN agar segera menyusun dan menetapkan Juknis atas Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN;	1		- TL Per Juli 2017 a. Permen MBUMN No PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Tambahan PMN kepada BUMN dan PT b. KBUMN masih akan mendiskusikan apakah dimungkinkan diatur lebih lanjut ketentuan mgn perubahan penggunaan tambahan dana PMN dalam bentuk juknis PTL Semester II 2020 Bukti TL berupa Juknis atas Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN belum disampaikan ke BPK PTL Semester I 2021 Kementerian BUMN telah mengatur mengenai pedoman perubahan penggunaan tambahan dana PMN pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang tercantum dalam BAB V tentang Perubahan Penggunaan Tambahan PMN dan BAB VI tentang Ketentuan Lain-Lain, yakni pada pasal 9, 10, dan 11.	1							Dipantau s.d Juknis atas Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN telah ditetapkan		Diusulkan Belum Sesuai per Semester II 2020 Diusulkan Sesuai per Semester I 2021	
				c. Kementerian BUMN agar memerintahkan Direktur Utama BUMN, untuk: 1) Membuat roadmap per komoditi dan merevisi sesuai roadmap BUMN 2015-2019; 2) Merancang strategi leverage dana PMN agar tercapainya perputaran/ revolving modal kerja dan investasi secara optimal; 3) Membuat manajemen kinerja keuangan dan operasional dana PMN Tahun 2015 secara tegas tanpa bercampur dengan kegiatan non PMN; 4) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) perputaran/ revolving modal kerja yang bersumber dari dana PMN Tahun 2015; 5) Memperbaharui asumsi bisnis dalam kajian feasibility study untuk kegiatan investasi agar dapat segera dilaksanakan sesuai esensi pemanfaatan dana PMN dalam kajian	1		- PTL Semester I 2021 Seluruh Roadmap dan SOP telah disampaikan. Keasdepan IPP bersama Inspektorat akan menyusun check list hasil reu yang menggambarkan sudah/belum terpenuhinya lima rekomendasi BPK per BUMN. PTL Semester II 2021 Seluruh Roadmap dan SOP telah disampaikan. Keasdepan IPP bersama Inspektorat akan menyusun check list hasil reu yang menggambarkan sudah/belum terpenuhinya lima rekomendasi BPK per BUMN.	1		-					Roadmap pada PT Pertani dan check list sesuai rekomendasi pada SHS, PT Garam, Pertani dan BULOG Diusulkan Belum Sesuai per Semester II 2020 Diusulkan Belum Sesuai per Semester I 2021 Dipantau sampai dengan checklist hasil reu diterima.		Diusulkan belum sesuai Disarankan agar menyampaikan check list hasil reu yang menggambarkan sudah/belum terpenuhinya lima rekomendasi BPK per BUMN.	

No.	Judul Temuan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa		Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti		Tindak Lanjut dengan alasan yang sah		Keimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Negara/ Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Judul	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1		3	4	5	6	7	PTL Semester I 2019 Roadmap PT Peranti (Persero) untuk Komoditi Perikanan dan Perikanan dan Strategi Leverage Pengawasan PMS Tahun 2015 c. Memeriksa rekening giro khusus PMN yang digunakan untuk bayar gaji pegawai sebesar Rp5.265.904.612,50.	1	Rp 5.265.904.612,50	1	Rp 5.265.904.612,50			15	16	17 Diusulkan sesuai per Semester I 2019	Rp 5.265.904.612,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Dana PMN untuk modal kerja PT SHS direalisasikan untuk membayar hutang kepada petani sebesar Rp 4.547.414.000,00 dan proses verifikasi atas tagihan pembayaran benih menimbulkan waktu lama sehingga kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp53.036.969.968,61	1	Rp 4.547.414.000,00	a. Melakukan evaluasi atas Pedoman Operasional Ikuti (POB) pembelian benih; b. Membuat SOP perhitungan modal kerja pengadaan benih sebanyak 82.000 ton dalam setahun; c. Mengkaji skema penyelesaian utang kepada petani dan mitra sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan;	1		- PTL per Juli 2017 a. Surat Deputi IAF ke Direksi Perum PERTANI No S-14/MB/UD/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tindak lanjut BPK b. Surat penyempurnaan tanggapan dan rencana aksi dari Direksi SHS kepada Deputi IAF No 285/SHS/01/II/2017 Tanggal 17 Feb 2017 c. Bukti setor pengisian ke rek khusus PMN belum diserahkan d. Revisi/aksi mesin dan bangunan belum dilakukan PTL per April 2018 - POB Nomor 34/DIR/SHS/01/Kep-02/2018 tentang pedoman operasional buku perhitungan tambahan dana Penyerahan Modal Negara PT SHS - PTL per Juli 2017 a. Surat Deputi IAF ke Direksi Perum PERTANI No S-14/MB/UD/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tindak lanjut BPK b. Surat penyempurnaan tanggapan dan rencana aksi dari Direksi SHS kepada Deputi IAF No 285/SHS/01/II/2017 Tanggal 17 Feb 2017 PTL Semester II 2020: Kepala SP PT SHS menjelaskan bahwa mengingat kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik pada tahun 2015 dan 2016 (ekuitas negatif) maka perusahaan telah melaksanakan strategi penyelesaian hutang sebagai berikut: • Penyelesaian hutang PT SHS kepada petani dilakukan melalui skema net off antara utang dgn piutang (mekanisme non cash) • PT SHS telah membentuk tim pengajian hutang untuk memperbaiki cashflow dalam rangka percepatan penyelesaian utang • PT SHS telah melakukan dan terus mengupayakan restrukturisasi dan penjadwalan kembali atas utang yang ada, khususnya kepada perbankan, mitra kerja bumn dan swasta dalam rangka perbaikan cashflow untuk percepatan penyelesaian utang kepada petani PTL Semester II 2020 a. Surat GM KPKS kepada Direktur Keuangan & SDM PT SHS No. 832/GM/SHS/KPKS-VII/2020 Tanggal 27 Agt 2020 tentang Laporan Rekapitulasi Penyelesaian Net-off Hutang QRP KR 3 dengan Puitang Sewa Lahan di KPKS per 25 Agt 2020 sebesar Rp11.237.837.384; b. Memo Auman Anggaran dan Hutang Puitang kepada GM KPKS dan Manager Keuangan & SDM KPKS No. 018/SHS/KPKS/02/02/VIII/2020 Tanggal 25 Agt 2020 tentang Pengajuan Net-Off Hutang Puitang Tahun 7; c. Laporan Rekapitulasi Penyelesaian Net-Off Hutang QRP UBR 1 dengan Puitang Sewa Lahan KPKS per 25 Agt 2020; d. Keputusan Direksi PT SHS No. K20-202/DIR/SHS/01/V/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Tim Pengajian hutang tahun 2019-2020 PT SHS (Persero); e. Surat Tugas Plt. Direktur Keuangan dan SDM PT SHS No. ST-39/DIR/SHS/02/VIII/2020 f. Surat Tugas GM KPKS No. ST 08/GM/SHS/KPKS-VII/2020 g. Addendum Perjanjian Kredit Agunan Kas No. B.KC-XV/ADK/04/2019 Tanggal 25 April 2019 PTL Semester II 2020 a. Tim PTL belum dapat mengaktifkan bukti TL yang disampaikan terkait Skema Penyelesaian Utang Puitang secara Net-Off karena PT SHS belum menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk verifikasi dan validasi data ke GM KPKS dan KAF terkait Penyerahan dan Validasi Data. b. Tim PTL belum mendapatkan penjadwalan dari PT SHS atas rencana bukti TL berikut ini dengan permasalahan dan rekomendasi, yaitu: 1). Addendum Perjanjian Kredit Agunan Kas No. B.KC-XV/ADK/04/2019 Tanggal 25 April 2019; 2). Perjanjian Kredit Agunan Kas No. 13/2017 Tanggal 31 Maret 2017; 3). Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (NON) FSO No. 17/2017 Tanggal 30 Mei 2017;	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.	Jadwal Temuan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Kumpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Negara/ Daerah					
	Judul	Jud	Nilai	Uraian	Jud	Nilai	Jud	Nilai	Jud	Nilai	Jud	Nilai	Jud	Nilai										
1		2	3	4	5	6	7	PTL Semester I 2021 Direksi PT SHS telah menyampaikan Surat No. 377/DIR-SHS/01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 kepada penyandang otoritas pemenuhan utang dan strategi leverage penggunaan dana PMN, yang pada intinya ditanggapi oleh: PT SHS melaksanakan penyelesaian hutang kepada petani dengan skema nett off, khususnya di kantor produksi Kebun Sakmandi Subang. PT SHS telah mengikapi dokumen dalam hutang SHS kepada petani dan dalam rangka petani kepada PT SHS disertai dengan nomor kontraknya masing-masing, serta Bukti Berita Acara Kesepakatan Net Off. PTL per Juli 2017 a. Surat Depusi IAF ke Direksi Perum PERTANI No S-114/MBU/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tidak lanjut BPK. b. Surat penyampaian tanggapan dan rencana aksi dari Direksi SHS kepada Depusi IAF No 283/SHS/01/II/2017 Tanggal 17 Feb 2017 c. Bukti setor penggantian ke rek khusus PMN belum diserahkan d. Revisi/aksi mesin dan bangunan belum dilakukan TL Semester II 2020 Keputusan Direksi PT SHS No. 34/DIR-SHS/01/Kps-12018 Tanggal 19 Februari 2018 tentang Pedoman Operasional Baku Perawatan Tambahan Dana PMN PT SHS (Penero) yang mencakup Keputusan Direksi PT SHS sebelumnya No. 87/SHS/01/Kps/IV/2017 yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Keputusan Direksi PT SHS No. 34/DIR-SHS/01/Kps-II/2018 Tanggal 19 Februari 2018 tidak melaksanakan strategi leverage yang direkomendasikan BPK. Pengaturan leverage yang tidak ada, demikian juga kajian strategi dan target output berupa optimalisasi kemampuan modal tidak ada. Keputusan tersebut lebih banyak berisi intung prosedur pembayaran, bukan strategi leverage. PTL Semester I 2021 Asas pengisian dana PMN per komoditi memiliki dampak yang positif setelah tahun 2015 yaitu kinerja 2016 - 2018, penilaian mengalami penurunan dikarenakan program subsidi bensin sudah tidak ada lagi, sehingga penilaian menggunakan free market. Sesuai penjelasan dan data tambahan dari Direksi PT SHS sebagaimana surat Direksi PT SHS No. 377/DIR-SHS/01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 Penjelasan belum menjelaskan strategi leverage penggunaan Dana PMN supaya kemampuan modal dapat optimal. PTL Semester II 2021 Asas pengisian dana PMN per komoditi memiliki dampak yang positif setelah tahun 2015 yaitu kinerja 2016 - 2018, penilaian mengalami penurunan dikarenakan program subsidi bensin sudah tidak ada lagi, sehingga penilaian menggunakan free market. Sesuai penjelasan dan data tambahan dari Direksi PT SHS sebagaimana surat Direksi PT SHS No. 377/DIR-SHS/01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 PTL per Agustus 2022 Tidak ditindaklanjuti dengan Laporan realisasi penggunaan PMN TW IV 2021 kepada Menteri BUMN PTL per Juli 2017 a. Surat Depusi IAF ke Direksi Perum PERTANI No S-114/MBU/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tidak lanjut BPK. b. Surat penyampaian tanggapan dan rencana aksi dari Direksi SHS kepada Depusi IAF No 283/SHS/01/II/2017 Tanggal 17 Feb 2017 c. Bukti setor penggantian ke rek khusus PMN belum diserahkan d. Revisi/aksi mesin dan bangunan belum dilakukan TL Semester II 2020 Belum ada bukti pemeliharaan rekening khusus PMN sebesar Rp4.547.414.000,00 PTL Semester II 2021 - Dana tersebut bukan penggunaan langsung untuk pembayaran hutang. PT SHS telah memberikan tanggapan kepada Kementerian BUMN pada tahun 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa PT SHS tidak menggunakan dana PMN secara langsung untuk melaksanakan pembayaran kewajiban hutang kepada petani, melainkan menggunakan "dana hasil penjualan bensin baik dari penjualan subsidi bensin maupun penjualan BLB serta free market yang modalnya bersumber dari dana PMN. - PT SHS sampai dengan saat ini tidak melakukan pemeliharaan rekening khusus dana PMN tersebut. Ketragas: Dana tersebut merupakan dana escrow account BSI Bpk. Ahmad Sumadin - akan di koordinasikan dengan internal SHS	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Disetujui sesuai per Semester I 2021	Disetujui sesuai per Semester II 2020	Disetujui sesuai per Semester II 2021	Disetujui sesuai per Agustus 2022	Disetujui hasil verifikasi dan berita realisasi penggunaan dana PMN sebesar Rp4.547.414.000,00	Disetujui sesuai per Semester II 2020	Disetujui sesuai per Semester II 2021 Tambahan dokumen yang perlu ditinjau: 1. Surat Direksi SHS tahun 2017 2. Mekanisme alur penggunaan dana 4,5 M (pemeliharaan bensin dan), dan evidence tambahan 3. Kronologi pada saat proses audit

No.	Judul Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1							PTL per Agustus 2022 a. Laporan realisasi penggunaan PMN TW IV 2021 kepada Menteri BUMN b. Penjelasan Dirut SHS Nomor 1328/DIR/SHS.01/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal TLHP BPK atas penggunaan dana PMN, yang antara lain menyatakan pembayaran hutang ke petani berasal dari uang hasil penjualan benih yang ditampung pada rekening escrow yang berbeda dengan rekening dana PMN c. Rincian penggunaan dan realisasi PMN									Diusulkan sesuai per Agustus 2022	
				f. Segera melaksanakan revitalisasi dan investasi mesin dan bangunan gedung sesuai dengan Kajian Bersama.	1		- Tl. Semester I 2018 - skema penyelesaian hutang : belum ada - strategi leverage : mengacu pada RJP PT SHS tahun 2016 - 2020 pada sasaran dan target pertumbuhan pada poin 5 - rekening : belum ada - revitalisasi dan investasi mesin dan bangunan : telah menyerahkan time schedule invetasi pembangunan 4 pabrik dan progres fisik revitalisasi mencapai 98% (per 29 Maret 2018) sebesar Rp39.409.087.392,00 PTL Semester II 2021 Realisasi penggunaan dana PMN untuk revitalisasi 4 pabrik telah terealisasi secara fisik sebesar 98% dan revitalisasi mesin pertanian telah terealisasi secara fisik sebesar 99%. Keterangan: Realisasi fisik direncanakan akan selesai 100% pada Semester 2 Tahun 2021 Pak Bambang SHS: - sampai semester 2 tahun 2021 belum 100% Pak Akhmad Sumarlin SHS - sisa dana rekening PMN masih sisa sekitar 3 M - awal tahun 2022 untuk yang revitalisasi hampir selesai 100%, sudah terdapat BAST, belum proses pembayaran - untuk investasi hampir selesai 100% dalam proses pembayaran kepada pihak vendor. PTL per Agustus 2022 a. Laporan realisasi penggunaan PMN TW IV 2021 kepada Menteri BUMN b. Penjelasan Dirut SHS Nomor 1328/DIR/SHS.01/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal TLHP BPK atas penggunaan dana PMN, yang antara lain menyatakan investasi pabrik telah selesai 100%, realisasi kegiatan revitalisasi baru 99%, sedangkan revitalisasi mesin belum terealisasi karena ada perubahan manajemen. Direksi akan mengajukan perubahan RAB dan menyelesaikan sesuai prosedur.							Status belum sesuai per Semester I 2018 Dipantau s.d seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan Diusulkan Belum Sesuai per Semester II 2021 Dipantau hingga diperoleh a. Penjelasan pelaksanaan revitalisasi dan investasi (komposisi per masing-masing kegiatan) secara fisik pekerjaan dan dari sisi keuangan. Bila sudah selesai agar dilampirkan bukti pendukungnya. Bila belum selesai, maka dijelaskan terkait hambatan/kendala dan rencana aksi ke depan b. Agar disampaikan Laporan Penggunaan Dana PMN Triwulan IV 2021. Diusulkan belum sesuai. Dimonitor s.d. kegiatan revitalisasi selesai dan diperoleh persetujuan RAB baru.			
5	Pengelolaan modal kerja dan investasi PT Garam (Persero) belum sesuai kajian bersama	1		- a. Membuat SOP perputaran modal kerja pengadaan garam sebanyak 400.000 ton dalam setahun;	1		- PTL per Juli 2017 a. Surat Deputi IAF ke Direksi PT Garam No S-115/MBU/DI/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tindak lanjut BPK PTL per April 2018 Sesuai dengan SOP no 68/D/SK/VI/2016 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyerapan Garam Rakyat PT Garam beserta Lampirannya	1								Dipantau s.d seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan	
				b. Mengkaji strategi leverage penggunaan dana PMN supaya kemampuan modal dapat optimal;	1		- PTL per Juli 2017 a. Surat Deputi IAF ke Direksi PT Garam No S-115/MBU/DI/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tindak lanjut BPK PTL per April 2018 a. Membuat Road Map PT Garam (Persero) b. Membuat Leverage PMN 2015 Penyerapan Garam Rakyat c. Estimasi: Penyelesaian dan Serapan Dana Anggaran PMN Tahun 2015 d. SK Direksi PT Garam (Persero) Nomor 68/D/SK/VI/2016 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyerapan Garam Rakyat PT Garam beserta Lampirannya e. Membuat Leverage PMN 2015 Pembangunan Pabrik Garam Industri	1									
				c. Mempercepat pelaksanaan investasi sesuai kajian bersama;	1		- PTL per Juli 2017 a. Surat Deputi IAF ke Direksi PT Garam No S-115/MBU/DI/02/2017 Tanggal 7 Feb 2017 terkait tindak lanjut BPK PTL per April 2018 Surat No.S-220/MBU/04/2018 perihal persetujuan perubahan kegiatan dan optimalisasi penggunaan tambahan dana PMN tahun 2015 PT Garam (Persero) dengan estimasi progress s/d Des 2018 sebesar 62,38% PTL Semester I 2019 Draft Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMN Tahun 2012 dan 2015 per Triwulan II 2019 PTL Semester I 2021 Penggunaan dana PMN 2015 sd 31 Maret 2021 terealisasi sebesar 99,39% dan dana PMN 2012 sd 31 Maret 2021 terealisasi sebesar 100%. Target realisasi 100% penggunaan dana PMN 2015 direncanakan pada Semester II 2021.			1				Dipantau antara realisasi dengan estimasi progress Diusulkan belum sesuai per Semester I 2019 Diusulkan Belum Sesuai per Semester I 2021 Dipantau hingga laporan realisasi 100% penggunaan dana PMN 2015.			

No.	Judul Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	Keputusan yang ditetapkan	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Keputusan yang ditetapkan (No. 12 tentang tahun)			PTL per April 2018 Kontrak Manajemen antara Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum pemunas dengan Dewan dan Direksi Perum Perumnas tahun 2018 pada pasal 2 yang menyatakan pihak kedua (dhi. Dewan dan Direksi Perum Perumnas) berjanji akan mengupayakan pencapaian target RKAP tahun 2018 tersebut, termasuk target-target KPI berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan indikator restrukturisasi hutang non pokok RDI dengan bobot 4 dengan target tahun 2018 sebesar Rp7,38 M											
15	PT Amarta Karya telah mencatat utang SLA sebagai PMN dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 sebesar Rp32.148.500.537,36 meskipun PP belum diterbitkan	1		a. Mengkoreksi Laporan Keuangan Tahun 2015 sebelum PP diterbitkan;	1		PTL per Juli 2017 PP Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara kedalam modal saham PT Amarta Karya PTL per April 2018 PP Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara kedalam modal saham PT Amarta Karya PTL Semester I 2019 LK Tahun 2017 (audited) PT Amarta Karya telah menyajikan PMN sebesar Rp33.034.001.079. Nilai ini merupakan konversi Piutang Negara kepada perseroan senilai Rp32.148.500.537. Nilai PMN yang disajikan sebelumnya adalah sebesar Rp885.500.542	1	-							Dipantau s.d LK 2015 diterbitkan kembali dipantau menunggu laporan Keuangan PT Amarta Karya yang mengakomodir implementasi PP No. 86 Tahun 2016 Diusulkan sesuai per Semester I 2019		
				b. Pelaksanaan penyelesaian utang non pokok menjadi indikator dalam key performance indicator (KPI) setiap tahun.	1		PTL per Juli 2017 Surat Undangan Inspektur KBUMN kepada Asdep terkait tentang penyelesaian rekomendasi BPK PTL per April 2018 Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara kuasa Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi pada KPI 2017 no. 1.4 yang menyatakan bahwa indikator Keuangan dan pasar diantaranya pembayaran cicilan SLA dengan bobot 6 dengan target 2017 sebesar Rp950 juta	1	-							Dipantau s.d skema penyelesaian hutang dimasukkan dalam KPI		
16	Proses pengajuan Konversi Utang SLA PT Peln telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1		BPK merekomendasikan kepada Direksi PT. Peln agar pelaksanaan penyelesaian utang non pokok menjadi indikator dalam key performance indicator (KPI) setiap tahun.	1		PTL per Juli 2017 Surat Undangan Inspektur KBUMN kepada Asdep terkait tentang penyelesaian rekomendasi BPK PTL Semester II 2017 Draft key performance indicators kontrak manajemen PT Peln (Persero) tahun 2018; kontrak manajemen key performance indicators tahun 2016, dan key performance indicators tahun 2017 PT Peln	1	-							Dipantau s.d skema penyelesaian hutang dimasukkan dalam KPI		
	Jumlah	16	Rp	9.813.318.612,50	43	Rp	9.813.318.612,50	38	Rp	9.813.318.612,50	5	Rp	-	0	Rp	-	Rp	5.265.904.612,50

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Semester I Tahun 2022
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PROGRAM KEGIATAN BL PULDI KEMENTERIAN BUNIN DAN BUNIN-BUNIN PELAKSANA

No	Tindakan Perencanaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Eksternal yang Diperiksa					Tindak Lanjut Internal					Nilai Proyek dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan
	Judul	Nilai	Unit	Judul	Nilai	Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	
a	Program Perencanaan Swas Program Cetak Swas Tidak Dalam Rencana Kerja dan Anggaran	1	4	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUNIN agar: 1. Melakukan kajian awal mengenai kegiatan cetak swas pada PT 315, karena tidak mengkomunikasikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pengendalian dan program cetak swas.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembelian Perbaikan Jala Kontrolasi dan Kontrolasi dan Peralatan Pengendalian Tapa Mengapa pada SCOP Pengendalian Harang dan Jala PT 315	1	4	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUNIN agar: 1. Melakukan kajian awal mengenai kegiatan cetak swas pada PT 315, karena tidak mengkomunikasikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pengendalian dan program cetak swas.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembelian Perbaikan Jala Kontrolasi dan Kontrolasi dan Peralatan Pengendalian Tapa Mengapa pada SCOP Pengendalian Harang dan Jala PT 315	1	4	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUNIN agar: 1. Melakukan kajian awal mengenai kegiatan cetak swas pada PT 315, karena tidak mengkomunikasikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pengendalian dan program cetak swas.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pembelian Perbaikan Jala Kontrolasi dan Kontrolasi dan Peralatan Pengendalian Tapa Mengapa pada SCOP Pengendalian Harang dan Jala PT 315	1	4	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUNIN agar: 1. Melakukan kajian awal mengenai kegiatan cetak swas pada PT 315, karena tidak mengkomunikasikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pengendalian dan program cetak swas.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pembelian Perbaikan Jala Kontrolasi dan Kontrolasi dan Peralatan Pengendalian Tapa Mengapa pada SCOP Pengendalian Harang dan Jala PT 315	1	4	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUNIN agar: 1. Melakukan kajian awal mengenai kegiatan cetak swas pada PT 315, karena tidak mengkomunikasikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pengendalian dan program cetak swas.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Pembelian Perbaikan Jala Kontrolasi dan Kontrolasi dan Peralatan Pengendalian Tapa Mengapa pada SCOP Pengendalian Harang dan Jala PT 315	1	4	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUNIN agar: 1. Melakukan kajian awal mengenai kegiatan cetak swas pada PT 315, karena tidak mengkomunikasikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pengendalian dan program cetak swas.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN PADA KEMENTERIAN BUMN

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Prosedur dan kebijakan terkait kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN pada Kementerian BUMN																	
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Belum Memiliki Pedoman dan Tatacara yang Baku, dan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN Selama 2011-2013 Belum Dijabarkan Dalam Standard Operating Procedure (SOP)	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera: 1) Mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN yang mencerminkan suatu kegiatan penyelesaian yang profesional, objektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi kaidah tata kelola yang baik; sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta mensosialisasikan aturan tersebut baik secara internal maupun eksternal lingkungan Kementerian BUMN; 2) Menetapkan dan melaksanakan standard operating procedure (SOP) persyaratan dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN yang komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, monitoring, dan evaluasi proses maupun hasil, termasuk tata laksana pendokumentasian kegiatan; serta mensosialisasikan SOP tersebut pada pihak-pihak yang terkait di lingkungan Kementerian BUMN.	1	-	Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Telah dilakukan sosialisasi. Dokumen sosialisasi telah disampaikan.	1	-							Telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti	
					1	-	Telah ditetapkan Keputusan Menteri BUMN No SK-213/MBU/2014 tentang Penetapan SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN. Telah ditetapkan SOP Uji Kelayakan dan Kepatuhan Bakal Calon Komisaris/Anggota Dewan Pengawas BUMN yaitu SOP Nomor SOP-9/IBIS/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penilaian Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Telah dilakukan sosialisasi. Dokumen sosialisasi telah disampaikan.	1	-							Telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti	
2.	Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengendalian atas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Belum Memadai serta Tidak Didukung dengan Kriteria dan Pedoman Penilaian	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera menegur Sekretaris Kementerian BUMN karena belum mematuhi Pasal 17 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN.	1	-	Tim UKK dan Evaluasi ditetapkan oleh Menteri, yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dari unsur Deputi Teknis dan Sekretariat. Dengan demikian tanggungjawab pelaksanaan Pasal 17 merupakan kewajiban Tim UKK dan Evaluasi. Kementerian BUMN dhi Menteri BUMN sudah membuat Surat Edaran kepada Tim UKK (Eselon I dan II Kedeputian teknis) untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER 01/MBU/2012 secara konsisten. TL per November 2016 Surat Menteri BUMN No S-280/MBU/05/2016 tanggal 3 Mei 2016 kepada Sekretaris Menteri tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian BUMN terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMN serta Efektivitas Kegiatan Pemeriksaan dan Reviu Laporan Keuangan oleh APIP TA 2012 dan Semester I 2013	1	-							Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2016	per
3.	Tidak Ada Proses Penjaringan pada Kegiatan Pengangkatan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Pelaksanaan Penilaian Direksi Kurang Memadai	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera : 1) Mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang bergerak dibidang yang sama dengan instansi asalnya dengan mempertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik dilingkungan Pemerintahan maupun BUMN yang bersangkutan;	1	-	Terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari Kementerian lain, termasuk Kementerian Teknis, Kementerian BUMN melakukan klarifikasi kepada atasan langsung calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengenai kemungkinan adanya larangan yang bersangkutan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI, Kementerian BUMN telah menyampaikan Permohonan Klarifikasi kepada Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah yang calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang berasal dari Instansi/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan, sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN. Proses klarifikasi dan evaluasi sedang dalam proses berupa konfirmasi melalui surat kepada Kementerian Teknis yang bersangkutan. Disampaikan bahwa evaluasi dilakukan dengan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Menteri terkait apakah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk usulan pejabat langsung oleh Menteri tidak dilakukan konfirmasi kembali. TL per November 2016 Daftar Komisaris BUMN yang berasal dari Instansi Asal Kementerian BUMN TL per Juli 2017 Tidak ada dokumen yg disampaikan	1	-							Masih dipantau s.d. disampaikan dokumen evaluasi/ajian/klarifikasi untuk seluruh dewan komisaris yang berasal dari Kementerian Teknis (tidak hanya berasal dari Kementerian BUMN).	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Semester II 2017 Melalui Nota Dinas Asdep MSDME BUMN ke Inspektorat No. ND-176/ D7.MBU.1/10/2017, telah disusun: Kajian Internal terkait Penempatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang berasal dari regulator bidang yang sama dengan BUMN									Tindak lanjut sesuai rekomendasi per Desember 2017	
				2) Menetapkan dan melaksanakan standar baku yang penerapannya berlaku bagi seluruh BUMN terkait program pembinaan SDM BUMN yang berkesinambungan bagi para calon direksi yang berasal dari lingkungan BUMN dan Kementerian BUMN guna pemantapan kegiatan seleksi direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN.	1		- Telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-14/MBU/10/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian BUMN Sedangkan untuk BUMN dimasukkan dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN	1	-							Telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Juni 2015	
4.	Jumlah Komisaris Independen pada BUMN Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang Merangkap Jabatan	1		- BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i Menteri BUMN untuk segera memperhatikan dan menerbitkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.	1		- Inspektorat telah melakukan pembahasan dengan Kedeputian Teknis, Kedeputian Bidang Infrastruktur Bisnis dan Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi (Risalah Terlampir) - Sampai dengan saat ini masih dalam proses penerimaan data komposisi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebanyak 25 BUMN (s.d. Juni 2015) - Terkait dengan Rangkap Jabatan Direksi, telah diterbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN - Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, khususnya Bab V Berakhirnya Jabatan, huruf A. Larangan Rangkap Jabatan. - Nota Dinas Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis No.ND-196/D4.MBU/5/2015 Tanggal 29 Mei 2015 kepada Deputi-Deputi perihal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen pada BUMN. Komposisi Komisaris Independen masih belum tercapai 20% untuk seluruh BUMN. Data update posisi komposisi Dewan Komisaris Independen belum disampaikan. TL per Juli 2017: Tidak ada dokumen yg disampaikan PTL per Maret 2016 "Telah ditindaklanjuti, dengan diangkatnya komisaris independen pada 43 BUMN sesuai Daftar terlampir. TL per November 2016 Daftar Komisaris Independen BUMN yang dilaksanakan secara bertahap TL per Juli 2017 Tidak ada dokumen yg disampaikan PTL Semester II 2017 Melalui Nota Dinas Asdep MSDME BUMN ke Inspektorat No. ND-176/ D7.MBU.1/10/2017, telah disampaikan: Proses Penataan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMN PTL per April 2018 belum ada TL.			1	-				Dipantau s.d. dokumen penertiban komisaris independen untuk semua BUMN.		
																Dipantau sampai dengan penataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi semua BUMN sesuai dengan ketentuan (salah satu contoh: penataan terkait dengan komposisi Komisaris Independen)	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah			
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah						
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							PTL Semester I 2021 A. Persentase Komisaris Independen Persentase BUMN yang memenuhi kriteria Komisaris Independen telah mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 30% di Bulan Desember 2017 pada saat penyampaian TL Smt2 menjadi sebesar 58,72% di Bulan Juni 2021 B. Rangkap Jabatan Komisaris/Dewan Pengawas 1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkait, dalam hal ini Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 jo PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, PER-03/MBU/2012 jo PER-04/MBU/06/2020 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, telah diatur antara lain: a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN. b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan. c. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan atau pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri. d. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektoral. e. Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/sentif kinerja bagi yang bersangkutan. f. Dalam hal terjadi rangkap jabatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, b, dan c, maka masa jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN berakhir demi hukum per terjadinya rangkap jabatan yang dilarang tersebut. 2. Diperbolehkannya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN merangkap sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana diatur dalam Bab V huruf A lampiran PER-10/MBU/10/2020 (poin 3 huruf d di atas), dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang lebih kompeten dan berpengalaman, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi jalannya perusahaan/perusahaan patungan oleh Direksi BUMN. 3. Perangkapan jabatan Direksi sebagai Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan oleh Induk Perusahaan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan hanya terjadi di dalam grup BUMN tersebut, sehingga tidak berpotensi pada terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang sehat. 4. Dapat kami sampaikan pula bahwa pendirian BUMN dilakukan dengan maksud dan tujuan antara lain untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. Dengan demikian, kegiatan usaha BUMN tidak hanya dilakukan untuk kepentingan sektor/entitas tertentu, namun senantiasa ditujukan untuk kepentingan nasional demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.												Belum Sesuai. Dimonitor hingga diperoleh Monitoring Komisaris Independen BUMN (termasuk diantaranya yang tidak dapat memenuhi komposisi komisaris independen)	
							PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan dokumen matriks Komposisi Dewan Komisaris Independen di BUMN revisi 01 yang tidak disertai dengan nomor dan bukti pengesahan dokumen. Selain itu, pada matriks tersebut belum semua BUMN memiliki Dewan Komisaris Independen berdasarkan komposisi sesuai dengan aturan yang ada.										Belum terdapat dokumen yang sah yang menunjukkan Komposisi Dewan Komisaris Independen di BUMN telah sesuai dengan aturan yang ada.			

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL per Agustus 2022 Pembahasan dengan Inspektorat dan Asdep MSDM, masih dalam proses dan belum terdapat dokumen tindak lanjut tambahan									Diusulkan belum sesuai. Dipantau kelengkapan dokumen tersebut	
5.	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pengangkatan Direksi BUMN Tidak Tepat Waktu dan Masa Jabatan Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i Menteri BUMN untuk segera: 1) Memperhatikan dan memberlakukan dengan tegas jangka waktu pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi BUMN.	1	-	Kementerian BUMN akan mengupayakan agar proses pengangkatan Direksi BUMN dapat diselesaikan tepat waktu. Ke depan akan dilakukan pembenahan sesuai dengan saran BPK RI. Kementerian BUMN telah menindaklanjuti saran tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No SK-213/MBU/2014 tentang Penetapan SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN dan SOP Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi BUMN yaitu SOP No.SOP-08/IBIS/10/2014.	1		-						Telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Juni 2015	
				2) Memonitor masa jabatan direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN untuk pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.	1	-	Kementerian BUMN telah mengoptimalkan Portal SDM dalam monitoring masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Setiap awal tahun Kedeputan Infrastruktur Bisnis menyampaikan kepada Deputi Teknis mengenai daftar anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan habis masa jabatannya dalam satu tahun yang akan datang. Surat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya No.S-203/D3.MBU/12/2014 Tanggal 29 Desember 2014 kepada Dewan Komisaris dan Direksi BUMN perihal Teguran atas Ketidakefektifan Pengisian dan Pemutakhiran Data Portal SDM. Nota Dinas Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis kepada Deputi-Deputi No ND-136/D4.MBU/04/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang Monitoring Pengisian Data Portal SDM. Telah ada aplikasi, Portal SDM, yang dapat digunakan untuk memonitoring masa jabatan direksi, komisari dan dewan pengawas BUMN. Namun, manfaat aplikasi dalam pengambilan keputusan belum terlihat.			1						Dipantau sampai dengan laporan monitoring disampaikan. Masih dipantau untuk direksi, komisaris, dan dewan pengawas yang telah habis atau akan habis masa jabatan terhadap proses seleksi pemilihan atau pengangkatan kembali.	
							PTL Semester II 2017 Melalui Nota Dinas Asdep MSDME BUMN ke Inspektorat No. ND-176/ D7.MBU.1/10/2017, telah disampaikan: - Deskripsi Portal SDM, dan - User Manual Portal SDM Kementerian BUMN, yang digunakan sebagai alat monitoring masa jabatan direksi dan komisaris. Serta Nota Dinas Deputi Infrabis kepada Deputi Teknis No. 532/D7A9/2017 perihal informasi data Direksi dan Komisaris yang telah melampaui batas akhir masa jabatannya.									Dipantau sampai ada konsistensi perkembangan <i>updating</i> data di portal-portal BUMN yang bisa dipantau oleh KBUMN	
							PTL per April 2018 belum ada TL.									dilampirkan hasil print screen yang terdapat di portal, sesuai dengan kondisi <i>ter-update</i> , serta print screen log system admin di data base portal SDM	
							PTL Semester I 2021 Pada Portal SDM dimana saat ini telah berganti menjadi Portal HC BUMN telah menyediakan fitur/menu antara lain berupa diagram yang menginformasikan tentang masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan berakhir dalam waktu kurang dari 3 bulan dan 6 bulan. (screenshot portal yang disampaikan sesuai dengan kondisi ter-update)									Dimonitor hingga diperoleh bukti pendukung yang menjelaskan bahwa sistem informasi telah dimanfaatkan dalam monitoring masa jabatan direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN untuk pengambilan keputusan yang tepat dan transparan pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.	
							PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan screen capture dari laman https://hc.bumn.go.id (pengganti laman SDM) yang menunjukkan dan menyediakan: a. Chart Masa Jabatan Direksi/Komisaris BUMN b. Fitur/menu antara lain berupa diagram yang menginformasikan tentang masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan berakhir dalam waktu kurang dari 3 bulan dan 6 bulan.									Dimonitor hingga diperoleh bukti pendukung yang menjelaskan bahwa sistem informasi telah dimanfaatkan dalam monitoring masa jabatan direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN untuk pengambilan keputusan yang tepat dan transparan pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
								Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL per Agustus 2022 Pembahasan dengan Inspektorat dan Asdep MSDM, masih dalam proses dan belum terdapat dokumen tindak lanjut tambahan									Diusulkan belum sesuai. Dipantau kelengkapan dokumen tersebut	
6.	Dokumentasi Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Belum Memadai	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera menyusun dan menetapkan standar penyusunan laporan hasil kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN.	1	-	Telah disampaikan draft laporan pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN (disusun oleh Deputi Infrastruktur Bisnis). Dokumen SOP pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN telah ada. SK Menteri terkait SOP pada kegiatan Kementerian BUMN telah ada.	1			-					Diusulkan Sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Desember 2015	
B. Sistem Informasi yang digunakan untuk seleksi direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN pada Kementerian BUMN																	
1.	Sistem Informasi Belum Mendukung Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Secara Optimal	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera: 1) Mendata dan menegur BUMN d.h.i Direksi BUMN yang belum melakukan pengisian dan pemutakhiran data Portal SDM;	1	-	Kementerian masih dalam proses pendataan dan menerbitkan surat teguran kepada BUMN. Surat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya No.S-203/D3 MBU/12/2014 Tanggal 29 Desember 2014 kepada Dewan Komisaris dan Direksi BUMN perihal Teguran atas Ketidakefektifan Pengisian dan Pemutakhiran Data Portal SDM. Lampiran hasil monitoring SDM.	1			-					Telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Juni 2015	
				2) Memasukkan ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS sebagai salah satu KPI Direksi BUMN;	1	-	Peraturan Menteri BUMN No PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen BUMN secara elektronik. Telah dimasukkan ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS sebagai salah satu KPI Direksi BUMN. Contoh KPI pada BUMN telah memasukkan indikator "ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada portal SDM dan portal FIS" telah disampaikan. Namun, belum semua KPI disampaikan. Dan belum terlihat parameter dalam penilaian indikator tersebut. PTL per Maret 2016 1. Telah dibuat Nota Dinas No ND-02/D6.MBU.1/1/2016 tgl.6-1-2016 ttg Progres Kepatuhan pengisian dan verifikasi Portal FIS 2. Memo Asdep Data dan TI No MO-114/D7.MBU.2/12/2015 tgl. 8-12-2015 ttg Informasi status pemenuhan portal FIS tahun pelaporan 2014 dan triwulan III 2015. PTL per April 2018 MSDM: BUMN ke Inspektorat No. ND-176/ D7.MBU.1/10/2017, telah disampaikan: - Daftar BUMN yang Memiliki KPI Corporate "Ketersediaan dan Kemutakhiran Data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS (namun belum disertai dengan screen shoot terkait ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS sebagai salah satu KPI Direksi BUMN) PTL Semester I 2021 A. Portal SDM dimana saat ini telah berganti menjadi Portal HC BUMN telah menyediakan fitur-fitur yang dapat mendukung KPI Corporate "Ketersediaan dan Kemutakhiran Data BUMN", salah satu contohnya pada fitur Talent Management. Data-data talent BUMN yang disampaikan oleh Direksi BUMN dengan lengkap ditandai dengan rentang nilai 0-100 pada kolom status pengisian, sebagaimana screenshot terlampir B. Portal FIS dimana saat ini telah berganti menjadi Portal Silaba telah menyediakan fitur-fitur yang dapat mendukung KPI Corporate "Ketersediaan dan Kemutakhiran Data BUMN", salah satu contoh fiturnya adalah view laporan yang dapat menunjukkan dokumen laporan yang telah diverifikasi oleh Kementerian BUMN setelah diupload oleh BUMN, sebagaimana screenshot terlampir PTL per Agustus 2022 Pembahasan dengan Inspektorat dan Asdep MSDM, masih dalam proses dan belum terdapat dokumen tindak lanjut tambahan			1					Dipantau s.d. dokumen pemenuhan portal menjadi salah satu KPI hingga disampaikan KPI semua BUMN yang memasukkan indikator "ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS" serta bukti parameter pada portal tersebut. dibutuhkan screen shoot terkait ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS sebagai salah satu KPI Direksi BUMN " Dipantau hingga terdapat laporan monitoring dan verifikasi yang menjelaskan bahwa pemanfaatan fitur tersebut telah sesuai.		
																Diusulkan belum sesuai. Dipantau kelengkapan dokumen tersebut	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3) Melakukan perbaikan atas Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Portal SDM yang telah ditetapkan.	1	-	Keputusan Menteri BUMN No.SK-213/MBU/2014 tentang Penetapan SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN Direksi SOP-8/BIS/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 pada Instruksi Kerja No.6 yang menyebutkan bahwa diantaranya menugaskan admin manajemen SDM Eksekutif (MSE) untuk menatakelola database direksi pada Sistem SDM BUMN Komisaris SOP-9/BIS/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 pada Instruksi Kerja No.6 yang menyebutkan bahwa diantaranya menugaskan admin manajemen SDM Eksekutif (MSE) untuk menatakelola database dewan komisaris/dewan pengawas pada Sistem SDM BUMN	1	-							Telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Juni 2015		
							PTL Semester II 2021 Telah ditindaklanjuti dengan screen capture dari: a. Laman https://hc.bumn.go.id (pengganti laman SDM) yang telah menyediakan fitur-fitur yang dapat mendukung KPI Corporate "Ketersediaan dan Kemutakhiran Data BUMN", salah satu contohnya pada fitur Talent Management. Data-data talent BUMN yang disampaikan oleh Direksi BUMN dengan lengkap ditandai dengan rentang nilai 0-100 pada kolom status pengisian. b. Laman pada https://silaba.bumn.go.id (pengganti laman FIS) yang telah menyediakan fitur-fitur yang dapat mendukung KPI Corporate "Ketersediaan dan Kemutakhiran Data BUMN", salah satu contoh fiturnya adalah view laporan yang dapat menunjukkan dokumen laporan yang telah diverifikasi oleh Kementerian BUMN setelah diupload oleh BUMN.										Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi	
2.	Kementerian BUMN Belum Memiliki Mekanisme Monitoring dan Evaluasi atas Keakuratan Data pada Portal SDM	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera melakukan evaluasi atas perencanaan dan pengembangan teknologi informasi yang telah rencanakan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Portal SDM dan Portal FIS, serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	1	-	Telah diterbitkan Nota Dinas Asdep Informasi dan Komunikasi Publik dan Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN No.ND-67/D4.MBU.2/05/2015 dan No.ND-26/D4.MBU.1/5/2015 Tanggal 29 Mei 2015 perihal Penyampaian Laporan Pengembangan Portal SDM dan SDP Portal FIS sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dokumen Rencana dan Laporan Pengembangan Portal SDM Kementerian BUMN (http://sdm.bumn.go.id). Dokumen evaluasi atas perencanaan dan pengembangan teknologi untuk Portal SDM dan Portal FIS telah disampaikan. Telah disampaikan review UAT (User's Acceptance Test). 1. Telah dibuat Rekap Status Pelaporan BUMN melalui Portal FIS Audited 2013. 2. Telah diterbitkan Nota Dinas Asdep Informasi dan Komunikasi Publik No. ND-67/D4.MBU.2/ 05/2015 dan Nota Dinas Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN No.ND-26/D4.MBU.1/5/2015 tgl.29-05-2015 ttg. Penyampaian Laporan Pengembangan Portal SDM dan SDP Portal FIS.	1	-								Diusulkan sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Desember 2015	
C. Monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris																		
1.	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Proses serta Kinerja Hasil atas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Belum Memadai.	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera :														
				1) Menetapkan dan kemudian melaksanakan suatu mekanisme evaluasi yang komprehensif atas pencapaian IKU pada unit kerja yang ada di Kementerian BUMN,	1	-	Telah diterbitkan Draft Pedoman Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian BUMN. Dokumen SOP mekanisme evaluasi atas pencapaian IKU yang ditandatangani oleh inspektur telah disampaikan. Berdasarkan penjelasan bahwa pada SK 436, Menteri menugaskan Inspektur untuk membuat pedoman mekanisme evaluasi pencapaian IKU.	1	0	-							Diusulkan Sesuai dan selesai ditindaklanjuti per Desember 2015	
				2) Menegur BUMN d.h.i direksi BUMN yang terlambat menyampaikan laporan triwulanan,	1	-	Telah dilakukan teguran atas keterlambatan penyampaian laporan triwulan BUMN sesuai Surat Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya No.S-202/D3.MBU/12/2014 Tanggal 29 Desember 2014. Telah disampaikan daftar BUMN yang terlambat menyampaikan Laporan Triwulanan dan teguran	1	0	-							Diusulkan Sesuai Rekomendasi per Desember 2015	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3) Menyusun dan melaksanakan pedoman pelaporan sebagai bagian dari pengendalian mutu kegiatan evaluasi kinerja BUMN.	1	-	Keputusan Menteri BUMN No SK-213/MBU/2014 tentang Penetapan SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN SOP-5/TEKN/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 tentang: 1). Prosedur Kerja Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan BUMN 2). Instruksi Kerja Verifikasi Kelengkapan Data Laporan Triwulan 3). Instruksi Kerja Evaluasi dan Penyusunan Surat Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan	1	-							Telah sesuai dan selesai Per Juni 2015	
2.	Monitoring dan Evaluasi Atas Kinerja Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Belum Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI / Kepala Badan Pembina BUMN Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998 tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN	1	-	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera secara konsisten mematuhi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI / Kepala Badan Pembina BUMN Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998 tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN.	1	-	- KEP-88/M-PBUMN/1998 tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN telah dicabut dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/09/2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-88/M-PBUMN/1999 Tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN di Lingkungan Kantor Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara. - Terkait dengan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN telah termasuk dalam SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan FungsiKementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-413/MBU/2013 tentang Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam Lampiran V SOP Penilaian dan Evaluasi Kinerja BUMN atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Audit							1	-	Tidak dapat ditindaklanjuti karena Peraturan tersebut telah dicabut	
	Jumlah	10	-		17	-		13	-	3	-	0	-	1	-		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN DAN DUKUNGAN LKPP TA 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SPI																
1	Penatausahaan Persediaan pada Kementerian BUMN Tidak Terlibat	1		- BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar : a. Menginstruksikan kepada Sekretaris Kementerian BUMN beserta jajarannya sebagai pengelola barang persediaan agar lebih terlibat dalam pengelolaan gudang barang persediaan b. Menginstruksikan kepada Sekretaris Kementerian BUMN beserta jajarannya untuk melaksanakan pengelolaan barang persediaan sesuai SOP yang sudah ditetapkan.	1		- a. Telah diterbitkan surat instruksi sesmen atas nama Menteri BUMN No. S-407/MBU/S/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang kebijakan pengelolaan aset dan persediaan di lingkungan kementerian BUMN b. SOP Persediaan No. Per-13/MBU/2012 tanggal 18 September 2012	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014	per
					1		- a. Telah diterbitkan surat instruksi sesmen atas nama Menteri BUMN No. S-407/MBU/S/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang kebijakan pengelolaan aset dan persediaan di lingkungan kementerian BUMN b. SOP Persediaan No. Per-13/MBU/2012 tanggal 18 September 2012	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014	per
2	Pengelolaan Aset Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tidak Terlibat	1		- BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada : a. Sekretaris Kementerian BUMN beserta jajarannya sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan barang untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan inventarisasi dan administrasi serta pengendalian barang sesuai Permen BUMN Nomor Per-07/MBU/2012 tentang Prosedur Pengoperasian Standar Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian BUMN b. Sekretaris Kementerian BUMN segera melengkapi BA pinjam pakai sebagai bukti peminjaman BMN atas aset yang dipinjam	1		- a. Telah diterbitkan surat instruksi sesmen atas nama Menteri BUMN No. S-407/MBU/S/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang kebijakan pengelolaan aset dan persediaan di lingkungan kementerian BUMN b. Berita Acara Pinjam Pakai BMN telah dilengkapi. Kementerian BUMN telah membuat laporan kondisi barang	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014	per
3	Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Tak Bervujud pada Kementerian BUMN Belum Optimal	1		- BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar : a. Menginstruksikan kepada keasdespan Kementerian BUMN berkoordinasi dengan BUMN terkait atas pengimputan dan pemutakhiran informasi yang seharusnya ditampilkan dalam portal Kementerian BUMN	1		- 1. Kementerian BUMN telah menerbitkan shareholder aspiration letter untuk pedoman penyusunan RKAP 2014 khususnya terkait optimalisasi portal; 2. Kementerian BUMN telah menginstruksikan kepada Direksi BUMN melalui arahan RUPS untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal KBUMN dan senantiasa memperbarui data informasi di portal tersebut yang terdiri dari portal Financial Information System (FIS), portal aset, portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik serta melaporkan kepada unit pengelola portal. 3. KBUMN melalui Deputi Infrastruktur Bisnis telah meminta Direksi BUMN untuk menyampaikan ikhtisar LKPN SM I th 2014, data kinerja pokok SM I 2014, dan Laporan Manajemen SM I 2014 melalui portal FIS.	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014	per
				b. Menginstruksikan kepada Tim Pemutakhiran dan Monitoring Sistem Informasi di Kementerian BUMN untuk berperan aktif dalam melakukan koordinasi untuk update konten data dan monitoring pengisian laporan BUMN pada portal Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi, perbaikan dan optimalisasi menu/modul yang ada pada Portal Kementerian BUMN	1		- Sebagai salah satu upaya monitoring pemutakhiran data dan informasi oleh BUMN melalui portal, Deputi Infrastruktur Bisnis mengundang 5 (lima) BUMN pada tanggal 19 Agustus 2014. - Telah dibuat Rencana Pengembangan Portal PTI per Juni 2015 Tim Pemutakhiran dan Monitoring Sistem Informasi KBUMN sudah tidak ada dan dialihkan ke Deputi Infrastruktur Bisnis/keasdespan Informasi dan Komunikasi. PTI Semester II 2015 • Peraturan Menteri BUMN No.18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data Laporan dan Dokumen BUMN secara elektronik. • Realisasi dapat dilihat di Portal FIS Kementerian BUMN (dilampirkan hasil memo portal FIS, output laporan keuangan, status pelaporan) • Surat Edaran No.SE-03/MBU/6/2015 tentang Penghentian Penyampaian Data dan Dokumen/Laporan Berkala BUMN secara tercetak kepada Direksi BUMN tanggal 12 Juni 2015. • Menu/user manual portal FIS	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per Desember 2015	per

No	Tema Penerimaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa				Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Negara/ Daerah				
													Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Ditindaklanjuti						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
5	Alokasi Laba BUMN Untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari Tahun 2007 Sampai dengan Tahun 2012 Mengurangi Iaku Negara Atas Kekayaan Negara Berdasarkan Proposisi Kepemilikan Minimal Sebesar Rp6.137.889.889.935,69	1	3	4	5	6	7	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
6	Peraturan tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tidak Memadai dan Tidak Efektif Peraturan Menteri BUMN Tidak Efektif dalam Pemertanian yang Kompleks	1				1		-		1																

No	Teman Pemeriksa			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Asor atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah										
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah													
	Judul	Jml	Nilai	Judul	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai												
1		2	3	4			5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
							PTL per Maret 2016 1. Permen 09 Tahun 2015 tentang PKBL, pasal 5 menyatakan BUMN memiliki kewajiban menyusun SOP untuk pelaksanaan PKBL yang ditandatangani oleh Direktur BUMN. 2. Telah dibuat Nota Dinas Desiminasi TSL No ND-32/D7.MBU/4.02/2015 tg.31-12-2015 tentang Penyempurnaan draft SOP PKBL pada Keadaparan TSL. 3. Telah dibuat Draft Nota Dinas Deputy Bidang Infrastis dan Sentren perihal penyampaian SK Menteri BUMN tentang Penetapan Jalin/ SOP pelaksanaan pemantauan pengelolaan PKBL oleh KBUMN. 4. Telah dibuat Draft Keputusan Menteri BUMN tentang Penetapan Jalin/ SOP pelaksanaan pemantauan pengelolaan PKBL BUMN. PTL per Juli 2017 1. SOP Nomor 19 Perihal Monitoring Tindak Lanjut Temuan DPR terkait PKBL pada BUMN. 2. SOP Nomor 20 Perihal Penyapaan Rumusan Bahan Kebijakan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Kunjungan Kerja atau Monitoring di Daerah). 3. SOP Nomor 21 Perihal Evaluasi Laporan PKBL Trivulnain BUMN.																		
7	Pencapaian Program Luangkungan Peduli Tidak Memiliki Arah yang Jelas	1		HDK RI merekomendasikan kepada Menteri HUMAN agar: a. Menentukan HUMAN Koordinator Program BL HUMAN Peduli yang masih berjalan untuk menyusun rencana aksi penyelesaian program	1		Teloh dibuat Surat Menteri kepada Direksi HUMAN Koordinator agar menyusun rencana aksi penyelesaian program yaitu Surat Menteri HUMAN No. S-099/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 PTL per Maret 2016 Program BL HUMAN Peduli selanjutnya telah selesai (Keuali Program Cetak Sawah yang telah dilimpahkan ke Barektrin POLRI), Laporan Saldo Dana BL Peduli telah dibuat dan telah dilaksanakan audit oleh KAP 1. Laporan Saldo Dana BL HUMAN Peduli 2. LHA Program BL Peduli sebanyak 20 LHA untuk 20 Program s.d. Maret 2016 tidak ada program yang masih berjalan kecuali cetak sawah yang diampun sebagai kerm Pdt - Menunggu laporan audited PT PM PTL per November 2016 1. Surat kepada BUMN Koordinator Nomor S-438/D7.MBU/3/10/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 untuk meminta Laporan Penyelesaian Kegiatan 2. ND-10/D7.MBU/4.02/2016 020216 tentang Penyempurnaan rekapitulasi kegiatan dan saldo BL HUMAN Peduli per 31 Desember 2015 PTL per Juli 2017 Tidak ada dokumen yg disampaikan (Lap Audited PT PM dan lap penyelesaian kegiatan) PTL per April 2018 Surat Nomor S-301/MBU/05/2017 perihal status dan saldo dana BL Peduli														Diputus s.d. Surat Deputy yang menyatakan bahwa seluruh program kegiatan telah selesai dan laporan tersebut disampaikan.				
				b. Menentukan Adop Pembinaan PKBL untuk mengawasi lebih intensif penyelesaian Program BL HUMAN Peduli yang masih berjalan	1		Saja belakunya Per-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian HUMAN, Keantapan dan Pembinaan PKBL, dan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan PKBL, telah dibuat dan sudah ada tugas pengawasan dan pembinaan PKBL. Telah dibentuk sagas PKBL. - Permen 06/2014 tentang Struktur Organisasi KBUMN - Surat Senren No. S-91 Tanggal 20 Juni 2014 tentang Tim Sagas PKBL.														Rencana aksi berupa laporan sia dana BL Peduli per 31 Desember 2016 yang disampaikan oleh BUMN Koordinator, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh program BL Peduli telah selesai dilaksanakan dan terhadap sia dana BL Peduli yang masih ada di HUMAN Koordinator, diminta untuk dikembalikan kepada BUMN secara persentase dan esekannya dilakukan pemantauan rekening BL Peduli dimaksud				
																					Diajukan sesuai ditindaklanjuti per Jan 2015.				

[illegible]

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
	Judit		Nilai		Uraian		Nilai			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Semester II 2019									Diusulkan belum sesuai per Semester II 2019. Laporan verifikasi uang atas Laporan Skedding dari Bank mandiri dan Telkom belum disampaikan ke BHPK.	
							1. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Pusat dalam rangka GPKS antara PT Telkom Indonesia Tbk dengan PT Sing Hyang Seri (Persero) No. 131/SHS.05/Sy/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan No. 132/SHS.05/Sy/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.										
							2. BA Perjanjian Bermasalah (Tdk Normal) No. 137/KI.080.RAW-4F523000/2016 Tanggal 20 Sep 2016.										
							3. Daftar Janjian Kelompok Pertermak Ayam Dolopo.										
							4. Surat SKM Community Development Centre No. Tel.150/PW/430/CDC-A/1000000/2016 Tanggal 8 Nov 2016 kepada Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan KBUMN perihal jawaban TI Audit PKBL dari BHPK.										
							5. Kronologi Penyuluran Program Sinergi Kemitraan dengan PT SHS Jakarta.										
							6. Perjanjian Kerjasama Kredit Usaha Kecil dan Koperasi antara PT Telkom Tbk dengan Kelompok Usaha Pengembangan Klinik Hewan, Pakan Ternak, dan Ternak Ayam Dolopo Madani.										
							Laporan verifikasi uang atas Laporan Skedding dari Bank mandiri dan Telkom belum disampaikan ke BHPK.										
							PTL Semester I 2020									Diusulkan belum sesuai per Semester I 2020.	
							Beleah Riset antara Keadepan TJSI, Implekroni KBUMN, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tanggal 8 Feb 2019 yang menyatakan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menyipkan laporan lingkup atas detail mitra binaan yang disalurkan penguatannya melalui HUMN.									Laporan lengkap PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum disampaikan ke BHPK.	
							Penyuluhan dan data penguat yang sudah kembali serta yang berstatus macet (termasuk penebanya) atas penguat program kemitraan sebelum tahun 2013 secara tertulis kepada Keadepan TJSI KBUMN.										
							PTL Semester II 2020									Laporan skedding dari Bank mandiri dan Telkom telah disampaikan, namun belum disertai dengan laporan verifikasi ulang.	
							Telah dilampirkan Dokumen Penyelesaian Pinang dari Mirabinaan PT Telkom dan Bank Mandiri									Direktorat binaan laporan usa pinang kemitraan HUMN yang masih belum diselesaikan diterima.	
							PTL Semester I 2021										
							Telah dilampirkan Dokumen Penyelesaian Pinang dari Mirabinaan PT Telkom dan Bank Mandiri dengan uraian berikut :										
							1) Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor CSC/CSE/CSR.1363/2020 tanggal 5										
							Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut BHPK pada LHP BHPK atas Laporan Keuangan										
							Kementerian BUMN Tahun 2013 yang pada										
							menjelaskan penyaluran pinjaman Program Kemitraan kepada 27 Mitra Binaan										
							dengan total nilai pinjaman sebesar Rp13.462.454.320,00.										
							Pisut sampai dengan 31 Agustus 2020, sebanyak 19 Mitra Binaan telah melunasi										
							pinjaman sebesar Rp14.052.954.320,- sedangkan 8 Mitra Binaan dengan jumlah										
							pinjaman awal sebesar Rp4.409.500.000,- masih terdapat sisa nilai pinjamannya										
							sebesar Rp3.354.000.000,- (pinjaman awal Rp4.409.500.000 dikurangi angsuran Rp1.055.500.000), yang tidak bisa dikembalikan karena usahanya sudah tutup. Untuk 8 debitur terselut saat ini dalam proses untuk meminta surat keterangan dan penertintah daerah setempat yang menyatakan kondisi usaha mitra binaan tersebut.										
							2) Surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk nomor: Tel.14/PW/000/CDC-A/1000000/2020										
							tanggal 23 Oktober 2020 perihal Laporan Tindaklanjuti Temuan Auditor BHPK Tahun										
							2013 diantarnya menjelaskan bahwa penyaluran pinjaman Program										
							Kemitraan kepada 4 Mitra Binaan dengan total nilai pinjaman sebesar										
							Rp15.774.000.000,00 (nilai pinjaman Rp14.800.000.000,00 ditambah jasa administrasi) Laporan Posisi Per September 2020										
							sebanyak 2 Mitra Binaan telah melunasi pinjamannya sebesar Rp6.180.000.000,00 sedangkan 2 Mitra Binaan dengan jumlah pinjaman awal sebesar Rp9.594.000.000,- masih terdapat sisa nilai pinjamannya sebesar										
							Rp7.890.017.468,00.										
							Laporan di atas membutuhkan verifikasi lebih lanjut.										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyeteran Uang ke Kas Negara/ Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Jumlah	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Selesai dengan Rekomendasi			Belum Selesai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml			Nilai	Jml	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	PTL Semester II 2021	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							PTL Semester II 2021 Ditindaklanjuti dengan Nota Dima Asisten Deputi Bidang TSI, kepada Inspektur dengan nota nomor ND-41/DSI/MBU/B/11/2020 tanggal 3 November perihal Penyampaian Progress Tindak Lanjut Temuan BPK pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Telkom (Persero) Tbk, yang berkenaan penyelesaian anular lain: 1. Penyaliran pinjaman dari PK yang dilaksanakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Telkom (Persero) Tbk pada Tahun 2003-2012 senilai Rp3.262.454.320,00 sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku pada saat ini dan tidak menyahikan kerugian negara, yaitu: a. Kepmen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pasal 3 e "Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha yang berbentuk hukum, termasuk koperasi; b. Permen BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pasal 8 (1) "Unitik meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur;	b. Surat dan dokumen pendukung dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Telkom (Persero) Tbk; b1. Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor CSC/CSE/CSR/1363/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa suratpaul dengan 31 Agustus 2020 sebanyak 19 mitra binaan telah melunas pajiannya sebesar Rp4.052.934.320,00 dan masih terdapat 8 mitra binaan (27-19) dengan jumlah pajiannya awal sebesar Rp4.409.500.000,00 dan pajiannya yang telah melunas sebesar Rp4.354.000.000,00 (pinjaman awal senilai Rp4.409.500.000,00 dikurangi agunan Rp1.055.500.000,00) yang tidak bisa dikembalikan karena usahanya sudah tutup. Unitik 8 debitor tersebut saat ini dalam proses untuk meminta surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan kondisi usaha mitra binaan tersebut.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No	Teman Pemeriksa			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Sesuai dengan Rekomendasi			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyeteroran Uang ke Kas Negara/ Daerah
	Judul	Jml		Uraian	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah							
											Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								PTL Semester II 2021 Belum ada tindak lanjut									Tidak lanjut belum sesuai rekomendasi. Belum terdapat dokumen mekanisme penghapusan piutang piutang PK yang tak bisa ditagih yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN			
								PTL per Agustus 2022 a. Nota Dinas Asdep TJSL kepada Inspektur Kementerian BUMN Nomor ND-04/DSI/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penyampaian Progress Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI. b. Konsep Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Program Pemantuan Usaha Mikro dan Usaha Kecil BUMN c. Menteri BUMN telah menandatangani kepada Dirjen PPK untuk lebih berkoordinasi dengan Dirjen PK melalui Surat Menteri BUMN nomor 676/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 d. Akan disusun petunjuk teknis penyaliran PK setelah adanya kepastian keberlangsungan program PK PTL Semester II 2015 Penyusunan Jiknis masih dalam proses	1	-							Diusulkan selasai. Dipantau sampai dengan Permen BUMN tersebut diterbitkan dan diimplementasikan			
									1	-							Diusulkan selasai diindaklanjuti per Desember 2015			
									1	-							Dipantau sampai dengan adanya jiknis PKBL.			
								PTL per Maret 2016 1. Permen 09 Tahun 2015 tentang PKBL, pasal 5 menyatakan BUMN Pembina mempunyai kewajiban menyusun SOP untuk pelaksanaan PKBL yang ditetapkan oleh Direksi. 2. Telah dibuat Nota Dinas Asdep TJSL No ND-32/DT/MBU/4/12/2015 tgl 31-12-2015 tentang Penyampaian draft SOP PKBL pada Kementerian BUMN 3. Telah dibuat Draft Nota Dinas Deputi Bidang Infrastruktur dan Sistem perthal penyampaian SK Menteri BUMN tentang Penetapan Jiknis/ SOP pelaksanaan pemantauan pengelolaan PKBL oleh KBUMN 4. Telah dibuat Draft Keputusan Menteri BUMN tentang Penetapan Jiknis/ SOP pelaksanaan pemantauan pengelolaan PKBL BUMN PTL per April 2016 Materi mengenai Jiknis PTL per Juli 2017 1. SOP Nomor 19 Perihal Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK terkait PKBL pada BUMN 2. SOP Nomor 20 Perihal Penyampaian Rumusan Bahasan Kelengkapan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Kunjungan Kerja atau Monitoring di Daerah) 3. SOP Nomor 21 Perihal Evaluasi Laporan PKBL Trivolumen BUMN									Diusulkan selasai diindaklanjuti per Juli 2017			
								Surat Instruksi Menteri No. Ins-01/MBU/S/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Keputusan atas Ketetapan Administrasi Kepegawaian dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas	1	-							Diusulkan selasai diindaklanjuti per November 2014			
2	Pekerjaan Penggantian Lift Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tidak Sesuai Dengan Ketentuan sebesar Rp3.891.764.943,64	1				1		1) telah dilakukan addendum perjanjian yang mengubah jenis kontrak gabungan lump sum dan harga satuan menjadi kontrak harga satuan seluruhnya agar setiap item pekerjaan yang telah diadaskan dapat dihitung sebagai progress pekerjaan. 2) Terhadap hitungan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.012 Milyar akan dievaluasi kembali mengingat terdapat perubahan pekerjaan tambah/kurang di tahun kedua (2014) yang akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara PPK dengan PT Aneka Bangun Eka Pratama yang direvisi oleh Konsultan Perencana dan Konsultan Pegawai yang ditunjuk.							1	Rp	675.000.000,00	Sesuai Rp675.000.000,00 merupakan biaya unitat (pembongkaran) lift lama yang harus dilakukan oleh kontraktor sementara kontraktor pemecana (PT Yodya Karya) melakukan kesalahan karena tidak memasukkan item biaya bongkar rencana pekerjaan		

No	Tema dan Pembiayaan			Rekomendasi			Tindakan Lanjut Entitas yang Diperiksa			Selesai dengan Rekomendasi			Hasil Pemantauan Tindakan Lanjut					Keimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyisiran Uang ke Kas Negara/ Daerah		
	Jumlah	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah								
							Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								Sudah ada kesepakatan antara PPK dengan PT Aneka Bangun Eka Pratama yang direvisi oleh Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk, yaitu berita negosiasi tambah kurang pekerjaan nomor BAN-01/PPK2 MBUS/09/2014. Adanya addendum kedua terkait perubahan tersebut.													
								PTI, per Juni 2015 Addendum perjanjian telah dilakukan namun tidak selanjutnya													
								PTI, Semester I 2015 - Laporan Hasil Revisi dari Inspektur, No. 11/IR-03/INSPT/MBUS/11/2015 tanggal 16 November 2015 perihal LIRJ terhadap bukti pengakuan kegiatan pembongkaran pada pengantian lift gedung KIRUMN (ref: ND: 102/S.MBU/32/09/2015)													
				b. Memberikan sanksi kepada PPK karena tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan pengantian lift Gedung Kementerian BUMN.	1		-	b. Pada tahun 2014 telah dilakukan pengantian PPK. Sudah diberikan teguran kepada PPK 3 sesuai Surat Teguran Sesunan an Menteri nomor S-583/MBUS/09/2014 tanggal 19 September 2014, perihal teguran terkait Rekomendasi Hasil Pemeriksaan HPK-RI.	1							Diusulkan selesai ditindaklanjuti Juni 2015					
3	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Gedung Belan Memadai Diutamakan Terdaftar Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp289.469.427,17	1	Rp	289.469.427,17	HPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar:	1	289.469.427,17	Telah diterbitkan surat Kepala Biro Umum kepada Manager Unit Property II PT WKA Realty perihal Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran melalui surat nomor S-222/S.MBU/3.VIII/2014 16 20 Agustus 2014 dan sudah dilakukan penyisiran.	1	289.469.427,17							Diusulkan selesai ditindaklanjuti per Juni 2015	289.469.427,17			
				b. Memberikan sanksi kepada PPK karena tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan jasa pemeliharaan gedung kantor Kementerian BUMN Tahun 2013.	1		-	Telah dibuat surat teguran kepada PPK 3 dari Sesunan a.n Menteri dengan Surat No. S-583/MBUS/09/2014 Tanggal 19 September 2014.	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per Juni 2015				
4	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Gedung Belan Memadai Diutamakan Terdaftar Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp102.702.809,00	1			HPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memberikan sanksi kepada PPK dan Pejabat Pengadaan karena tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan jasa moving barang.	1		-	Telah dibuat surat teguran kepada PPK 3 dari Sesunan a.n Menteri dengan Surat No. S-583/MBUS/09/2014 Tanggal 19 September 2014, tentang Kepanahan atas Ketertarikan Administrasi Korporeasi dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas.	1							Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014				
5	Pengendalian Atas Pelaksanaan Perjanjian Dinas Belan Memadai	1		-	HPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar:	1		-	a. Surat Insuksi Menteri No. Ins-01/MBUS/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Kepanahan atas Ketertarikan Administrasi Korporeasi dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas.	1							Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014				
				b. Melarang pembayaran perjalanan dinas oleh pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.	1			-	b. Surat Sesunan a.n Menteri No. SE-06/MBUS/2011 tanggal 9 November 2011 yang melarang pembayaran Kegiatan KIRUMN sedari dari AFHN	1							Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2014				
	Jumlah	15	Rp	1.302.383.580,81	30	Rp	1.302.383.580,81	23	Rp	627.383.580,81	2	Rp	-	0	Rp	-	5	Rp	675.000.000,00	Rp	289.469.427,17

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER I TAHUN 2022
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PROGRAM KEGIATAN BL PEDULI KEMENTERIAN BUMN DAN BUMN-BUMN PELAKSANA
TAHUN 2012 DAN SEMESTER I 2013

No.	Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
	Judul	Jml	Nilai		Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Masa Berakhirnya Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Program BL BUMN Peduli Tidak Tegas Diatur oleh Kementerian BUMN	1		- BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN dalam membuat peraturan, terutama yang berdampak pada penggunaan kekayaan negara/perusahaan dibuat dengan tujuan yang benar dan segera mengevaluasi kembali penempatan tim perumus hukum	1		- a. Telah dilakukan rapat dengan peserta Kementerian BUMN, BPK RI, Direktorat Pelaporan dan Akuntansi, DJKN, Ditjen Pajak, dan Pihak-Pihak lain yang terkait dengan status keuangan PKBL - Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2014 terlampir b. Telah disusun Draft Peraturan Menteri BUMN tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang didalamnya juga mengatur pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana terlampir. c. Telah diterbitkan Surat Menteri BUMN No.S-513/MBU/09/2014 Tanggal 4 September 2014 perihal Temuan BPK terkait PKBL BUMN d. Belum ada Peraturan terkait kegiatan yang didanai BUMN Peduli khususnya untuk kegiatan yang masih berlangsung PTL Semester II 2015 • Telah diterbitkan Permen No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per Desember 2015	
2	Kementerian BUMN Tidak Melakukan Pemantauan dan Pengendalian yang Memadai atas Dana Kegiatan BL BUMN Peduli	1		- BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar: a. Melakukan audit atas dana BL BUMN Peduli sejak ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan dan hasil audit ditembuskan ke BPK RI	1		- a. Telah diteruskan Surat Menteri BUMN kepada Direksi BUMN Koordinator untuk menyusun rencana aksi penyelesaian program dan meminta untuk dilakukan audit atas pelaksanaan kegiatan melalui Surat Menteri BUMN No. S-699/MBU/10/2014 Tanggal 17 Oktober 2014; Rencana aksi belum disampaikan oleh Koordinator Kegiatan sehingga penyelesaian Program BL BUMN Peduli belum dapat dilakukan. b. Telah dilakukan audit terhadap Program BL BUMN Peduli yaitu: 1) Sektor Kesehatan (PT. Askes (Persero) Tbk.) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 - Laporan Akuntan Independen KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono No.R-054/Askes-KPS/AE01/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 2) Sektor Pasar Murah (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) Tahun 2012 - Laporan Akuntan Independen KAP Hertanto, Sidik, dan Indra N 3) Sektor Bencana Alam (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) Tahun 2012 - Laporan Akuntan Independen KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan Tanggal 15 Januari 2014 4) Program Bina Lingkungan BUMN Peduli - Daerah Tertinggal (PT. Pertamina (Persero) Tahun 2012 - Laporan Akuntan Independen KAP Hertanto, Sidik, dan Rekan No.HSR.IS/PKBL-AUP/01.PERTAMINA/V/13 Tanggal 24 Mei 2013 5) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)) (Tahun 2012) - Laporan Akuntan Independen KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan No.009/LA-BL/P.II/V/13 Tanggal 14 Juni 2013 6) Program Bina Lingkungan Ketahanan Pangan Sektor Sapi (PT. Berdikari (Persero)) Tahun 2013 - Laporan Akuntan Independen KAP Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan No.001/BSP/LAI/II/14 Tanggal 30 Januari 2014 PTL per Maret 2016 Tindak lanjut merujuk pada LK TA 2012 Telah diterbitkan Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis No.S-86/D7/MBU/12/2015 Tanggal 18 Desember 2015 ttg. Permintaan Hasil Audit Program BL Peduli oleh KAP Telah diterima 19 LHA KAP atas 20 Program BL BUMN Peduli PTL per November 2016 Telah disampaikan seluruh Laporan Audit BL Peduli (21 BUMN) - Terlampir	1								Diusulkan selesai ditindaklanjuti per November 2016	

No.	Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah						
	Judul	Jml	Nilai		Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				b. Menetapkan status sisa/saldo dana Kegiatan BL BUMN Peduli yang masih ada di Kelompok Kerja masing-masing kegiatan	1		PTL Semester II 2015 - Telah diterbitkan Permen No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN - Nota Dinas Asdep TJSL kepada Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis No.ND-13/D7.MBU.4/1/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Kebijakan BUMN per sektor - Nota Dinas Asdep TJSL kepada Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis No.ND-03/D7.MBU.4/1/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi terkait Keberlanjutan PKBL pada BUMN PTL per Maret 2016 Tindak lanjut merujuk pada LK TA 2012 - Telah diterbitkan Surat Menteri BUMN Nomor S-554/MBU/2013 tanggal 9 September 2013 tentang kebijakan Program BL BUMN Peduli - Telah diterima Laporan Hasil Audit terhadap Program BL BUMN Peduli sebanyak 19 LHA atas 20 Program. (kecuali PIM - anak perusahaan PHC) - Telah dibuat Nota Dinas Asdep TJSL No. ND-10/D7.MBU.2/2016 tanggal 2 Februari 2016 kepada Kepala Biro Umum tentang Penyampaian Lampiran Keuangan berupa Status dan Saldo Program BL BUMN Peduli. TL per November 2016 - Surat kepada BUMN Koordinator Nomor: S-438/D7.MBU/3/10/2016 tgl 11 Oktober 2016 untuk meminta Laporan Penyelesaian Kegiatan - ND-10.D7.MBU.4.02.2016 020216 ttg Penyampaian rekapitulasi kegiatan dan saldo BL BUMN Peduli per 31 Desember 2015 PTL per Juli 2017 a. Surat Menteri BUMN No S-301/MBU/05/2017 tgl 12 Mei 2017 tentang Status dan Saldo Dana BL Peduli. Selanjutnya dana tersebut dikembalikan dari BUMN Koordinator ke BUMN Donatur atau dikembalikan ke kas negara paling lambat 3 bulan sejak tanggal 12 Mei 2017. PTL Semester II 2017 Surat KBUMN ke DJPB S-141/D7.MBU/07/2017 Tentang koordinasi mekanisme penyetoran ke Kas Negara sisa dana BL Peduli Surat DJPB S-759A/PB.3/2017 tentang mekanisme penyetoran ke kas negara atas sisa dana BL Peduli PTL per April 2018 - Telah terbit Surat dari DJPB Kemenkeu No. S-7594/PB.3/2017 tgl 30 Agustus 2017 perihal Mekanisme penyetoran ke kas negara atas Sisa Dana BL Peduli - Surat Menteri BUMN nomor S-755/MBU/12/2017 perihal mekanisme penyetoran ke kas negara atas sisa dana Bina Lingkungan Peduli - Bukti Pengembalian Sisa Dana sebesar Rp1.398.564.236,00 PTL Semester I 2020 Pada CaLK LK 2018 dijelaskan: a. Bantuan Tunai BUMN Peduli Masyarakat Korban Bencana Alam dengan koordinator PT Pos Indonesia. Kegiatan tersebut dinyatakan selesai dan sisa dana sebesar Rp337.573.575,00 dikembalikan ke kas Negara pada tanggal 26 Jan 2018 (bukti setor terlampir) b. Program Peduli Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan yang dibentuk dalam Pokja Program BUMN Peduli Beasiswa Pendidikan & Pelatihan, dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan sisa dana sebesar Rp4.479.751.549,00 dikembalikan ke PT Pos Indonesia pada tanggal 20 Apr 2017 (bukti setor PT Angkasa Pura II ke PT Pos Indonesia terlampir) c. BUMN Peduli Bencana Wastor dengan koordinator PT Pelindo IV. Kegiatan telah selesai dan sisa dana sudah dikembalikan kepada BUMN donatur, sedangkan sisa dana sebesar Rp.197.389.126,00 (ditambah dengan dana pengembangan) sudah dikembalikan ke rekening Kas Negara pada tanggal 12 Feb 2018 (bukti setor terlampir)															Dipantau sampai dengan disetor ke kas negara yang sebelumnya dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak terkait terhadap sisa dana BL Peduli	
																Dipantau sampai dengan disetor sesuai mekanisme tersebut							
																Dipantau sampai dengan penyetoran seluruh pengembalian dana berdasarkan laporan monitoring pengembalian sisa dana BL Peduli							
																Diusulkan belum sesuai per Semester I 2020.	1.933.526.937,00						
																Dipantau sd bukti setor PT Pos Indonesia ke kas negara sebesar Rp4.479.751.549,00 disampaikan ke BPK							

No.	Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut	Seuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Negara/ Daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	PTL Semester I 2021 1. Nota Dinas ND-92/DSI-MBU/B04/2021 tanggal 22 April 2021 Dari Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Perihal : Penyampaian Rekomendasi Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Audited PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020 2. Rialah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 PT Pos Persero (Persero) Nomor RBS-27/DSI-MBU/B04/2021. PTL Semester II 2021 Hasil penelusuran dokumen Rekemng Karu Bank Mandiri dengan nomor rekening 1190098013599 atas nama Kepala SGLK Posindo tanggal 01 sd 31 Mei 2017 menunjukkan bahwa PT Pos telah mengembalikan sisa dana Program Bina Lingkungan senilai Rp4.417.285.311,00 kepada BUNN-BUMN penyumbang Dengan demikian masih terdapat sisa dana senilai Rp67.326.240,00 (Rp4.484.611.551,00 - Rp4.417.285.311,00) atas 5 BUNN (PT Aken, PT Perhanni, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum SPUL dan PT Asuransi Kredit Indonesia) yang belum ditampirkan dokumen/bukti setoran pengembalian. PTL per Agustus 2022 Surat Pte. DeskSta Kelengkapan PT Pos Indonesia No.Pos 197862N/700/PSK/2022 Tanggal 14 Juli 2022. perihal Pengembalian Dana BUNN Peduli senilai Rp67.326.240,00 beserta copy bukti transfer	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dipantau sd bukti setor PT Pos Indonesia ke kas negara sebesar Rp4.479.751.549,00 diungkapkan ke BPK. Diusulkan belum sesuai karena : 1. Belum diterima surat penjelasan terkait mekanisme pengembalian dana Program Bina Lingkungan kepada BUNN-BUMN penyumbang bakti ke Kas Negara. 2. Masih terdapat sisa dana senilai Rp67.326.240,00 yang belum memiliki bukti setor yang terdiri dari a. Asdes sebesar Rp52.074.342,00; b. Petiuan sebesar Rp48.715.317,00; c. Pegawai Negeri Indonesia sebesar Rp2.614.611,00; d. Petan SPUL Sumatna Pengembangan sebesar Rp1.960.958,00; e. Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp1.960.958,00. Diusulkan belum sesuai Dipantau: 1. Belum diterima surat penjelasan terkait mekanisme pengembalian dana Program Bina Lingkungan kepada BUNN-BUMN penyumbang bakti ke Kas Negara. 2. Bukti validasi dari Inspektori dan Asdep Kementerian BUNN.	18
3	Pembayaran Atas Jasa Profesional Untuk Kegiatan BL BUNN Peduli Penghijauan Daerah Aliran Sungai Citarum Sebesar Rp440.000.000,00 Kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tidak Jelas Pertanggungjawaban nya	1	-	1	1	-	Telah diterbitkan Surat Dirut PNM No.S-124/PNM-Dirut/JMK/III/14 Tanggal 28 Maret 2014 tentang penjelasan jasa konsultasi program. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyediaan jasa konsultasi, bukan merupakan kegiatan jasa kustodian yang sumber pembiayaannya menggunakan dana operasional PT. BUNN HL. 1 (bukan merupakan dana BUNN Peduli). TL Maret 2016: Telah dibuat Nota Dinas Asdep TSI, No.ND-23/DT MBU.4/12/2015 Tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian draft Surat Deputi Infrais a.n. Menteri BUNN kepada PT. PNM (Persero) tentang intruksi untuk menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya jasa. PTL per November 2016 1. Surat dari PT. PNM No. S-156/PNM-Dirut/PLA/V/2016 tgl 26 Mei 2016 tig Tindak Lanjut Temuan BPK 2. Memorandum No.M-456/PNM-PLA/V/16 tanggal 30 Mei 2016 perihal Surat Penjelasan kepada Kementerian BUNN dan BPJS Ketenagakerjaan 3. Lampiran Surat berisi Rincian biaya operasional beserta invoice. Dokumen rincian biaya yang disampaikan merupakan dokumen selama jangka waktu pemeriksaan sehingga akan dilakukan kajian lebih lanjut PTL per Juli 2017 a. Surat S-31/DT/MBU/02/2017 tgl 22 Feb 2017 dari Deputi Infrastruktur Bisnis ke Dirut PT PNM yg a.l menyatakan BPK tidak dapat meyakini surat S-156 dan agar Dirut segera menindaklanjutinya PTL Semester II 2017 Surat No. S-308/PNM-DIR PUS/ML/III/17 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Kesediaan Bayar BL Das Citarum PTL per April 2018 Surat No S-144/PNM-DIRKEU/ML/IV/18 perihal laporan penyetoran ke kas negara sebesar Rp440.000.000,00	1	-								Dipantau sampai dengan terdapat kesesuaian antara output atas pekerjaan tersebut dengan rincian biaya atau adanya pengembalian uang ke kas negara Rp 440.000.000	

No.	Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Mekanisme Pemanfaatan dan Hasil Penjualan Rusun Dana BL BUMN Peduli Sarana Dan Prasarana Umum Serta Rumah Layak Huni yang dilakukan Oleh Perum Perumnas Tidak Jelas dan Terdapat Pengalihan Dana Untuk Kegiatan Tersebut ke Deposito Sebesar Rp125.000.000.000,00	1		BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis beserta jajaran yang menangani PKBL untuk : a. Melakukan evaluasi dan memantau pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.	1		Kementerian BUMN telah Memugaskan kepada Tim Inspektorat untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan dan pemantauan kegiatan BL BUMN pembangunan rumah susun. Laporan telah disusun dan dilaporkan kepada Menteri BUMN. Namun sampai dengan saat ini belum ada arahan dari pimpinan. Dokumen terkait: Surat Tugas No ST-02/MBU/2014 Tanggal 28 Januari 2014 tentang Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan BL BUMN Peduli Pembangunan Rumah Susun. Berdasarkan hasil pemeriksaan LK KBUMN TA 2014, kegiatan pembangunan rusun belum selesai sehingga tujuan dan peruntukannya masih belum jelas PTL per Maret 2016 Program Rumah Susun dari dana BL Peduli telah dialihkan pelaksanaannya ke Perumnas dan dananya berasal dari Korporasi, sesuai dengan Surat Menteri No S-85/MBU/1/2016 tgl 25 Januari 2016 tentang Pengesahan RKAP Perum Perumnas Tahun 2016. Dipending, menunggu proses bukti-bukti pengembalian dari Perum Perumnas TL per November 2016 - Surat pengesahan RKAP Perum Perumnas Tahun 2016 Nomor S-85/MBU/1/2016 tgl 25 Januari 2016, yang diantaranya memuat: a. Perum Perumnas diperbolehkan untuk menjual dengan harga komersial. b. Selanjutnya dana pembangunan rumah susun yang berasal dari dana BL BUMN Peduli untuk segera dikembalikan kepada BUMN penyalur dana (BUMN donatur). - Bukti penyetoran/pengembalian dana kepada BUMN donatur 1) Deputi Bid. Usaha Industri Primer sebesar Rp5.040.506.637 2) Deputi Bid. Usaha Industri Strategi & Manufaktur Rp1.440.123.151 3) Deputi Bid. Usaha Infrastruktur & Logistik Rp5.032.723.322 4) Deputi Bid. Usaha Jasa Rp1.440.144.753 5) Deputi Bid. Usaha Industri Primer Rp5.790.548.859 6) Deputi Bid. Usaha Industri Strategi & Manufaktur Rp26.053.593.908 7) Deputi Bid. Usaha Infrastruktur & Logistik Rp360.069.104 8) Deputi Bid. Usaha Jasa Rp87.031.424.961 9) Deputi Bid. Usaha Bid. Usaha Insutri Primer Rp9.360.940.899 10) Deputi Bid. Usaha Industri Strategis & Manufaktur Rp21.962.207.493 11) Deputi Bid. Usaha Infrastruktur & Logistik Rp5.763.912.712										Diusulkan TDD dengan pertimbangan: Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti perubahan regulasi dan program tersebut tidak dilanjutkan (selesai)	
				b. Memberikan sanksi yang keras dan tegas kepada: 1) PT Hutama Karya yang telah melakukan dropping dana sebesar Rp151.000.000.000,00 secara langsung ke rekening Perum Perumnas tanpa adanya pengajuan dari Perum Perumnas yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;	1		Menteri BUMN telah memberikan teguran tertulis kepada Direksi Hutama Karya melalui Surat Menteri BUMN No S-100/MBU/2014 Tanggal 3 Maret 2014	1								Sesuai Rekomendasi. Diusulkan selesai karena Menteri BUMN telah memberikan teguran kepada Direksi PT. Hutama Karya dan Perum Perhutani		
				2) Direktur Utama Perum Perumnas yang telah mengalihkan dana dalam bentuk deposito tanpa sepengetahuan dan seizin Kementerian BUMN yang berwenang dalam menetapkan dana kegiatan BL Peduli.			Menteri BUMN telah memberikan teguran tertulis kepada Direksi Perum Perumnas melalui Surat Menteri BUMN No S-101/MBU/2014 Tanggal 3 Maret 2014											

No.	Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
	Judul	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b. Membiayai laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana BL BUNM Peduli untuk kegiatan cetak sawah serta hasil/manfaat yang dihasilkannya. Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke BPK RI.	1		- PT PHIC telah menerima BPKU untuk menilai pertanggungjawaban kegiatan oleh PT SIRS melalui Laporan Financial Due Diligence Pembangunan Kebun Pangan di Kabupaten Kutupung No.LAK/TT-204/D503/22/2013 Tanggal 11 Desember 2013 - Kementerian BUNM telah melaporkan Perkembangan Program Pensektoran Sawah di Kutupung melalui Nota Dinas Pkt Askep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri No ND-77/D1/MBU/2014/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 - PT PHIC telah melaporkan progress Kegiatan Cetak Sawah di Kutupung berdasarkan Laporan Progress Kegiatan No.U-1681/A00000/UM/2014 Tanggal 25 November 2014							1			
				c. Memastikan ketersediaan dana dan sumber daya atas pelaksanaan cetak sawah dan melakukan evaluasi serta pemantauan atas realisasi fisik pekerjaan yang dilakukan PT Hizama Karya dan PT Barata Abipraya.	1		- Kementerian BUNM telah Mengajukan kepada Tim Verifikasi untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan dan pemantauan kegiatan BL BUNM Peduli Cetak Sawah melalui Surat Tugas Menteri BUNM No.ST-02/MBU/2014 Tanggal 28 Januari 2014 Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Kegiatan Cetak Sawah sesuai dengan Nota Dinas No ND-19/Insp/MBU/2014 Tanggal 23 Mei 2014 Pada laporan tersebut menyebutkan terdapat dana sisa yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program cetak sawah sesuai dengan pemantauan yang dilaksanakan setelah pengelolaan diserahkan kepada PT PHIC dan belum terdapat penjelasan lanjutan mengenai mekanisme penyediaan dana dan sumber daya termasuk pembayarannya							1			
				d. Memastikan kontrak yang dibuat untuk pekerjaan konsultan dan pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan.	1		- Kementerian BUNM telah Mengajukan kepada Tim Verifikasi untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan dan pemantauan kegiatan BL BUNM Peduli Cetak Sawah melalui Surat Tugas Menteri BUNM No.ST-02/MBU/2014 Tanggal 28 Januari 2014 Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Kegiatan Cetak Sawah sesuai dengan Nota Dinas No ND-19/Insp/MBU/2014 Tanggal 23 Mei 2014 Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Tim Inspektori tidak dapat memberikan pendapat atas kesesuaian kontrak yang dibuat untuk pekerjaan konsultan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan acuan yang ditetapkan							1			
				e. Memastikan bahwa pekerjaan konstruksi atau fisik pekerjaan telah sesuai dengan hasil studi kelayakan dan detail engineering design (DED) yang dibuat.	1		- Kementerian BUNM telah Mengajukan kepada Tim Verifikasi untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan dan pemantauan kegiatan BL BUNM Peduli Cetak Sawah melalui Surat Tugas Menteri BUNM No.ST-02/MBU/2014 Tanggal 28 Januari 2014 Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Kegiatan Cetak Sawah sesuai dengan Nota Dinas No ND-19/Insp/MBU/2014 Tanggal 23 Mei 2014 Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Tim Inspektori tidak dapat memberikan pendapat terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi atau fisik pekerjaan sesuai dengan hasil studi kelayakan dan DED yang dibuat. Pekerjaan konstruksi atau fisik telah sesuai dengan kontrak dan telah diadendum untuk kesesuaian antara pekerjaan konstruksi atau fisik dengan kontrak.							1			
				f. Memastikan adanya ijin dari pemilik lahan atas tanah-tanah baik yang sudah dan yang akan dilakukan pekerjaan untuk segera mendapatkan persetujuan secara resmi dari pemilik lahan.	1		- Kementerian BUNM telah Mengajukan kepada Tim Verifikasi untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan dan pemantauan kegiatan BL BUNM Peduli Cetak Sawah melalui Surat Tugas Menteri BUNM No.ST-02/MBU/2014 Tanggal 28 Januari 2014 Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Kegiatan Cetak Sawah sesuai dengan Nota Dinas No ND-19/Insp/MBU/2014 Tanggal 23 Mei 2014 Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Tim Inspektori menyatakan bahwa ijin pemilik lahan yang sudah dimiliki sebagian telah diuangkan dalam Persetujuan Kerja Sama (PKS) sedangkan selangnya belum mendapatkan Persetujuan Kerja Sama (PKS).							1			

No.	Temuan			Rekomendasi			Tindak Lanjut	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Negara/ Daerah	
	Jumlah	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				g. Memerintahkan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pengganti pelaksana kegiatan pembangunan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab PT SHS untuk secara intensif menginformasikan perkembangan kegiatan dan penggunaan dana ke seluruh BUMN penyangga dana kegiatan pemecahan sawah;	1		- Telah diterbitkan Surat Nomor S-535/MBU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Perihal Pengalihan Operator/Pelaksana Pembangunan Kebun Pangan/Food Estate di Ke Ketapang Laporan Progress Kegiatan Cetak Sawah di Ketapang berdasarkan Laporan Progress Kegiatan No.U-1681/A00000/UM/2014 Tanggal 25 November 2014. Namun laporan tersebut belum menginformasikan perkembangan kegiatan pemecahan sawah							1				
				h. Memastikan bahwa kegiatan cetak sawah bisa dilakukan secara optimal dengan mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan saluran air secepatnya dan dalam menghadapi kendala-kendala di lapangan;	1		- PT. PHIC telah menyusun Laporan Progress Kegiatan Cetak Sawah di Ketapang berdasarkan Laporan Progress Kegiatan No.U-1681/A00000/UM/2014 Tanggal 25 November 2014 Penelitian Program Ekstensifikasi Pertanian Tanaman Pangan Lahan Pasang Surut Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pada Laporan tersebut menyebutkan bahwa upaya perbaikan struktur tanah adalah pertama tanah tersebut dilakukan pencucian secara berkonsentrasi sehingga diawali dengan pembuatan DED terkait water management. Selama perbaikan agro ekosistem tersebut belum dapat dilaksanakan karena membutuhkan waktu antara 3-5 tahun.								1			
				i. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman cetak sawah yang telah dialihkan dari PT SHS kepada PT Pupuk Indonesia bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	1		- PT. PHIC telah melakukan menyusun Laporan Progress Kegiatan Cetak Sawah di Ketapang berdasarkan Laporan Progress Kegiatan No.U-1681/A00000/UM/2014 Tanggal 25 November 2014 Penelitian Program Ekstensifikasi Pertanian Tanaman Pangan Lahan Pasang Surut Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pada Laporan tersebut menyebutkan bahwa perbaikan agro ekosistem tersebut belum dapat dilaksanakan karena membutuhkan waktu antara 3-5 tahun. Budidaya tanaman dapat tetap dilaksanakan, tetapi hasilnya tidak optimal								1			
	Jumlah	6	Rp	-	16	Rp	-	5	Rp	1	Rp	-	-	10	Rp	-	-	Rp 2.375.526.937,00